

**ANALISIS PELUANG KABUPATEN JENEPONTO SEBAGAI
PENGEMBANGAN PUSAT KOTA SKALA NASIONAL**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan
Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh

MUH NURSYAMSIR ALI

NIM. 60800115061

**JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 28 Agustus 2020

Penyusun,



Muh Nursyamsir Ali

60800115061

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Peluang Kabupaten Jeneponto Sebagai Pengembangan Pusat Kota Skala Nasional.

Nama Mahasiswa : Muh Nursyamsir Ali

NIM : 60800115061

Jurusan : Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas : Sains dan Teknologi

Disetujui Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Nursyam AS, S.T., M.Si.

Fadhil Surur, S.T., M.T.

Mengetahui

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

Ketua Jurusan Teknik Perencanaan
wilayah dan kota

UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Muhammad Hafid Mustami, M.Pd.
NIP. 19710412 200003 1 001

A. Idham AP.S.T., M.S.i
NIP. 19761007 200912 1002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Analisis Peluang Kabupaten Jeneponto Sebagai Pengembangan Pusat Kota Skala Nasional." yang disusun oleh Muh Nursyamsir Ali, NIM: 60800115061, mahasiswa Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada Senin, 23 Maret 2020, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota dalam Ilmu Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.

Samata Gowa, Agustus 2020

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.d.

Sekretaris : Risma Handayani, S.Ip., M.Si.

Munaqisy I : A. Idham AP, S.T., M.Si.

Munaqisy II : Juhanis, S.Sos., M.M.

Pembimbing I : Nursyam AS, S.T., M.Si

Pembimbing II : Fadhil Surur, S.T., M.T.

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN ALAUDDIN Makassar,



Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd
NIP. 197104122000031001

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt., sebab atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Peluang Kabupaten Jeneponto Sebagai Pengembangan Pusat Kota Skala Nasional” tepat pada waktunya. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad Saw., atas Al-Qur’an dan hadist serta ilmu-ilmu yang tersebar sehingga penyusunan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Keberhasilan penulis tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan banyak bantuan, baik moril maupun materil. Sebagai bentuk penghargaan dan terima kasih kepada:

1. **Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar serta seluruh jajarannya.
2. **Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.**, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. **A. Idham A.P., S.T., M.Si** selaku Ketua Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

4. **Dr. Henny Haerani G., S.T., M.T.** selaku Sekretaris Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. **Nur Syam AS, S.T., M.Si** dan **Fadhil Surur, S.T., M.Si**, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis mulai awal bimbingan hingga rampungnya tugas akhir.
6. **Juhanis, S.Sos. MM** dan **A. Idham A.P., S.T., M.Si** selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan dan masukan dalam penyelesaian tugas akhir.
7. Seluruh Dosen, Staf Akademik, Staf Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Staf Perpustakaan, Pengajar Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama mengikuti perkuliahan.
8. Keluarga besar penulis terkhusus kepada Ibunda tercinta **Hj. Roslawati Dg. Nurung**, serta Ayahanda tercinta **H. Syamsuddin Dg. Ngambo**, serta Bunda **Bangkala**, yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian dan dorongan dari awal perkuliahan hingga selesainya tugas akhir ini. Semoga Allah Swt. selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas segala yang telah diberikan kepada penulis.

9. Bapak **Iyan Awaluddin S.T., M.T.**, selaku penasehat akademik di jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
10. Nurul Ilmi Amaliyah S.PWK., Alif Dary Utomo S.PWK., Andi Alfiana Asri S.PWK, Putri Afia S.PWK, Umar S.PWK, Algafari S.PWK, Nurhidayanti Alfath S.PWK, Resky Ahmad Munarsyah, Riza Pratama, Arta Mulyamin Haq, Rifky Reynaldi, Muhammad Syahril, Rachmat Ramadhan, Abidzar Ghifari dan Sitti Faisah, Fahisyah Ahida Ahmad, Mega Hardiyani Rauf yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi penulis.
11. Saudara-saudara “Keluarga Sarang” Andi Akram Al-Fajri A S.H, A. Akbar Hidayat S.Hum, Alyan Mulya, S.H, Harry Adha Haq S.H, Syaum Wal Fitra S.Hum, Ahmad Reynaldi, Didit Juliant, Aldi Guna, Ahmad Muhaimin, Masrur Husnadi yang selalu mengingatkan dan membantu penulis dalam mengerjakan skripsi.
12. Teman-teman seperjuangan “Lembang Lohe” Riswan Abdullah S.H, Irnawati Zahra S.Ak, Elisa Cahyadi S.H, Sumarni S.Ip, Nuranisa Fajriani S.H, Maisarah Fadhilah Fadli S.Kom, Andi Deawita Fajrina S.E, Nurislamiyah, Agus, atas dukungan, bantuan, kritik, maupun saran.
13. Senior-senior Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah berbagi ilmu dan selalu mengingatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis.
14. Saudara serta saudari seperjuangan PREDATOR (Teknik PWK Angkatan 2015) atas dukungan, bantuan, kritik, maupun saran.

15. Saudara serta saudari seperjuangan IAPIM 15 (Ikatan Alumni Pesantren IMMIM 2015) atas dukungan, bantuan, kritik, maupun saran.

Penulis sepenuhnya sadar dalam penulisan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan menjadi bahan pembelajaran bagi penulis untuk lebih giat dan teliti dalam proses penulisan penelitian ini. Saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk kelancaran dan kesempurnaan dari penulisan penelitian ini. Akhir kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penyusunan penelitian ini. Besar harapan penulis penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Samata, Agustus 2020

Penulis

ABSTRAK

Nama Penulis : Muh Nursyamsir Ali
NIM : 60800115061
Judul Penelitian : Analisis Peluang Kabupaten Jeneponto Sebagai Pengembangan Pusat Kota Skala Nasional

Kota (*city*) adalah wilayah perkotaan yang telah mempunyai status administrasi sebagai sebuah kota, baik kota kecil, kotamadya maupun kota metropolitan. Akhir-akhir ini diwacanakan mengenai pemindahan ibukota skala Nasional, melihat dari wacana pemindahan ibukota Negara di lihat dari potensi dan aspek-aspeknya Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peluang karena berada pada posisi strategis, dari segi infrastruktur Provinsi Sulawesi Selatan sudah memadai, serta sebagai pusat pengembangan kawasan Timur Indonesia. Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di tengah Pulau Indonesia. Faktor-faktor yang menjadi suatu Ibu Kota yaitu pada faktor aspek fisik dasar yang meliputi (kemiringan lereng, kebencanaan, dan pola ruang), faktor politik yang meliputi (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Isu-isu pemindahan Ibu Kota), faktor infrastruktur yang meliputi (internal dan eksternal), faktor lahan yang meliputi (cakupan luas lahan dan pemanfaatan lahan), faktor ekonomi yang meliputi (ekonomi regional dan ekonomi nasional), dan faktor kedudukan strategis yang meliputi (letak geografis dan sumber daya alam(SDA)). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penentu suatu ibukota dan peluang ekonomi jika dijadikan sebagai pusat Kota Skala Nasional di Kabupaten. Untuk mengetahui faktor-faktor penentu suatu ibukota, digunakan analisis pembobotan (skoring) yaitu melakukan pembobotan berdasarkan 13 indikator berdasarkan Permen PU Tahun 2017. Sedangkan untuk konsep peluang Kabupaten Jeneponto sebagai Pusat Kota dalam bidang ekonominya digunakan metode Multi Kriteria. Sehingga hasil dari penelitian ini, faktor-faktor penentu ibukota Skala Nasional dan peluang dijadikan sebagai Pusat Kota dalam bidang ekonominya yaitu dapat mengetahui faktor-faktor yang mana saja yang menjadi penentu, serta melihat wilayah pendukungnya yang memiliki pergerakan ekonominya meningkat sehingga sangat berpeluang dalam pengembangan Pusat Kota Skala Nasional.

Kata Kunci : *ibukota skala Nasional, Kota Baru, Lahan*

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| LEMBAR JUDUL..... | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iii |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 8 |
| 1. Tujuan Penelitian | 8 |
| 2. Manfaat Penelitian | 9 |
| D. Ruang Lingkup Penelitian | 9 |
| E. Sistematika Pembahasan | 10 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. Kota Baru | 12 |
| 1. Pengertian Umum Kota Baru | 16 |
| 2. Perkembangan Kota Baru | 19 |
| 3. Faktor Perkembangan Kota Baru | 21 |
| B. Kota Induk..... | 22 |
| C. Pembukaan Kawasan atau Lahan Baru | 25 |
| D. Perubahan Pemanfaatan lahan..... | 28 |
| E. Aglomerasi | 31 |
| F. Kerangka Pikir Penelitian | 36 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|-------------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian..... | 37 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 37 |
| 1. Lokasi Penelitian..... | 37 |
| 2. Waktu Penelitian | 38 |
| C. Jenis dan Sumber Data | 38 |
| 1. Jenis Data | 38 |
| 2. Sumber Data..... | 38 |
| D. Metode Pengumpulan Data | 39 |
| 1. Observasi Lapangan | 39 |
| 2. Wawancara..... | 40 |
| 3. Telaah Pustaka | 40 |
| 4. Studi Dokumentasi | 40 |

| | | |
|----|--|----|
| E. | Variabel Penelitian | 40 |
| F. | Metode Pengolahan dan Analisis Data..... | 41 |
| | 1. Analisis Pembobotan..... | 41 |
| | 2. Metode Multi Kriteria | 44 |
| G. | Definisi Operasional..... | 46 |

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

| | | |
|----|--|-----|
| A. | Gambaran Umum Wilayah Kota Makassar | 53 |
| | 1. Letak Geografis dan Administrasi | 53 |
| | 2. Kondisi Pengguna lahan..... | 56 |
| | 3. Aspek Fisik Dasar | 59 |
| | a. Kondisi Topografi | 59 |
| | b. Kemiringan Lereng | 59 |
| | c. Curah Hujan | 60 |
| | d. Kondisi Hidrologi | 61 |
| | e. Geologi..... | 62 |
| B. | Gambaran Umum Kawasan penelitian | 67 |
| | 1. Letak Geografis dan Administrasi | 67 |
| | 2. Kondisi Penggunaan Lahan..... | 67 |
| C. | Faktor-Faktor Penentu Ibu Kota..... | 71 |
| | 1. Faktor Kondisi Fisik Wilayah | 71 |
| | a. Kemiringan Lereng | 71 |
| | b. Kebencanaan | 72 |
| | c. Pola Ruang | 75 |
| | 1) Kawasan Budidaya..... | 75 |
| | 2) Kawasan Lindung | 76 |
| | 2. Faktor Politik dan Hukum..... | 78 |
| | a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) | 79 |
| | b. Isu-isu Pemindahan Ibu Kota | 80 |
| | 3. Faktor Infrastruktur | 83 |
| | a. Internal | 83 |
| | b. Eksternal..... | 85 |
| | 4. Faktor Lahan | 85 |
| | a. Cakupan Luas Lahan..... | 86 |
| | b. Pemanfaatan Lahan | 87 |
| | 5. Faktor Ekonomi..... | 88 |
| | a. Ekonomi Regional..... | 89 |
| | b. Ekonomi Nasional..... | 89 |
| | 6. Faktor Kedudukan Strategis | 90 |
| | a. Letak Geografis..... | 91 |
| | b. Sumber daya Alam (SDA) | 92 |
| D. | Peluang Kabupaten jeneponto Sebagai Ibu Kota Skala Nasional Pada Bidang Ekonomi | 96 |
| E. | Keterkaitan Penelitian dengan Kandungan Ayat Al-Quran dan Hadis | 100 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 115 |
| B. Saran | 116 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| DAFTAR PUSTAKA | 118 |
| RIWAYAT HIDUP | |



DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------------|---|----|
| Tabel 1 | Luas Area Kabupaten Jeneponto Berdasarkan Kecamatan | 37 |
| Tabel 2 | Variabel Penelitian | 41 |
| Tabel 3 | Kategorisasi Aspek Pendukung | 43 |
| Tabel 4 | Luas Wilayah dan Presentase Menurut Kecamatan Di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019..... | 55 |
| Tabel 5 | Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 | 56 |
| Tabel 6 | Jenis Penggunaan Lahan Kabupaten Jeneponto | 57 |
| Tabel 7 | Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Jeneponto | 62 |
| Tabel 8 | Jenis Penggunaan Lahan Deleniasi Kawasan..... | 68 |
| Tabel 9 | Kriteria Penilaian Indikator | 71 |
| Tabel 10 | Kemiringan Lereng Deleniasi Kawasan | 72 |
| Tabel 11 | Data Gempa dan Tsunami Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat | 73 |
| Tabel 12 | Kebencanaan Deleniasi Kawasan..... | 74 |
| Tabel 13 | Pola Ruang (Budidaya) Deleniasi Kawasan..... | 75 |
| Tabel 14 | Luas Lahan Berdasarkan Pola Ruang (Budidaya) Deleniasi Kawasan..... | 76 |
| Tabel 15 | Pola Ruang (Lindung) Deleniasi Kawasan..... | 77 |
| Tabel 16 | Luas Lahan Berdasarkan Pola Ruang Deleniasi Kawasan | 78 |
| Tabel 17 | Luas Lahan Deleniasi Kawasan..... | 86 |
| Tabel 18 | Cakupan Luas Lahan Deleniasi Kawasan | 87 |
| Tabel 19 | Pemanfaatan Lahan Deleniasi Kawasan | 88 |
| Tabel 20 | Sumber Daya Alam (SDA) Deleniasi Kawasan | 93 |
| Tabel 21 | Rekapitulasi Skoring Variabel Hasil Penelitian | 94 |
| Tabel 22 | Arahan RTRW Setiap Sektor Unggulan..... | 97 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------------|--|-----|
| Gambar 1 | Perkembangan Konsep dan Pemikiran Mengenai Aglomerasi | 33 |
| Gambar 2 | Kerangka Pikir Penelitian | 36 |
| Gambar 3 | Peta Administrasi Kabupaten Jeneponto | 54 |
| Gambar 4 | Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Jeneponto | 58 |
| Gambar 5 | Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Jeneponto | 63 |
| Gambar 6 | Peta Curah Hujan Kabupaten Jeneponto | 64 |
| Gambar 7 | Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Jeneponto | 65 |
| Gambar 8 | Peta Geologi Kabupaten Jeneponto | 66 |
| Gambar 9 | Peta Administrasi Deleniasi Kawasan Kabupaten Jeneponto | 69 |
| Gambar 10 | Peta Penggunaan Lahan Deleniasi Kawasan Kabupaten Jeneponto..... | 70 |
| Gambar 11 | Peta Kemiringan Lereng Deleniasi Kawasan Kabupaten Jeneponto..... | 104 |
| Gambar 12 | Peta Bencana Alam Deleniasi Kawasan Kabupaten Jeneponto | 105 |
| Gambar 13 | Peta Pola Ruang (Budidaya) Deleniasi Kawasan Kabupaten Jeneponto..... | 106 |
| Gambar 14 | Peta Pola Ruang (Lindung) Deleniasi Kawasan Kabupaten Jeneponto..... | 107 |
| Gambar 15 | Peta Pola Ruang Deleniasi Kawasan Kabupaten Jeneponto | 108 |
| Gambar 16 | Peta Infrastruktur Deleniasi Kawasan Kabupaten Jeneponto..... | 109 |
| Gambar 17 | Peta Cakupan Luas Lahan Deleniasi Kawasan Kabupaten Jeneponto..... | 110 |
| Gambar 18 | Peta Pemanfaatan Lahan Deleniasi Kawasan Kabupaten Jeneponto..... | 111 |
| Gambar 19 | Peta Sumber Daya Alam (SDA) Deleniasi Kawasan Kabupaten Jeneponto..... | 112 |
| Gambar 20 | Peta Analisa Deleniasi Kawasan Kabupaten Jeneponto..... | 113 |
| Gambar 21 | Peta Analisa Potensi Kabupaten Pendukung Deleniasi Kawasan Kabupaten Jeneponto..... | 114 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota (*city*) adalah wilayah perkotaan yang telah mempunyai status administrasi sebagai sebuah kota, baik kota kecil, kotamadya maupun kota metropolitan. Selanjutnya, Adisasmita (2006) juga menyatakan bahwa pada umumnya kota diartikan sebagai suatu wilayah dimana terdapat pemusatan (konsentrasi) penduduk dengan berbagai jenis kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan administrasi pemerintahan. Secara lebih rinci dapat digambarkan bahwa suatu kota meliputi konsentrasi daerah pemukiman berpenduduk cukup besar dan dengan kepadatan yang relatif tinggi dimana kegiatan penduduk didominasi oleh kegiatan nonpertanian, seperti industri, perdagangan dan jasa, baik di bidang keuangan, transportasi, pendidikan, kesehatan dan pariwisata (Salasa, 2013).

Ibukota negara saat ini berada di DKI Jakarta yang berfungsi tidak hanya sebagai pusat pemerintah namun juga pusat ekonomi nasional. Karena kepadatan, daya dukung lingkungan yang menurun seperti sering terjadinya banjir, penurunan muka air tanah, kemacetan, kekurangan air bersih dan keterbatasan lahan menyebabkan fungsi ibukota mulai menurun dan tidak efisien. Jumlah kerugian akibat kemacetan tidak efisiennya penggunaan bahan bakar saja dapat mencapai 65 triliun rupiah di tahun 2017. Selain itu, ketimpangan antara Indonesia bagian timur dengan Indonesia bagian barat masih cukup besar hingga kini. Di tahun 2017, wilayah Jabodetabek berkontribusi sebesar 20,85% dan Pulau Jawa berkontribusi sebesar 58,49 persen dari PDB nasional (BPS, 2018). Jumlah

penduduk Jakarta ditahun 2016 adalah kurang lebih 4% dari penduduk Indonesia namun jika memperhitungkan penduduk Jabodetabek proporsinya adalah sebesar 10%. Penduduk Pulau Jawa sendiri saat ini adalah sebesar 150 juta atau sekitar 57% dari total penduduk Indonesia.

Akhir-akhir ini diwacanakan mengenai pemindahan ibukota skala Nasional. Pemindahan ini pada dasarnya bukan hal baru di bahas, pemindahan ibukota Negara di Indonesia telah menjadi pengalaman dan wacana sejak jaman kolonial Belanda. Pada awal abad 20, Gubernur Jenderal J.P. Graaf van Limburg Strirum (1916 – 1921) membawa gagasan untuk memindahkan ibukota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Gagasannya didasarkan kepada hasil studi dari H.F. Tillema, ahli kesehatan Belanda kelahiran Groningen yang bertugas di Semarang, tentang kesehatan kota-kota di pesisir utara Jawa. Disimpulkan bahwa kota-kota di pantai utara Jawa tidak sehat untuk dijadikan sebagai kedudukan Kantor Pemerintahan, niaga, industri, pendidikan dan lain-lain. Gagasan ini gagal karena dunia depresi besar (1932) disusul perang dunia. Pada masa Perang Kemerdekaan, tahun 1946, keamanan di Ibukota Jakarta sangat buruk karena masih banyak pasukan Sekutu AFNEI dengan pasukan Belanda (NICA) di belakangnya, dan masih banyaknya pasukan Jepang. Pada tanggal 2 Januari 1946 Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII memberikan Yogyakarta sebagai ibukota Negara. 4 Januari Presiden Soekarno, Wakil Presiden M. Hatta dan seluruh Kabinet sampai di Yogyakarta. Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda menyerbu Yogyakarta, Presiden dan Wakil Presiden ditangkap Belanda, dan kekuasaan diserahkan kepada Syafrudin Prawiranegara yang berada di

Sumatera Barat, dan menjadikan “Sumatera Barat” sebagai Ibukota Negara. Tanggal 6 Juli 1949, Ibukota Negara kembali ke Yogyakarta, setelah Presiden dan Wakil Presiden kembali ke Yogyakarta. Tanggal 17 Agustus 1950 Ibukota kembali ke Jakarta setelah Republik Indonesia Serikat bubar dan berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1957 Presiden Soekarno melalui pernyataan resmi menyatakan agar Palangkaraya menjadi “modal dan model” Ibukota Negara yang baru. Pada saat itu dibuat kerjasama dengan Uni Soviet. Sejumlah insinyur Rusia didatangkan untuk membangun jalan raya di lahan gambut, yang dilaporkan berjalan dengan baik. Krisis ekonomi pada tahun 1960an membuat pembangunan Palangkaraya terhenti, dan pada tahun 1965 pada saat Presiden Soekarno “dilengserkan”, gagasan itu lenyap. Pada tahun 2010 Presiden Yudhoyono membuka wacana tentang pemindahan Ibukota Negara, hanya saja gagasan tersebut berhenti pada tingkat wacana. Pada tahun 2017, Presiden Jokowi mengangkat kembali pentingnya pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke tempat lain (Tim Nawa Cipta, 2018).

Beberapa negara yang pernah melakukan pemindahan ibukota adalah Korea Selatan yang memindahkan pusat ibukota dari Seoul ke Sejong, Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, Amerika Serikat yang memindahkan pusat pemerintahan ke Washington dengan tetap menjadikan New York sebagai pusat perekonomian dan bisnis, Brazil yang memindahkan ibukota dari Rio de Janeiro ke Brasilia serta Turki yang memindahkan ibu kotanya dari Istanbul ke Ankara. Dan dari sekian banyak pengalaman pemindahan ibukota tersebut menjadi catatan khusus dari Bappenas RI, seperti pemindahan ibukota Australia ke Canberra yang

tidak menimbulkan efek perkembangan wilayah yang berarti, serta pemindahan ibukota Malaysia ke Putrajaya yang jaraknya terlalu dekat sehingga dampak positif dari pemindahan ibukota tersebut tidak signifikan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dari ibukota sebelumnya.

Sonny Harry B Harmadi (2018/10/1-Tribunnews.com) mengungkapkan bahwa menyebutkan bahwa ada enam syarat dari pertimbangan dalam menentukan wilayah ibu kotabaru. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Wilayah tersebut memiliki jaringan yang baik dan terhubung dengan pusat aktivitas politik.
2. Kepadatan penduduk yang rendah.
3. Resiko bencana yang rendah.
4. Daya dukung lingkungan yang baik.
5. Aman dalam perspektif pertahanan dan ketahanan nasional.
6. Memiliki potensi dikembangkan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa wacana pemindahan ibukota negara telah dibahas bersama presiden Republik Indonesia Joko Widodo di istana negara. Hal ini menunjukkan bahwa mulai ada upaya serius dari pihak pemerintah pusat untuk melakukan kajian terhadap proses pemindahan ibukota negara mengingat daya dukung sosial dan lingkungan di Kota Jakarta saat ini sudah dianggap tidak layak (Nicodemus R Toun. 2018).

Melihat dari dari wacana pemindahan Ibu Kota Negara di lihat dari potensi dan aspek-aspeknya Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peluang karena berada

pada posisi strategis, dari segi infrastruktur Provinsi Sulawesi Selatan sudah memadai, serta sebagai pusat pengembangan kawasan Timur Indonesia. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki beberapa Kabupaten/Kota, salah satunya Kabupaten Jeneponto yang memiliki peluang sebagai Pusat Kota skala Nasional, yang di mana Kabupaten Jeneponto berada di tengah-tengah Pulau Indonesia seperti di katakan Bj Habibie Posisinya yang berada di tengah-tengah Indonesia, diharapkan dapat berdampak bagi laju pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia (2019/04/30 - tagarnews.com). Kabupaten Jeneponto memiliki lahan yang luas dengan luas wilayah 749,79 km² yang memiliki 11 Kecamatan, memiliki ketinggian tanah yang baik sehingga bila ada tsunami cukup aman, memiliki tanah yang kurang produktif sehingga dapat di lakukan pembangunan, memiliki laut yang dalam sehingga dapat di bangun pelabuhan dan transportasi laut lancar, dekat dengan kota eksisting yang sudah berkembang sehingga investasi awal infrastruktur bisa cepat di laksanakan, dekat dengan penyediaan sumber daya air dan memiliki bebas pencemaran lingkungan.

Wacana pemindahan ibukota Negara pun di bahas oleh Walikota Makassar yang mengatakan Kabupaten Jeneponto menurutnya lebih cocok melihat dari ketinggian tanah baik kalau ada Tsunami cukup aman, tanah yang kurang subur sehingga dapat di tempatkan pembangunan, dari sisi pertahanan juga aman, serta berada di tengah-tengah Pulau Indonesia sehingga pembangunan di Indonseia dapat Merata. Dan Tugas Ahli Ikatan Alumni Perencana (IAP) pun memberikan tanggapan mengenai ibukota baru, mengatakan bahwa Jeneponto mempunyai peluang sebagai Pusat Kota Skala Nasional, melihat dari aspek-aspek Kabupaten

Jeneponto layak menjadi ibukota Negara yaitu dari aspek geologi tanah yang memiliki tanah kurang subur sehingga dapat di kembangkan pembangunan, serta dari Keamanan Jeneponto pun layak karena selama 50 Tahun terakhir tidak pernah terjadi Gempa Bumi. (makassar.tribunnews.com/2019/04/30).

Dalam Al Qur'an telah dijelaskan bahwa sejak diperintahkannya Nabi Muhammad Hijrah dari Mekkah ke Madinah, sesungguhnya landasan yg dasar dalam perencanaan sebuah Kota. Dapat dilihat firman Allah pada Q.S. Al-Baqarah / 2 : 218 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ
رَحْمَتَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya :

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Kementerian Agama, 2012).

Dalam M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menafsirkan ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan keimanan yang mendorong mereka untuk berhijrah demi membela agama dan berjuang menjunjung tinggi kalimat Allah, akan selalu mengharapkan menanti pahala yang besar dari Allah, meskipun mereka tidak sempurna dalam mengerjakan beberapa hal. Karena Allah Maha Pengampun dosa, Maha Penyayang, yang menyayangi hamba-Nya dengan memberi petunjuk dan pahala. Jihad dengan makna mencurahkan seluruh kemampuan atau menanggung pengorbanan atau yang hampir semakna dengannya seperti mencurahkan segala yang dimilikinya seperti dalam menafsirkan Qs. al-Baqarah [2]: 218. pada ayat ini Quraish Shihab menjelaskna

bahwa orang yang berjihad adalah orang yang mencurahkan segala apa yang dimilikinya sampai tercapai apa yang diharapkan. Lebih lanjut mari kita lihat bersama penafsiranya:

“dan berjihad yakni berjuang tiada henti dengan mencurahkan segala yang dimilikinya hingga tercapai apa yang diperjuangkan, perjuangan dengan nyawa, harta, atau apapun yang dimiliki dengan niat melakukan di jalan Allah, yang mengantarkan kepada ridha-Nya mereka itu mengharap rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Memang perjuangan selalu membutuhkan pengorbanan, seseorang yang berjuang ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan mereka akan mengorbankan sesuatu yang dimilikinya demi tercapai apa yang diinginkan. Menurut Quraish Shihab dalam berjihad seseorang dituntut untuk mencurahkan kemampuan baik lahir maupun batin dengan rupa mengorbankan apa yang dimilikinya entah itu harta benda, nyawa, tenaga, pikiran atau apapun yang dimiliki dengan niat mengharap ridha Allah Swt, memang perjuangan selalu membutuhkan pengorbanan, seseorang yang berjuang ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan mereka akan mengorbankan sesuatu yang dimilikinya demi tercapai apa yang diinginkan. Menurut Quraish Shihab dalam berjihad seseorang dituntut untuk mencurahkan kemampuan baik lahir maupun batin dengan rupa mengorbankan apa yang dimilikinya entah itu harta benda, nyawa, tenaga, pikiran atau apapun yang dimiliki dengan niat mengharap ridha Allah Swt.

Pada Ayat 218 surah Al-Baqarah terdapat penjelasan mengenai kata hijrah hanya dilihat sebagai bentuk nilai-nilai, namun dari kata hijrah itulah dasar dalam Perencanaan sebuah kota. Setibanya Nabi Muhammad dan pengikutnya di Madinah, terjadi suatu perubahan, dimana Madinah berperan sebagai pusat

perdagangan, sosial, pemerintahan dll, sementara kedudukan Mekkah tetap sebagai kota dgn fungsi pusat ibadah. Struktur dan pola ruang dibentuk untuk menciptakan keserasian dan keterpaduan antar ruang, maka lihat fungsi dan kedudukan Mekkah dan Madinah. hijrah adalah perpindahan baik secara fisik atau non-fisik yang dilakukan oleh setiap orang untuk tujuan yang lebih baik, halal, aman dan tentram dari keadaan sebelumnya.

Jadi melihat dari penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Analisis Peluang Kabupaten Jeneponto Sebagai Pengembangan Ibu Kota Skala Nasional”. Adapun fokus dari penelitian ini melihat seberapa besar peluang Kabupaten Jeneponto dalam menjadi kawasan pengembang pusat kota skala Nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah yang akan dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor-faktor penentu suatu ibukota Nasional di wilayah Kabupaten Jeneponto?
2. Apa sajakah peluang Kabupaten Jeneponto jika dihubungkan sebagai Pusat Kota Skala Nasional pada bidang Ekonomi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Mengetahui faktor-faktor penentu untuk suatu ibukota Skala Nasional di Kabupaten Jeneponto.

- b. Mengetahui peluang Kabupaten Jeneponto dapat dijadikan sebagai Pusat Kota Skala Nasional.

2. Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu manfaat kepada bidang keilmuan PWK, kepada masyarakat serta pemerintah khususnya di Kota Makassar.

a. Bagi Bidang Keilmuan Perencanaan Wilayah dan Kota

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi ataupun memberikan tambahan wawasan mengenai peluang Kabupaten Jeneponto sebagai pengembang dalam Pusat Kota skala Nasional.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini secara tidak langsung dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Ibu Kota skala Nasional. Dan sebagai bentuk penyalur aspirasi masyarakat kepada para *stakeholder* mengenai masukan ataupun kritikan tentang wilayah mereka sendiri.

c. Bagi Pihak Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pedoman kepada pihak pemerintah mengenai peluang-peluang Kabupaten Jeneponto sebagai Pusat Kota skala Nasional.

D. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah yang dimaksud pada penelitian ini secara umum meliputi seluruh wilayah administratif Kabupaten Jeneponto.

2. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi pada penelitian ini berfokus pada bagaimana melihat peluang Kabupaten Jeneponto sebagai Pusat Kota Skala Nasional.

E. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi dalam 5 (lima) bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, lingkup pembahasan dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUTAKA

Bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, lingkup pembahasan dan sistematika pembahasan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian, metode pengolahan dan analisis data, definisi operasional dan kerangka pikir penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum wilayah Kabupaten Jeneponto, gambaran umum Deleniasi Kawasan, gambaran lokasi penelitian meliputi Kondisi Fisik Wilayah, Pola Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Isu-isu Pemindahan Ibu Kota, Infrastruktur, Cakupan Luas Lahan, Pemanfaatan Lahan, Ekonomi

Wilayah, Kedudukan Strategis, analisis faktor-faktor penentu suatu Ibu Kota Nasional dan peluang Kabupaten Jeneponto dalam bidang Ekonomi serta tinjauan Al-Qur'an dalam memanfaatkan lahan untuk kebutuhan wilayah dan hidup manusia.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kota Baru

Menurut sejarah terbentuknya kota di mulai dari berkumpulnya para pedagang penjual barang-barang antar daerah yang mencari tempat persinggahan yang aman dan lokasi yang strategis terhadap gangguan keamanan, yang selanjutnya bertumbuh dan berkembang menjadi suatu kota kecil, yang dikelola oleh administrator yang ditunjuk, yang kemudian menjadi lebih besar maka terbentuklah kota-kota, yang merupakan wadah konsentrasi (pemusatan) penduduk, seperti yang terlihat pada waktu sekarang. Kota-kota besar dunia, pada umumnya terletak pada lokasi yang strategis, seperti di tepi muara sungai besar di tepi laut (Adisasmita, 2014). Menurut Kostof (1991) Kota adalah leburan dari bangunan dan penduduk, sedangkan bentuk kota pada awalnya adalah netral tetapi kemudian berubah sampai hal ini dipengaruhi oleh budaya tertentu (Toun, 2018).

Kota adalah tata ruang di atas permukaan (darat) dengan batas-batas wilayah administrasi yang telah ditetapkan di mana terjadi konsentrasi (pemusatan) penduduk di dalamnya beserta berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan politik. Penduduk perkotaan bertambah terus jumlahnya secara alami, yang diperbesar lagi oleh urbanisasi. Semakin besar suatu kota, daya tariknya lebih besar pula maka tingkat urbanisasinya semakin tinggi, secara nasional, penduduk perkotaan mencapai sekitar 50 persen (di Indonesia) ditotal penduduk suatu negara dan negara-negara maju mencapai lebih dari 60 persen. Dilihat dari aspek hubungan dengan daerah-daerah di luar, peranan kota sangat penting dan strategis,

yaitu berfungsi sebagai mata dan telinga dalam pengembangan wilayah. Berbagai informasi penting, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara-negara maju, kemajuan desain dan mode busana dari luar negeri, barang-barang elektronik dan berbagai barang *lux* (mewah) lainnya buatan luar negeri, dan sebagainya, didatangkan dari luar negeri dan masuk ke suatu negara melalui kota-kota besar. Kota-kota besar berfungsi melakukan pemeriksaan, pengamatan, dan pengawasan terhadap barang-barang yang didatangkan (diimpor) dari luar negeri, oleh karena itu sangatlah tepat bila dikatakan berfungsi sebagai mata dan telinga (Adisasmita, 2014).

Pembangunan berbagai prasarana dan sarana pembangunan berbagai fasilitas pelayanan sosial tersebut membutuhkan tersedianya tata ruang perkotaan yang cukup. Tata ruang wilayah perkotaan harus ditata secara efektif dan dinamis, agar dapat terpenuhi secara cukup, tertib, dan tidak terjadi kesemrawutan dalam jangka panjang, yang dituangkan dalam suatu Rencana Umum Tata Ruang/Kota Jangka Menengah dan Jangka Panjang (Lima Tahun dan Dua Puluh Tahunan). Dapat dipenuhi secara cukup dimaksudkan seluruh pengembangan dan pertumbuhan perkotaan yang membutuhkan ruang tidak mengalami kesulitan atau kekurangan, sehingga dapat berlangsung secara lancar. Tertib artinya pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak terjadi kesemrawutan berarti pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Untuk penataan dan pemanfaatan ruang secara tertib dan teratur diperlukan kebijakan dan perencanaan tata ruang yang akomodatif dan antisipatif. Untuk itu diperlukan banyak manajer perkotaan (*urban managers*) dan perencana

perkotaan (*urba planners*) yang berkapasitas dan berkualitas untuk menjawab tantangan dan tuntutan untuk memenuhi pengembangan dan pertumbuhan perkotaan yang sangat cepat pesat (*Rapid and Fast Urban Development and Growth*). Pertumbuhan kota yang pesat seiring dengan jumlah penduduk yang bertambah cepat, memerlukan tersedianya tata ruang perkotaan (*Urban Space*) yang cukup dan bertambah semakin luas (Adisasmita, 2014).

Sebagai suatu kota, perwujudan 'kota lama' kota yang sudah tumbuh dan berkembang dengan 'kota baru' kota yang direncanakan dan dibangun baru secara utuh dan lengkap pada hakekatnya sama saja. Keduanya mempunyai batasan dan perwatakan yang sama (Von Herten, Spreiregen, 1978). Namun demikian, sejak awal dikembangkannya kota baru, maka dari segi istilah, kriteria, pola kehidupan serta dampak sosial-budaya, sosial-ekonomi dan fisiografis, kota baru ditampilkan sebagai wujud tersendiri yang mempunyai pengertian, batasan serta perwatakan yang dibedakan dengan kota lama. Kenyataan itu dapat dibuktikan dengan luas dan berkembangnya wawasan serta sorotan terhadap masalah, tata laku dan peri kehidupan 'kota baru' sebagai wujud wadah kehidupan perkotaan yang sejak pemikiran pengembangannya, perencanaannya, pengisian dan perkembangannya kemudian mempunyai ciri-ciri tersendiri. Wawasan selanjutnya yang berkaitan erat dengan pertumbuhan kota-kota baru modern selalu dikaitkan dengan konsep pemikiran kota baru yang dikembangkan sejak dikenalnya filsafat perencanaan modern yang dimulai akhir abad ke 19, yaitu sejak dicetuskannya konsepsi 'Garden City' oleh Ebenezer Howard di Inggris (A.C. Duff, 1964). Sebagai suatu 'konsepsi', kota baru kemudian dianggap merupakan salah satu cara dalam

pemecahan masalah perumahan dan permukiman kota. Konsepsi dasar mengenai 'kota baru' yang pada awalnya dikembangkan di Inggris tersebut telah berkembang menjadi landasan pemikiran konseptual untuk memecahkan masalah perumahan dan permukiman kota di belahan bumi lainnya. Demikian spesifik dan tipikalnya perilaku 'kota baru' ini, sehingga pengertian, batasan dan perwataannya telah mengalami perkembangan yang tipikal untuk setiap negara. Berbagai literatur memberikan wawasan yang seolah bersifat 'khas' dari berbagai sudut pandang (Lloyd Rodwin, 1964, Jorge E. Hardoy, 1964: William A. Robson, 1964: Peter Hall, 1980).

Di Indonesia, konsepsi 'kota baru' juga dikenal meski relatif baru diperkenalkan sejak awal penerapan konsepsi perencanaan kota modern' sekitar awal abad ke 20. Penerapan konsepsi 'kota baru modern' yang nyata baru dimulai sekitar dekade 1950-an, seperti Kota Baru Kebayoran di sebelah selatan Jakarta atau kota Baru Banjarbaru di sebelah tenggara Banjarmasin atau Kota Baru Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Konsepsi 'kota baru' sampai saat ini telah mengalami perkembangan di negara kita, sebagai salah satu cara dalam mengupayakan pemecahan masalah perumahan dan permukiman kota (Repelita IV, 1983-1988). Pemikiran yang kelak akan menjadi dasar pengembangan pola 'kota baru' di Indonesia merupakan tantangan' yang sangat esensial. Untuk memperoleh rentang wawasan 'kota baru' maka pengenalan dan pemahaman tentang pengertian, batasan dan perwatakan 'kota baru' akan menjadi landasan dalam upaya pengembangan kota-kota baru di Indonesia.

1. Pengertian Umum Kota Baru

Pengertian yang selalu dikaitkan dengan kota baru adalah sebagaimana yang dikatakan Lloyd Rodwin berikut : Kota atau kota-kota yang direncanakan didirikan dan kemudian dikembangkan secara lengkap telah ada kota atau kota-kota lainnya yang telah tumbuh dan berkembang terlebih dahulu. Urban Land Institute, Amerika Serikat (Pei: Verma, 1972), memberikan definisi tentang Kota Baru sebagai Suatu proyek pengembangan lahan yang luasnya mampu menyediakan unsur-unsur lengkap yang mencakup perumahan, perdagangan dan industri yang secara keseluruhan dapat memberikan:

- a. Kesempatan untuk hidup dan bekerja di dalam lingkungan tersebut,
- b. Suatu spektrum jenis dan harga rumah yang lengkap,
- c. Ruang terbuka bagi kegiatan pasif dan aktif yang permanen serta ruang-ruang terbuka yang melindungi kawasan tempat tinggal dari dampak kegiatan industri,
- d. Pengendalian segi estetika yang kuat,
- e. Pengadaan biaya/investasi yang cukup besar untuk keperluan pembangunan awal.

Advisory Commission on Intergovernmental Relations memberikan pengertian tentang kota baru sebagai berikut (Pei: Verma, 1972): Permukiman yang mandiri dan berencana dengan skala yang cukup besar sehingga:

- a. Memungkinkan untuk menunjang kebutuhan berbagai atau jenis rumah tinggal dan kegiatan ekonomi sebagai lapangan kerja bagi penduduk didalam permukiman itu sendiri.
- b. Dikelilingi oleh jalur hijau yang menghubungkan secara langsung dari wilayah pertanian di sekitarnya dan juga sebagai pembatas perkembangan kota dari segi jumlah penduduk dan luas wilayahnya.
- c. Dengan mempertimbangkan kendala dan limitasi yang ada, dapat menentukan suatu proporsi peruntukan lahan yang sesuai untuk kegiatan industri: perdagangan: perumahan: fasilitas dan utilitas umum serta ruang terbuka, pada proses perencanaannya.
- d. Dengan mempertimbangkan fungsi kota serta lahan yang tersedia dapat ditentukan pola kepadatan penduduk yang serasi.

Berdasarkan masa perencanaan dan pengembangannya, Osborn dan Whittick memberikan batasan dan pengertian, bahwa kota baru di Inggris dan di negara lainnya, umumnya adalah kota-kota yang direncanakan dan dibangun sejak awal abad ke-20, yaitu sejak masa pasca revolusi industri. Osborn dan Whittick menekankan, bahwa kota baru sebenarnya merupakan alternatif upaya untuk memecahkan dan mengatasi masalah pertumbuhan permukiman tersebar yang tidak terkendali dan kemacetan kota-kota besar, karena semakin berkembangnya kegiatan usaha dan penduduk kota besar akibat perkembangan industri secara besar-besaran pada awal abad ke-20 (EKJ. Osborn: A. Whittick, 1968). Batasan yang sama, yaitu berdasarkan kurun waktu ini, juga dipakai landasan oleh beberapa pakar (Lloyd Rodwin, 1965: Athens Teknologi

Institute, 1964) untuk memberikan pengertian mengenai kota baru. Von Herten dan Spreiregen yang lebih menekankan dari segi letak geografisnya memberikan pengertian kota baru sebagai kota yang direncanakan, didirikan dan dibangun di atas lahan perawan yang terlepas sampai jarak tertentu yang jelas dari kota induk yang lebih besar. Bertolak dari tinjauan fungsional, Golany menekankan pengertian kota baru sebagai kota-kota khusus yang dikembangkan sehubungan dengan upaya pengembangan fungsi tertentu, seperti kota perusahaan industri, kota perusahaan pertambangan, kota perusahaan perkebunan (estate), kota penunjang instalasi tertentu seperti instalasi militer, instalasi perkebunan atau instalasi pusat ketenagaan. Dalam wawasan yang lebih luas, dikemukakan pula suatu pengertian, bahwa kota baru tidak selalu dibangun sama sekali baru di atas lahan perawan, tetapi juga mungkin merupakan pengembangan dan pembaharuan permukiman pedesaan atau kota kecil secara total menjadi kota lengkap yang mandiri (Golany, 1978).

Secara umum kota baru dapat diartikan sebagai:

- a. Kota baru adalah kota yang direncanakan, dibangun dan dikembangkan pada saat suatu atau beberapa kota lainnya yang direncanakan dan dibangun sebelumnya telah tumbuh dan berkembang.
- b. Kota lengkap yang ditentukan, direncanakan, dibangun dan dikembangkan di wilayah yang belum terdapat konsentrasi penduduk.
- c. Kota lengkap yang direncanakan dan dibangun dalam rangka meningkatkan kemampuan dan fungsi permukiman atau kota kecil yang telah ada di sekitar

kota induk untuk membantu pengembangan wilayah sekitar kota atau mengurangi beban kota induk.

- d. Kota yang cukup mampu untuk berfungsi sebagai kota yang mandiri, dalam arti dapat memenuhi kebutuhan pelayanan serta kegiatan usahanya sendiri atau sebagian besar dari penduduknya.
- e. Kota baru juga dapat berupa suatu 'ing- kungan permukiman berskala besar yang direncanakan dan dibangun untuk mengatasi masalah kekurangan perumahan di kota be- sar. Secara fungsional, kota baru demikian masih banyak tergantung pada peran dan fungsi kota induknya. Dari segi jarak, loka- sinya berdekatan dengan kota induknya. Ko- ta baru ini dikatakan juga sebagai kota sa- telit dari kota induk tersebut.

2. Perkembangan Kota Baru

Studi literatur juga menunjukkan, bahwa bentuk, fungsi dan penampilan kota baru yang di- kembangkan kemudian pada masa tertentu me- rupakan upaya perbaikan dan pengembangan kota baru pada masa sebelumnya. Antara kota-kota baru yang direncanakan dan dikembangkan pada masa pra revolusi industri dengan masa sesudahnya terdapat perbedaan motivasi perencanaan dan pendirian yang cukup mendasar. Kota baru yang dikembangkan pada masa pra revolusi industri pada dasarnya dilandasi pertimbangan yang berkaitan dengan pertahanan wilayah kolonisasi atau yang baru dikuasai dan prestise kekuasaan. Kota-kota baru yang dikembangkan sejak masa revolusi industri melandaskan pada pertimbangan sebagai upaya untuk mengatasi masalah perkembangan kota besar yang semakin hebat karena tekanan penduduk dan

kegiatan usahanya. Jadi, usaha memecahkan masalah permukiman dan perumahan masih merupakan sasaran dan tujuan utama. Motivasi ini bahkan berkembang terus sampai saat ini (T.C. Peng: N.S. Verma, 1972).

Berlandaskan motivasi dan hakekat pengembangan dan perkembangan kota baru tersebut, maka beberapa literatur memberikan batasan bahwa kota-kota baru yang direncanakan dan dikembangkan sejak masa pasca revolusi industri dikategorikan sebagai kota baru kontemporer atau Contemporary New Towns. Jadi, evolusi perkembangan kota-kota baru menjadi cerminan dari keseluruhan rangkaian perkembangan kota baru itu. Karena rangkaian proses perkembangan yang berkaitan satu sama lain, maka tinjauan tentang evolusi perkembangan kota baru menjadi hal yang esensial dalam upaya mengungkapkan perilaku dan perwatakan kota baru untuk memperoleh wawasan pemikiran mengenai konsepsi kota baru, khususnya di Indonesia. Ada dua hal pokok yang perlu diungkapkan:

- a. Evolusi perkembangan kota baru dimaksudkan untuk dapat melacak dasar-dasar pertimbangan serta motivasi, mengapa kota baru menjadi salah satu upaya pemecahan masalah perkotaan. Dalam hubungan ini, uraian akan menyangkut kupasan diskriptif tentang hubungan masa pengembangan kota baru, landasan pertimbangan dan motivasi pengembangan serta dampak dari pengembangan kota baru tersebut. Dengan memfokuskan pada kota-kota baru yang dikembangkan sejak masa pasca industri, yakni kota-kota baru kontemporer, maka selanjutnya akan diidentifikasi batasan dan klasifikasi

kota baru dari segi letak geografis, ukuran penduduk serta fungsinya. Esensi uraian ini adalah untuk dapat mengungkapkan perwatakan umum kota baru.

- b. Evolusi perkembangan kota baru sangat ditentukan serta dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, perlu dikupas mengenai faktor-faktor yang berpengaruh dan menentukan perkembangan berbagai jenis kota baru, sehingga dapat dikenali landasan serta dasar keberadaannya (*raison d'etre*).

3. Faktor Perkembangan Kota Baru

Seperti telah diungkapkan pada uraian terdahulu, bahwa pengembangan dan perkembangan kotabaru berbagai kurun masa dilandasi berbagai motivasi yang berbeda. Perwujudan perkembangan kota-kota baru ini kemudian sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh berbagai faktor. Didalam tinjauan deskriptif di atas dapat diamati, bahwa faktor-faktor tersebut untuk berbagai negara juga akan berbeda. Namun secara umum, dari tinjauan tersebut dapat diidentifikasi, bahwa faktor-faktor yang berpengaruh dan menentukan pengembangan dan perkembangan kota baru mencakup faktor sosial dan ekonomi. Dua faktor sosial utama yang sangat berpengaruh dan menentukan pengembangan dan perkembangan kota baru umumnya adalah:

a. Faktor Kependudukan Revolusi

Industri yang terjadi pada akhir abad ke-19 dan disusul dengan dampaknya pada awal abad ke-20 telah menyebabkan arus urbanisasi dari pedesaan ke kota-kota. Kesempatan kerja yang makin meningkat sehubungan dengan industrialisasi besar-besaran telah menyebabkan semakin meningkatnya penduduk kota-kota industri (Lesley E. White,

1965). Perkembangan penduduk kota besar yang semula telah menarik mereka karena terbukanya kesempatan kerja telah mengalami berbagai degradasi. Keadaan inilah yang memacu timbulnya berbagai reaksi dan arah pemikiran baru untuk mencari pemecahannya. Kalau kita amati keadaan kependudukan tersebut, maka sampai kini tampaknya masih merupakan faktor berpengaruh dan menentukan dalam permasalahan perkotaan, khususnya masalah pembangunan kota baru.

b. Kualitas Kehidupan Bermasyarakat

Makin padat penduduk kota industri, makin menurun pola kemasyarakatan karena lingkungan kehidupan yang mengutamakan efisiensi ekonomis, telah menimbulkan berbagai degradasi sosial. Keadaan di kota industri pada masa pasca revolusi industri mengalami penurunan dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi dan hubungan antarpenduduk. Keadaan demikian dikemukakan para reformis kemasyarakatan, antara lain Ebenezer Howard sebagai keadaan lingkungan yang 'tidak manusiawi'. Situasi sosial ini kemudian menjadi salah satu pertimbangan sangat penting dalam pengembangan konsep-konsep dasar kota baru (Sujarto, 1993).

B. Kota Induk

Pusat kota pada umumnya merupakan pusat kegiatan ekonomi (perdagangan dan industri) pusat pemerintahan maupun pusat kegiatan budaya dan pariwisata. Dengan adanya peningkatan ekonomi saat ini mengakibatkan pusat-pusat kota tersebut menjadi sasaran investasi atau penanaman modal

masyarakat baik dalam skala besar maupun kecil (sektor informal). Dengan didukung oleh kebijakan ekonomi suatu daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini menyebabkan perkembangan kegiatan di pusat kota berjalan sangat pesat (Siti Nursyamsiyah, M. Thoha B Sampurna Jaya, Samsul Bakri, 2015).

Dengan adanya daya tarik pusat kota ini akan menyebabkan tingginya arus urbanisasi yang berakibat pada pertambahan jumlah penduduk kota. Menurut Bintarto, percepatan urbanisasi di Indonesia tergantung dari beberapa faktor, yaitu:

1. Tingkat pendidikan penduduk yang terlibat
2. Tingkat kesehatan masyarakat
3. Persentase penduduk miskin
4. Latar belakang pertanian di daerah pedesaan
5. Kondisi geografis
6. Fungsi serta peranan kota-kota sebagai faktor penarik dan masih ada faktor-faktor lain.

Teori-teori yang melandasi struktur ruang kota yang paling dikenal yaitu:

1. Teori Konsentris, yang menyatakan bahwa Daerah Pusat Kota (DPK) atau Central Bussiness District (CBD) adalah pusat kota yang letaknya tepat di tengah kota dan berbentuk bundar yang merupakan pusat kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik, serta merupakan zona dengan derajat aksesibilitas tinggi dalam suatu kota. DPK atau CBD tersebut terbagi atas dua bagian, yaitu: pertama, bagian paling inti atau Retail Business District (RBD)

dengan kegiatan dominan pertokoan, perkantoran dan jasa; kedua, bagian di luarnya atau *Wholesale Business District* (WBD) yang ditempati oleh bangunan dengan peruntukan kegiatan ekonomi skala besar, seperti pasar, pergudangan (*warehouse*), dan gedung penyimpanan barang supaya tahan lama (*storage buildings*) (Burgess, 1925).

2. Teori Sektoral, menyatakan bahwa DPK atau CBD memiliki pengertian yang sama dengan yang diungkapkan oleh Teori Konsentris (Hoyt, 1939).
3. Teori Pusat Berganda, menyatakan bahwa DPK atau CBD adalah pusat kota yang letaknya relatif di tengah-tengah sel-sel lainnya dan berfungsi sebagai salah satu “*growing points*”. Zona ini menampung sebagian besar kegiatan kota, berupa pusat fasilitas transportasi dan di dalamnya terdapat distrik spesialisasi pelayanan, seperti “*retailing*” distrik khusus perbankan, teater dan lain-lain (Harris dan Ullman, 1945). Namun, ada perbedaan dengan dua teori yang disebutkan di atas, yaitu bahwa pada Teori Pusat Berganda terdapat banyak DPK atau CBD dan letaknya tidak persis di tengah kota dan tidak selalu berbentuk bundar.

Teori lainnya yang mendasari struktur ruang kota adalah Teori Ketinggian Bangunan, Teori Konsektoral dan Teori Historis. Dikaitkan dengan perkembangan DPK atau CBD, maka berikut ini adalah penjelasan masing-masing teori mengenai pandangannya terhadap DPK atau CBD. Teori Ketinggian Bangunan (Bergel, 1955). Teori ini menyatakan bahwa perkembangan struktur kota dapat dilihat dari variabel ketinggian bangunan. DPK atau CBD secara garis besar merupakan daerah dengan harga lahan yang tinggi, aksesibilitas sangat

tinggi dan ada kecenderungan membangun struktur perkotaan secara vertikal. Dalam hal ini, maka di DPK atau CBD paling sesuai dengan kegiatan perdagangan, karena semakin tinggi aksesibilitas suatu ruang maka ruang tersebut akan ditempati oleh fungsi yang paling kuat ekonominya (Fahmi, 2009).

Teori Konsektoral dilandasi oleh struktur ruang kota di Amerika Latin. Dalam teori ini disebutkan bahwa DPK atau CBD merupakan tempat utama dari perdagangan, hiburan dan lapangan pekerjaan. Di daerah ini terjadi proses perubahan yang cepat sehingga mengancam nilai historis dari daerah tersebut. Pada daerah-daerah yang berbatasan dengan DPK atau CBD di kota-kota Amerika Latin masih banyak tempat yang digunakan untuk kegiatan ekonomi, antara lain pasar lokal, daerah-daerah pertokoan untuk golongan ekonomi lemah dan sebagian lain dipergunakan untuk tempat tinggal sementara para imigran (Fahmi, 2009).

Teori Historis. DPK atau CBD dalam teori ini merupakan pusat segala fasilitas kota dan merupakan daerah dengan daya tarik tersendiri dan aksesibilitas yang tinggi. Jadi, dari teori-teori tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa DPK atau CBD merupakan pusat segala aktivitas kota dan lokasi yang strategis untuk kegiatan perdagangan skala kota (Fahmi, 2009).

C. Pembukaan Kawasan atau Lahan Baru

Pertambahan penduduk dunia antara lain berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan lahan, baik untuk permukiman beserta sarana dan prasarannya, maupun untuk lahan produksi pangan dan lainnya. Sementara itu luas lahan sendiri bukannya bertambah namun cenderung berkurang, sebagaimana diulas

oleh Pandey (1980) bahwa berdasarkan laporan UNEP berjudul “*State of World Environment Report*” diketahui bahwa pada tahun 1977 total lahan pertanian di dunia sekitar 1,24 milyar ha dengan 4 milyar jiwa penduduk dunia, atau rata-rata 0,31 ha per orang. Pada tahun 2000 luasan lahan tersebut diperkirakan turun menjadi 940 juta ha dengan jumlah penduduk dunia sekitar 6,25 milyar jiwa, sehingga areal pertanian per orang hanya 0,15 ha pada tahun tersebut (Onrizal, 2005).

Salah satu strategi untuk memenuhi kebutuhan akan lahan yang terus bertambah tersebut adalah dengan membuka lahan-lahan baru. Oleh karena jumlah penduduk terus bertambah, maka kegiatan pembukaan lahan (*land clearing*) telah terjadi dan akan terus terjadi sepanjang kehidupan manusia di bumi dan baru berhenti setelah tidak ada lahan lagi yang akan dibuka (Onrizal, 2005).

Berbagai metode pembukaan lahan telah dipraktekkan. Teknik tebang dan bakar (*slash and burn*) merupakan metode yang umum dan telah lama diaplikasikan dalam pembukaan lahan (Van Noordwijk, 2001). Alasan utama penggunaan teknik slash-and-burn karena dianggap lebih murah, cepat dan praktis dibandingkan dengan teknik tanpa bakar. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumberdaya alam dan kegiatan pembangunan tanpa merusak lingkungan pada beberapa dekade terakhir, serta isu penurunan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan yang semakin cepat dan pencemaran asap di udara dikaitkan dengan pembakaran dalam kegiatan pembukaan lahan, maka berbagai upaya dilakukan baik dalam skala nasional

maupun internasional, untuk mencari metode alternatif pembukaan lahan yang lebih baik (Onrizal, 2005).

Persiapan dan pembukaan lahan merupakan kegiatan fisik awal terhadap areal yang digunakan sebagai pertanaman. Dalam pembukaan lahan harus diperhatikan situasi dan kondisi areal yang akan dibuka, agar tujuan kegiatan ini tidak menyimpang yaitu mengacu pada standar yang berlaku, tepat waktu, biaya yang seefisien mungkin. Dalam pengukuran lahan yang akan dibuka, yang harus diperhatikan adalah menentukan titik awal, bila perlu gunakan tanda-tanda yang mudah dikenal dan permanen. Dari pengukuran dan pengambilan data yang dilakukan maka kita bisa mengetahui bahwa lokasi lahan tersebut merupakan areal datar, areal bukit atau areal rawa (Lukman, 2000).

Pembukaan lahan merupakan pembersihan lahan dari segala macam bentuk tanaman yang dapat mengganggu tanaman yang di usahakan, baik secara manual, mekanik maupun secara khemis. Persiapan tanah untuk menciptakan keadaan tempat tubuh yang optimal bagi pertumbuhan tanaman sangat perlu diperhatikan, oleh karena itu pertumbuhan yang optimal suatu jenis tanaman tergantung dari lingkungan fisiknya. Dalam hal ini usaha yang bisa merubah sifat fisik tanah merupakan tempat tumbuh tanaman, tempat cadangan unsur – unsur hara dan air adalah pengolahan tanah (Widia, 2008).

Lahan merupakan bagian dari bentang lahan (*Landscape*) yang meliputi lingkungan fisik termasuk iklim, topografi / relief, hidrologi tanah dan keadaan vegetasi alami yang semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan atau areal tanah yang ingin ditanami oleh tanaman yang

diinginkan untuk dibudidayakan untuk mendapatkan hasil produksi yang dapat dimanfaatkan manusia sebagai sumber energi bagi manusia di muka bumi ini (Anonimus, 2003).

Pembukaan lahan (*land clearing*) sebagai tahap awal penyiapan lahan dapat dilakukan dengan dua cara utama yaitu dengan cara manual membat dan membakar (*slash and burn*). Sebelum melakukan pembukaan lahan terlebih dahulu dilakukan identifikasi vegetasi yang ada pada lahan tersebut. Dari data yang ada maka dapat ditentukan apakah pembukaan lahan dilakukan secara manual, manual-mekanis atau secara mekanis saja (Mustafa, 2000).

D. Perubahan Pemanfaatan Lahan

Kota sebagai pusat kegiatan aktivitas ekonomi selalu mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Akibat perkembangan kota tersebut, banyak sekali perubahan yang terjadi, seperti perubahan penggunaan lahan dan perubahan-perubahan yang terkait sosial ekonomi, seperti jumlah penduduk, fasilitas dan pelayanan sosial, pendapatan, migrasi dan lain sebagainya. Selain itu juga menyebabkan adanya tingkat perkembangan sosial ekonomi dan demografi peri-urban. Akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi terkait perkembangan kota, banyak sekali dampak-dampak negatif yang ditimbulkan. Selain dampak yang pasti terasa seperti semakin padatnya penduduk kota, masalah-masalah lain seperti pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas perkotaan, yang akan menghambat perkembangan kota itu sendiri juga turut menjadi dampak dari perkembangan kota. Hal inilah yang menjadi dasar dari pentingnya kajian lebih

mendalam tentang pengembangan kota dan kawasan di dalamnya (Ana Fitria Wahidah dan Sri Rum Giyarsih, 2013, dalam Yunus, 2002; 93).

Wilayah sebagai “*living systems*” merefleksikan adanya keterkaitan antara pembangunan dan lingkungan. Dengan demikian, perubahan dalam ruang wilayah akan menyebabkan perubahan pada kualitas lingkungan baik positif maupun negatif. Padahal lingkungan hidup secara alamiah memiliki daya dukung yang terbatas (*carrying capacity*). Oleh karena itu perlu adanya inisiatif untuk mengintegrasikan komponen lingkungan dalam aspek pembangunan. Pembangunan adalah optimasi, interdependensi dan interaksi antara komponen pembangunan, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, tata nilai masyarakat, dan teknologi untuk meningkatkan kualitas dasar. Dalam kenyataannya, pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tuntutan kebutuhan manusia menyebabkan manusia mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kemampuan daya dukungnya, akibatnya terjadi penurunan kualitas lingkungan. Disamping itu kerusakan juga merupakan akibat dari sistem pengaturan penggunaan sumber daya alam yang belum memadai (Muta’ali, 2012).

UU RI No 4 Tahun 1992 menyebutkan bahwa lahan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup yang berada di luar kawasan hutan lindung. Kawasan-kawasan tersebut dapat berupa kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan. Permukiman berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan pendukung perikehidupan dan sumber kehidupan.

Menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan

ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Selanjutnya sesuai Kepmen-Kimpraswil No. 327/KPTS/2002 tentang penetapan enam pedoman dalam melakukan penataan ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah wadah yang meliputi daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk hidup lainnya dan melakukan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

Sebagai sebuah kesatuan wilayah, langkah pertama dalam penataan ruang dan wilayah adalah melakukan analisis dan identifikasi terhadap berbagai karakteristik dari ruang dan wilayah tersebut. Hal tersebut untuk menjamin sebuah kawasan yang arah pembangunannya tetap berorientasi lingkungan, penataan yang konstruktif dan terencana hingga analisis perkembangan wilayah untuk jangka panjang.

Pendapat tersebut menyiratkan bahwa ketika sebuah kawasan baik itu hutan atau non hutan kemudian berubah menjadi kawasan pemukiman, maka wilayah tersebut akan didominasi oleh bangunan-bangunan dan tempat bermukim manusia dalam skala besar jika alih fungsi lahan tersebut membentuk sebuah kawasan perkotaan. Wacana pembentukan kawasan Ibu Kota negara secara otomatis akan membentuk pola tata ruang yang menjadikan kawasan pemukiman dan perkantoran dalam ukuran yang luas. Hal tersebut untuk mengakomodir fasilitas pemerintahan seperti kawasan perkantoran, kawasan pemukiman bagi para pegawai, kawasan perekonomian, kawasan industri, kawasan olahraga dan hijau serta fasilitas-fasilitas lainnya (Toun, 2018).

Sistem pemanfaatan ruang pada dasarnya mengandung dua komponen utama yaitu komponen penyedia ruang (*supply*) dan komponen pengguna ruang (*demand*). Komponen penyedia ruang meliputi potensi sumberdaya alam dan fisik binaan, sedangkan komponen pengguna ruang meliputi penduduk dengan aktivitasnya, baik aktivitas produksi maupun konsumsi. Bentuk tata ruang yang terjadi adalah hasil interaksi komponen *supply* dan komponen *demand*, berupa tipe-tipe dan perbedaan struktur, sebaran, dan bentuk fisik ruang yang terjadi. Imbangan antara tingkat pemanfaatan sumberdaya lahan dan daya dukung dapat dijadikan ukuran kelayakan setiap program pembangunan. Sumberdaya (lahan) dipakai secara layak apabila daya dukung dimanfaatkan sepenuhnya (*optimal*). Dalam hal ini daya dukung tersebut tidak dimanfaatkan secara penuh, maka pembangunan tidak efektif. Sebaliknya apabila pemanfaatan sumberdaya alam (lahan) melampaui daya dukung, maka pembangunan menjadi tidak efisien dan cenderung menurunkan kualitas lingkungan. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam mensyaratkan diketahuinya kemampuan daya dukung lingkungan saat ini, melalui suatu analisis perlu diduga kapan dan seberapa jauh kemampuan daya dukung tersebut dapat ditingkatkan. Selain itu pemahaman tentang variasi kekurangan dan faktor determinan sangat membantu dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

E. Aglomerasi

Pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah akan didistribusikan secara geografis ke beberapa tempat, kecuali untuk beberapa jenis kegiatan produksi primer yang terkonsentrasi pada sumber bahan mentahnya. Kegiatan ekonomi yang

tidak merata sama intensitasnya ke seluruh bagian wilayah, tetapi terdapat kecenderungan terjadinya konsentrasi atau pemusatan kegiatan ekonomi pada beberapa atau sejumlah kecil tata ruang tertentu. Faktor-faktor yang menentukan konsentrasi atau pemusatan pertumbuhan tata ruang wilayah secara regional harus diidentifikasi. Demikian pula, kekuatan daya sebar dan daya tarik pembangunan harus dibahas secara spasial regional (tata ruang wilayah) (Adisasmita, 2012).

Pertumbuhan kota-kota ternyata meliputi berbagai faktor yang lebih kompleks dari pada sekadar penghematan aglomerasi. Teori ukuran kota yang optimal (*theories of optimum city size*) yang di kaji ulang oleh Fujita dan Thisse (1996) menggambarkan ekuilibrium konfigurasi spasial dari aktivitas ekonomi sebagai hasil tarik-menarik antara kekuatan sentripetal dengan sentrifugal. Kekuatan sentripetal (*centripetal forces*) yang ditunjukkan oleh penghematan aglomerasi adalah semua kekuatan yang menarik aktivitas ekonomi kedaerah perkotaan. Kekuatan sentrifugal (*centrifugal forces*) adalah kebalikan dari kekuatan sentripetal, yaitu kekuatan dispersi (Kuncoro, 2012).

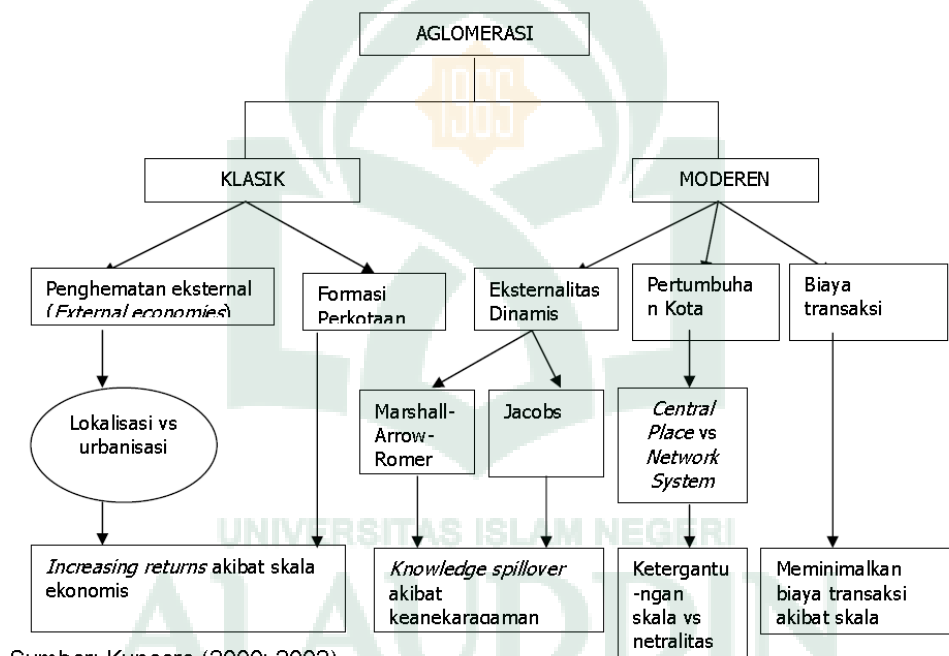
Montgomery mendefinisikan aglomerasi sebagai konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan karena “penghematan akibat lokasi yang berdekatan (*economies of proximity*) yang diasosiasikan dengan *kluster spasial* dari perusahaan, para pekerja, dan konsumen” (Montgomery, 1988). Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa suatu aglomerasi tidak lebih dari sekumpulan kluster industri. Namun, suatu kluster, superkluster di

Brasil, bahkan kumpulan kluster tidak dapat diidentikkan dengan suatu kota (Kuncoro, 2012).

Perkembangan konsep dan pemikiran mengenai aglomerasi dapat dirangkum dalam gambar 1 perkembangan konsep dan pemikiran mengenai aglomerasi.

Gambar 1. Perkembangan Konsep dan Pemikiran Mengenai Aglomerasi

(Kuncoro, 2012)



Sumber: Kuncoro (2000; 2002)

Dalam gambar diatas dijelaskan bahwa setiap studi atau teori mengenai aglomerasi dapat digolongkan dalam prespektif klasik atau modern (Kuncoro, 2002). Prespektif Klasik percaya bahwa aglomerasi merupakan suatu bentuk spasial dan diasosiasikan dengan konsep “penghematan akibat aglomerasi” (*economies of agglomeration*) melalui konsep eksternalitas. Sementara itu, para ahli ekonomi perkotaan mendefinisikan kota sebagai hasil dari produksi

aglomerasi secara spasial. Pada gilirannya, hal ini mendorong tumbuhnya literatur mengenai formasi perkotaan.

Perspektif modern menunjukkan beberapa kelemahan teori klasik mengenai aglomerasi. Pada konteks ini, tiga jalur pemikiran dapat diidentifikasi.

- a. Teori-teori baru mengenai eksternalitas dinamis (*dynamic externalities*);
- b. Mazhab pertumbuhan perkotaan;
- c. Paradigma berbasis biaya transaksi.

Dalam menjelaskan fenomena aglomerasi, banyak ekonom mendefinisikan kota sebagai dari proses produksi aglomerasi secara spasial. Khasanah studi perkotaan yang dilakukan secara intensif oleh para ekonom agaknya dapat diidentifikasi empat periode evolusi pemikiran (Quigley, 1998). Pada periode pertama, yaitu beberapa dasawarsa setelah Perang Dunia I, fokus analisis adalah faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi perusahaan dan rumah tangga dalam suatu kota. Pada periode kedua yang dimulai pada pertengahan dasawarsa 1960-an, kebanyakan studi memformalkan model mencoba menjelaskan daya tarik lokasi kawasan perkotaan. Periode ketiga muncul dari analisis yang intensif mengenai kota-kota utama di AS (misalnya *New York*), dan memperkenalkan konsep eksternalitas yang muncul akibat skala ekonomis. Saat ini, kita berada dalam pertengahan periode keempat dalam mencoba memahami perekonomian kota. Pada periode ini, kota digunakan untuk menganalisis hakikat dan sebab-sebab pertumbuhan ekonomi. Kebanyakan analisis aglomerasi mengasumsikan secara implisit bahwa formasi dan perkembangan kota dapat dipahami jika mekanisme

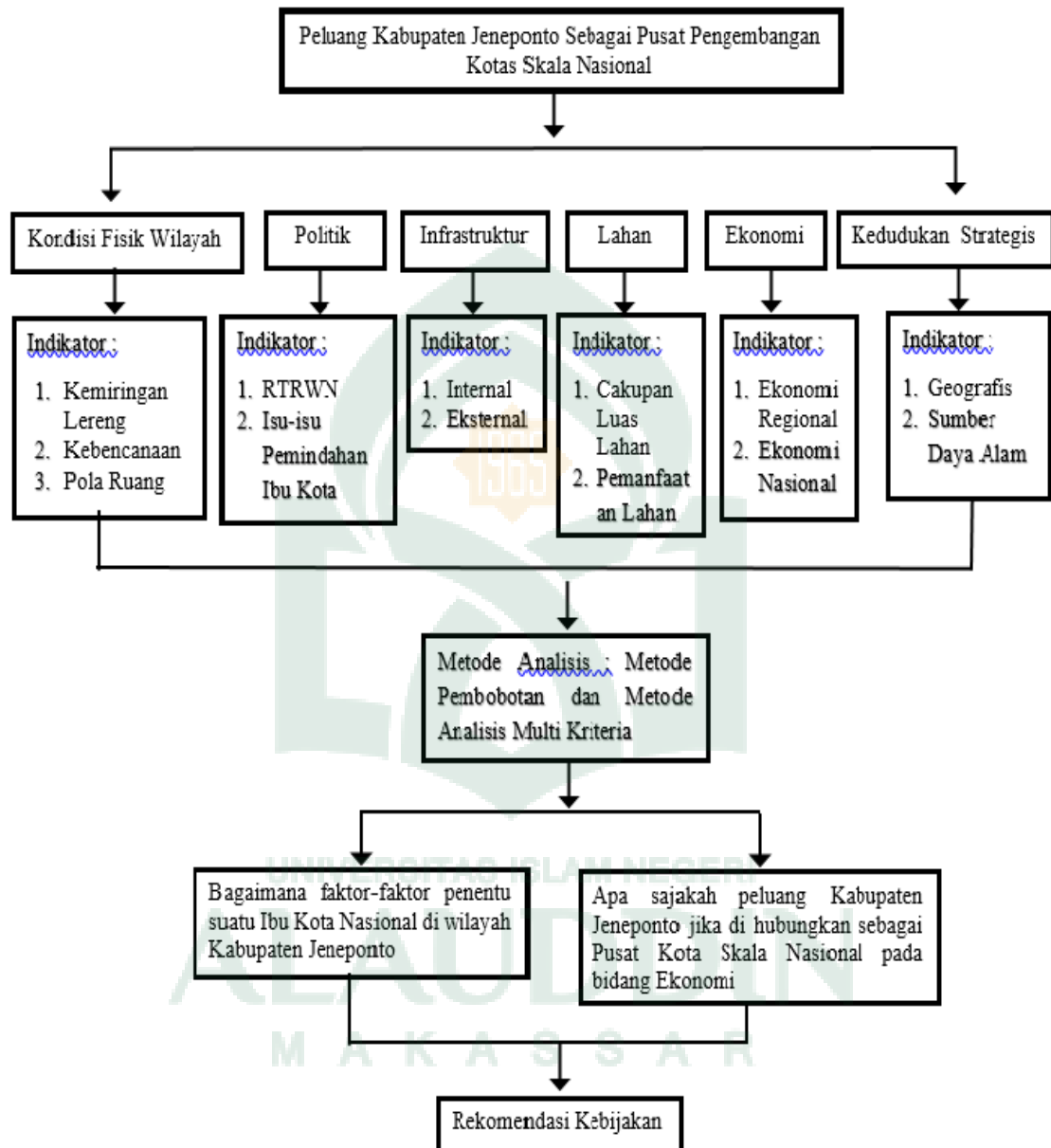
konsentrasi produksi secara spasial telah dimengerti dengan benar (Kuncoro, 2012).

Aglomerasi merupakan konsentrasi atau pemusatan kegiatan-kegiatan ekonomi pada suatu lokasi tertentu. Kekuatan aglomerasi terdiri dari besarnya pabrik atau industri yang efisien dan keuntungan-keuntungan eksternal. Kekuatan-kekuatan aglomerasi harus difahami sepenuhnya untuk menganalisis pertumbuhan tata ruang wilayah dan khususnya pertumbuhan daerah urban (perkotaan). Kekuatan-kekuatan tersebut dapat menjelaskan terjadinya konsentrasi atau pemusatan industri dan kegiatan-kegiatan lainnya. Keuntungan-keuntungan yang ditimbulkan oleh aglomerasi meliputi keuntungan skala (*economic scale*), keuntungan lokasi (*locational economies*), dan keuntungan aglomerasi (*agglomeration economies*) (Adisasmita, 1988 dalam Adisasmita, 2012).

Dalam konteks ekonomi geografi, konsep aglomerasi berkaitan dengan konsentrasi spasial dari penduduk dan kegiatan-kegiatan ekonomi (Malmberg dan Maskell, 2001). Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Montgomery dalam Kuncoro (2002) bahwa aglomerasi adalah konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan karena penghematan akibat lokasi yang berdekatan (*economies of proximity*) yang diasosiasikan dengan kluster spasial dari perusahaan, para pekerja dan konsumen. Pengertian ekonomi aglomerasi juga berkaitan dengan eksternalitas kedekatan geografis dari kegiatan-kegiatan ekonomi, bahwa ekonomi aglomerasi merupakan suatu bentuk dari eksternalitas positif dalam produksi yang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan kota. (Bradley and Gans, 1996).

F. Kerangka Pikir

Gambar 2. Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif-kualitatif yang di dalamnya mencakup penelitian survey, yakni penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini yang merupakan penelitian non matematis dengan proses menghasilkan data hasil temuan berupa pengamatan survey. Adapun penelitian kuantitatif dalam penelitian ini yakni jenis penelitian dengan menggunakan data tabulasi atau data angka sebagai bahan pembandingan maupun bahan rujukan dalam menganalisis secara deskriptif.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jeneponto. Adapun lokasi penelitian yang berpatokan terhadap batas administrasi ditampilkan lebih rinci pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Luas Area Kabupaten Jeneponto berdasarkan Kecamatan

| No | Kecamatan | Luas (km²) | Presentase (%) |
|--------------|------------------|------------------------------|-----------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| 1 | Bangkala | 121,82 | 16,25 |
| 2 | Bangkala Barat | 152,96 | 20,40 |
| 3 | Tamalatea | 57,58 | 7,68 |
| 4 | Bontoramba | 88,30 | 11,78 |
| 5 | Binamu | 69,49 | 9,27 |
| 6 | Turatea | 53,76 | 7,17 |
| 7 | Batang | 33,04 | 4,41 |
| 8 | Arungkeke | 29,91 | 3,99 |
| 9 | Tarowang | 40,68 | 5,43 |
| 10 | Kelara | 43,95 | 5,86 |
| 11 | Rumbia | 58,30 | 7,78 |
| Total | | 749,79 | 100,00 |

Sumber: Kabupaten Jeneponto dalam Angka 2018

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan berdasarkan waktu kegiatan penelitian mulai dari penyusunan proposal, melakukan penelitian, melakukan survey lapangan, pengumpulan data dan hasil penelitian di lokasi. Waktu penelitian ini di mulai dari bulan Oktober tahun 2019 sampai bulan Februari tahun 2020.

C. *Jenis Dan Sumber Data*

1. Jenis Data

- a. Data Kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi karakteristik berwujud pernyataan atau berupa kata-kata. Data yang dimaksud berupa, deskripsi mengenai kondisi eksisting penggunaan lahan di Kabupaten Jeneponto.
- b. Data Kuantitatif adalah data yang berupa angka atau numerik yang bisa diolah dengan menggunakan metode perhitungan yang sederhana. Data ini berupa data penggunaan lahan, data topografi, data suseptibilitas bentuk lahan, frekuensi banjir, dan data kependudukan.

2. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui observasi lapangan atau pengamatan langsung objek penelitian. Jenis data yang dimaksud berupa penggunaan lahan eksisting.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh pada instansi terkait guna mengetahui data kuantitatif objek penelitian. Jenis data yang dimaksud berupa data penggunaan lahan, data perubahan lahan, data bentuk lahan, dan data kependudukan.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi Lapangan

Observasi yaitu pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Pemeran serta sebagai pengamat yang dimaksud adalah peneliti sebagai pengamat tidak sepenuhnya sebagai pemeran serta, tetapi masih melakukan fungsi pengamat. Dalam hal ini peneliti menjadi anggota pura-pura, dalam artian tidak melebur dalam arti yang sesungguhnya. Observasi ini memungkinkan peneliti melihat secara langsung kondisi objek penelitian serta memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui secara lebih mendalam.

Keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan teknik observasi yaitu peneliti dapat melihat kondisi riil lapangan dan dapat berhubungan langsung dengan kondisi tersebut. Manfaat dari teknik observasi berdasarkan dasar dasar metodologi penelitian (Nazir, 2003) yaitu sebagai berikut:

- a. Merupakan alat yang murah, mudah dan langsung untuk mengadakan penelitian terhadap berbagai fenomena yang terjadi.
- b. Banyak peristiwa penting yang tidak mungkin dapat diperoleh dengan cara menggunakan teknik kuesioner dan wawancara tetapi hal ini dapat dipeoleh dengan cara menggunakan teknik observasi atau pengamatan secara langsung.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan maksud mendengarkan tanggapan ataupun informasi – informasi penting tentang daerah atau wilayah penelitian dan mengajukan pertanyaan berdasarkan variabel-variabel yang telah disusun.

3. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yaitu salah satu teknik pengumpulan data informasi dengan cara membaca atau mengambil literatur laporan, bahan perkuliahan, dan sumber-sumber lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengambilan data sebagai bukti dari observasi lapangan yang telah dilakukan. Teknik ini berhubungan langsung dengan objek penelitian yang dapat ditangkap oleh indera penglihatan manusia. Teknik ini dilakukan dengan cara mengambil gambar, leaflet/brosur objek, dan dokumentasi foto.

E. Variabel Penelitian

Variable dimaksudkan sebagai faktor-faktor utama dari hasil identifikasi kesimpulan teoritis (Nasution, 1996). Variable dipakai untuk menerangkan pembuktian hipotesa suatu penelitian ditentukan berdasarkan kajian teori yang dipakai. Semakin sederhana suatu rancangan penelitian semakin sedikit variable penelitian yang digunakan. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Variabel Penelitian

| No | Variabel | Indikator |
|----|-----------------------|--|
| 1 | Kondisi Fisik Wilayah | 1. Kemiringan Lereng 2. Kebencanaan 3. Pola Ruang |
| 2 | Politik | 1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) 2. Isu-isu Pemindahan Ibu Kota |
| 3 | Infrastruktur | 1. Internal 2. Eksternal |
| 4 | Lahan | 1. Cakupan Luas Lahan 2. Pemanfaatan Lahan |
| 5 | Ekonomi | 1. Ekonomi Regional 2. Ekonomi Nasional |
| 6 | Kedudukan Strategis | 1. Geografis 2. Sumber Daya Alam |

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

1. Analisis Pembobotan

Analisis pembobotan ini merupakan metode analisis yang bersifat kuantitatif sehingga data yang digunakan harus bersifat kuantitatif. Oleh karena parameter yang digunakan harus bersifat kuantitatif, sedangkan pengolahan dan hasil yang didapat dari survei primer berupa data kualitatif, maka parameter tersebut harus dikonversikan ke dalam bentuk data kuantitatif. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka digunakan analisis pembobotan untuk mengkuantitatifkan parameter kinerja, sehingga data tersebut dikategorikan menjadi beberapa tingkatan dalam skala.

Karena adanya perbedaan jumlah skala yang dipergunakan, maka terlebih dahulu skala tersebut disamakan dengan menggunakan analisis skala

sikap Likert. Untuk analisis skala sikap Likert ini berdasarkan pada klasifikasi data yaitu dengan skala sikap, skor dan katagori.

Data yang terjaring melalui hasil wawancara, diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif-kuantitatif. Data yang terkumpul dilakukan dengan kategorisasi dengan skala Likert. Teori hubungan pertanyaan atau pernyataan yang berhubungan dengan beberapa variabel tersebut, diukur dengan menggunakan skala Likert.

Pengertian skala Likert menurut Sugiyono (2017) bahwa Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa skala Likert dapat digunakan untuk mengukur sikap seseorang dengan menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap subyek, objek atau kejadian tertentu untuk menunjukkan sejauh mana tingkat persetujuan terhadap pernyataan yang diajukan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah pertanyaan-pertanyaan berupa yang sudah tersesusun berdasarkan variable yang akan ditanyakan dalam bentuk wawancara pada responden yaitu masyarakat. Instrument ini terdiri dari beberapa item pertanyaan mengenai sumber daya yang tersedia, keadaan ekonomi dan sosial masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Kategorisasi Aspek Pendukung

| NO. | Skala Likert | Nilai Bobot |
|-----|-------------------|-------------|
| 1. | Berpeluang | 5 |
| 2. | Kurang Berpeluang | 3 |
| 3. | Tidak Berpeluang | 1 |

Sumber: Hasil Modifikasi Skala Likert, 2019

Keterangan Pembobotan:

Berpeluang : Apabila indikator yang dinilai dianggap dapat mendukung dalam pengembangan pusat kota skala nasional.

Kurang Berpeluang : Apabila indikator yang dinilai dianggap kurang mendukung dalam pengembangan pusat kota skala nasional.

Tidak Berpeluang : Apabila indikator yang dinilai dianggap tidak mendukung dalam pengembangan pusat kota skala nasional.

Metode pembobotan (faktor skoring) juga merupakan suatu teknik dalam menganalisis data dengan mengukur tiap indikator dengan menggunakan skala likert. Adapun pemberian bobot ini dimaksudkan untuk menganalisis peluang Kabupaten Jenepono sebagai pusat pengembangan pusat kota skala Nasional dengan kategori penilaian sebagai berikut:

- Berpeluang = 5 (Jika memiliki tingkat kesesuaian 75 % - 100 %)
- Kurang Berpeluang = 3 (Jika memiliki tingkat kesesuaian 50 % - 74 %)
- Tidak Berpeluang = 1 (Jika memiliki tingkat kesesuaian <50 %)

Dengan menggunakan skala penilaian maka akan didapatkan jumlah

nilai indikator, penilaian indikator, dan nilai bobot variabel (berdasarkan kriteria pada tabel) dari hasil penilaian tiap aspek/faktor dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah nilai indikator} = \text{bobot} \times \text{nilai indikator}$$

$$\text{Penilaian indikator} = \frac{\text{jumlah nilai indikator}}{\text{jumlah nilai indikator maksimal}} \times 100$$

$$\text{Nilai indikator} = \frac{\text{penilaian indikator} \times \text{bobot variabel}}{100}$$

2. Metode Multi Kriteria

Analisis Multi Kriteria adalah suatu metode pemilihan alternatif, dimana setiap alternatif akan dinilai menggunakan kriteria – kriteria tertentu sehingga kemudian alternatif yang terpilih adalah alternative dengan penilaian terbaik berdasarkan kriteria – kriteria tersebut. Analisis Multi Kriteria (AMK) menggunakan persepsi stakeholders terhadap kriteria-kriteria atau variabel-variabel yang dibandingkan dalam pengambilan keputusan. Analisis ini akan digunakan beberapa alternatif, dimana diharapkan bahwa rute terpilih secara optimal merupakan rute yang memberikan kontribusi bagi pengembangan wilayah, mudah diakses, efisien secara pembiayaan dan menimbulkan dampak negatif minimal bagi lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat. Kriteria yang digunakan dalam AMK diantaranya adalah: kemudahan pencapaian tujuan (*aksesibilitas*), aspek lingkungan, pengembangan wilayah, pengembangan sistem jaringan jalan, pemberdayaan masyarakat, analisis biaya pengembangan dan aspek keamanan.

Dasar Analisis Multi Kriteria adalah metode yang dikembangkan dan digunakan dalam masalah pengambilan keputusan dan dimaksudkan untuk bisa mengakomodasi aspek-aspek di luar kriteria ekonomi dan finansial serta juga bisa mengikut sertakan berbagai pihak yang terkait dengan suatu proyek secara komprehensif dan scientific (kuantitatif maupun kualitatif).

Analisis ini menggunakan persepsi stakeholders terhadap kriteria-kriteria atau variabelvariabel yang dibandingkan dalam pengambilan keputusan. AMK memiliki sejumlah kelebihan jika dibandingkan dengan proses pengambilan keputusan informal (*informal judgement*) yang saat ini umum digunakan.

Keuntungan tersebut antara lain:

- Proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka bagi semua pihak berkepentingan,
- Variabel dan kriteria analisis yang digunakan dapat lebih luas, baik yang kuantitatif maupun yang kualitatif,
- Pemilihan variabel tujuan dan kriteria terbuka untuk dianalisis dan diubah jika dianggap tidak sesuai,
- Nilai dan bobot ditentukan secara terbuka sesuai dengan persepsi pihak terkait yang dilibatkan (stakeholders),
- Memberikan arti lebih terhadap proses komunikasi dalam pengambilan keputusan, diantara para penentu kebijakan, dan dalam hal tertentu dengan masyarakat luas.

Adapun konsep yang dikembangkan dalam analisis multi kriteria adalah sebagai berikut:

- Analisis sudah mempertimbangkan semua variabel sekomprensif mungkin dengan tetap menjaga proses ilmiah dari proses pengambilan keputusan yang dilakukan.
- Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dan kepentingan pihak-pihak yang harus diakomodasi.
- Penetapan pilihan dilakukan dengan memperhatikan sejumlah tujuan dengan mengembangkan sejumlah kriteria yang terukur.
- Skoring adalah preferensi alternatif terhadap kriteria tertentu.
- Pembobotan adalah penilaian relatif antar kriteria.

G. *Defenisi Operasional*

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti.

Dalam definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati yang memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Definisi operasional variable penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya.

1. Kondisi Fisik Wilayah

a. Kemiringan Lereng

- 1) Apabila di atas 50% di wilayah tersebut memiliki Kemiringan Lereng di bawah 15% maka wilayah tersebut berpeluang dalam pembangunan.
- 2) Apabila di atas 50% di wilayah tersebut memiliki Kemiringan Lereng 15% – 40% maka wilayah tersebut kurang berpeluang dalam pembangunan.
- 3) Apabila di atas 50% di wilayah tersebut memiliki Kemiringan Lereng di atas 40% maka wilayah tersebut tidak berpeluang dalam pembangunan.

b. Kebencanaan

- 1) Apabila di wilayah tersebut tidak pernah mengalami bencana dalam kurung waktu 10 tahun maka wilayah tersebut sangat mendukung dalam pembangunan.
- 2) Apabila di wilayah tersebut pernah mengalami bencana dalam kurung waktu 5 tahun maka wilayah tersebut kurang mendukung dalam pembangunan.
- 3) Apabila di wilayah tersebut pernah mengalami bencana dalam waktu setiap tahunnya maka wilayah tersebut tidak mendukung dalam pembangunan.

c. Pola Ruang

1) Budidaya

- a) Apabila di bawah 50% luas lahan budidaya di kabupaten Jeneponto dari 749,79 km² luas wilayah Kabupaten Jeneponto maka berpeluang dalam Pembangunan.

- b) Apabila 50% luas lahan budidaya di kabupaten Jeneponto dari 749,79 km² luas wilayah Kabupaten Jeneponto maka kurang berpeluang dalam Pembangunan.
- c) Apabila di atas 50% luas lahan budidaya di kabupaten Jeneponto dari 749,79 km² luas wilayah Kabupaten Jeneponto maka tidak berpeluang dalam Pembangunan.

2) Lindung

- a) Apabila di bawah 50% luas lahan hutan lindung di kabupaten Jeneponto dari 749,79 km² luas wilayah Kabupaten Jeneponto maka sangat mendukung dalam Pembangunan.
- b) Apabila 50% luas lahan hutan lindung di kabupaten Jeneponto dari 749,79 km² luas wilayah Kabupaten Jeneponto maka kurang mendukung dalam Pembangunan.
- c) Apabila di atas 50% luas lahan hutan lindung di kabupaten Jeneponto dari 749,79 km² luas wilayah Kabupaten Jeneponto maka tidak mendukung dalam Pembangunan.

2. Politik

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

- 1) Apabila dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) tentang sarana dan prasarana dapat dikaitkan dengan Kabupaten Jeneponto maka berpeluang dalam pembangunan. Apabila dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

tentang sarana dan prasarana belum dapat dikaitkan dengan Kabupaten Jeneponto maka kurang berpeluang dalam pembangunan.

- 2) Apabila dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) tentang sarana dan prasarana tidak dapat dikaitkan dengan Kabupaten Jeneponto maka tidak berpeluang dalam pembangunan.

b. Isu-isu pemindahan ibu kota

- 1) Apabila Kabupaten Jeneponto dapat dikaitkan dengan mengenai isu-isu pemindahan Ibu Kota maka berpeluang dalam pembangunan.
- 2) Apabila Kabupaten Jeneponto belum dapat dikaitkan dengan mengenai isu-isu pemindahan Ibu Kota maka kurang berpeluang dalam pembangunan.
- 3) Apabila Kabupaten Jeneponto tidak termasuk dalam berbagai isu-isu pemindahan Ibu Kota maka tidak berpeluang dalam pembangunan.

3. Infrastruktur

a. Internal

- 1) Apabila wilayah kawasan ibu kota memiliki infrastruktur yang memadai dan berpeluang dalam pembangunan.
- 2) Apabila wilayah kawasan ibu kota kurang memiliki infrastruktur yang memadai maka kurang berpeluang dalam pembangunan.
- 3) Apabila wilayah kawasan ibu kota tidak adanya infrastruktur yang memadai maka tidak berpeluang dalam pembangunan.

b. Eksternal

- 1) Apabila wilayah pendukung kawasan ibu kota yang memiliki infrastruktur yang memadai maka berpeluang dalam pembangunan.
- 2) Apabila wilayah pendukung kawasan ibu kota kurang memiliki infrastruktur yang memadai maka kurang berpeluang dalam pembangunan.
- 3) Apabila tidak adanya wilayah pendukung maka tidak berpeluang dalam pembangunan.

4. Lahan

a. Cakupan Luas Lahan.

- 1) Apabila wilayah pembangunan pusat kota memiliki di bawah 50% luas lahan produktif maka berpeluang dalam pembangunan.
- 2) Apabila wilayah pembangunan pusat kota memiliki 50 % luas lahan produktif maka kurang berpeluang dalam pembangunan.
- 3) Apabila wilayah pembangunan pusat kota memiliki di atas 50% luas lahan produktif maka tidak berpeluang dalam pembangunan.

b. Pemanfaatan Lahan.

- 1) Apabila lahan di kawasan pembangunan pusat kota dapat di kembangkan menjadi lahan pembangunan maka wilayah tersebut sangat mencukupi.
- 2) Apabila lahan di kawasan pembangunan pusat kota kurang di kembangkan menjadi lahan pembangunan maka wilayah tersebut kurang mendukung.

- 3) Apabila lahan di kawasan pembangunan pusat kota tidak dapat dikembangkan menjadi lahan pembangunan maka wilayah tersebut tidak mendukung.

5. Ekonomi

a. Ekonomi Regional

- 1) Apabila di wilayah penelitian memiliki kecenderungan arah pergerakan aktivitas ekonominya meningkat maka berpeluang dalam pembangunan.
- 2) Apabila di wilayah penelitian memiliki arah pergerakan aktivitas ekonominya kurang meningkat maka kurang berpeluang dalam pembangunan.
- 3) Apabila di wilayah penelitian tidak memiliki arah pergerakan aktivitas ekonominya maka tidak berpeluang dalam pembangunan.

b. Ekonomi Nasional

- 1) Apabila wilayah pendukung kawasan Ibu Kota yang memiliki kecenderungan arah pergerakan aktivitas ekonominya meningkat maka berpeluang dalam pembangunan.
- 2) Apabila wilayah pendukung kawasan Ibu Kota yang memiliki kenderungan arah pergerakan ekonominya kurang meningkat maka kurang berpeluang dalam pembangunan.
- 3) Apabila wilayah pendukung kawasan Ibu Kota tidak memiliki arah pergerakan ekonominya maka tidak berpeluang dalam pembangunan.

6. Kedudukan Strategis

a. Geografis

- 1) Apabila lokasinya strategis dan sangat dekat dengan daerah pengembang, misalnya daerah yang memiliki infrastruktur yang memadai dan Sumber Daya Alam yang tersedia maka wilayah tersebut berpeluang dalam pembangunan
- 2) Apabila lokasinya kurang strategis dan jauh dengan daerah pengembang maka wilayah tersebut kurang berpeluang dalam pembangunan.
- 3) Apabila lokasi tidak strategis dan tidak terdapat daerah pengembang maka wilayah tersebut tidak berpeluang dalam pembangunan.

b. Sumber Daya Alam (SDA)

- 1) Apabila daerah tersebut memiliki sumber daya alam (SDA) yang sangat potensial dan prospektif berupa lahan pertanian yang luas dan subur maka wilayah tersebut berpeluang dalam pembangunan.
- 2) Apabila daerah tersebut memiliki sumber daya alam (SDA) yang kurang potensial dan prospektif maka wilayah tersebut kurang berpeluang dalam pembangunan.
- 3) Apabila daerah tersebut memiliki sumber daya alam (SDA) yang tidak berpotensi dan prospektif maka wilayah tersebut tidak berpeluang dalam pembangunan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

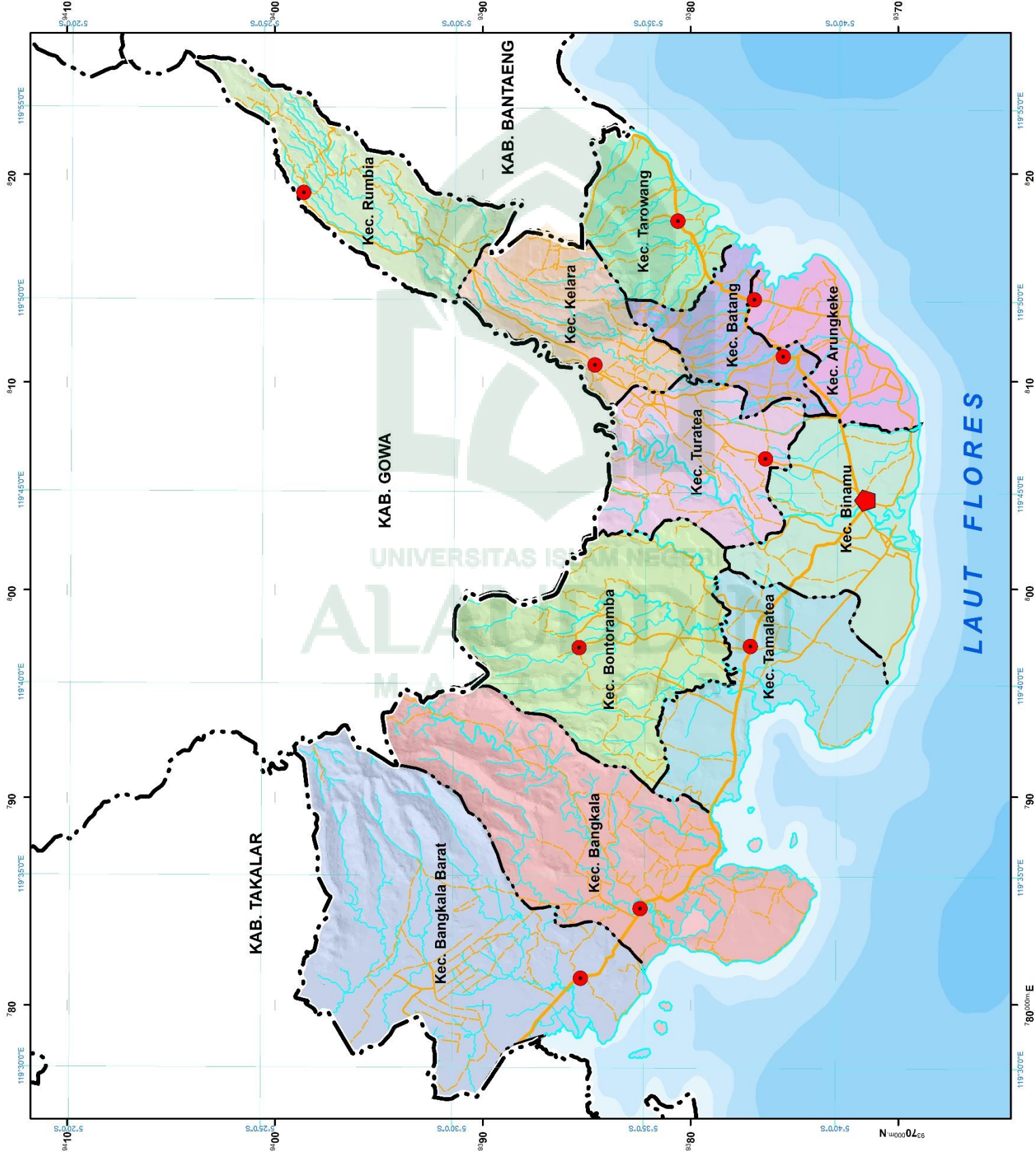
A. Tinjauan Umum Kabupaten Jeneponto

1. Letak Geografis dan Administrasi

Kabupaten Jeneponto adalah salah satu Kabupaten dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak kira-kira 106,3 Km di sebelah Selatan Kota Makassar (Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan). Kabupaten ini Terletak diantara 5°23'12" - 5°42'1,2" Lintang Selatan dan 119°29'12" - 119°56'44,9" Bujur Timur. Letak Kabupaten Jeneponto berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
- Sebelah Timur : Laut Flores
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bantaeng
- Sebelah Barat : Kabupaten Takalar

Wilayah Administrasi Kabupaten Jeneponto dengan luas 749,79 Km² terbagi dalam 11 kecamatan dan 113 desa/kelurahan (31 kelurahan dan 82 desa). Dari 11 kecamatan yang ada, Kecamatan Bangkala, Binamu, Bontoramba, Tamalatea, dan Rumbia merupakan lima kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak. Kecamatan Bangkala terdiri dari 10 desa dan 4 kelurahan, Kecamatan Binamu terdiri dari 1 desa dan 12 kelurahan, Kecamatan Bontoramba terdiri dari 11 desa dan 1 kelurahan, Kecamatan Tamalatea terdiri dari 6 desa dan 6 kelurahan, dan Kecamatan Rumbia terdiri dari 12 kelurahan, untuk lebih jelasnya lihat gambar 3 peta administrasi Kabupaten Jeneponto.



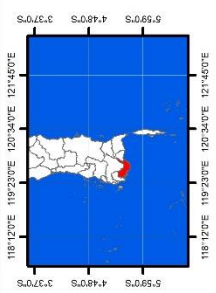
JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2019

TUGAS MATA KULIAH
TUGAS AKHIR

PETA ADMINISTRASI KABUPATEN JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Garis : Garis Geografi
Zona UTM : 50S



PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kabupaten Jeneponto

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Sungai
- Garis Pantai
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

KECAMATAN

- Kec. Arungkeke
- Kec. Bangkara
- Kec. Bangkara Barat
- Kec. Batang
- Kec. Bontoramba
- Kec. Kelara
- Kec. Rumbia
- Kec. Tamalatea
- Kec. Tarawang
- Kec. Turatea
- Kec. Binamu
- Kec. Bantaeng

NAMA DOSEN PEMBIMBING

- 1. NURSAMSIR ALI, S.T., M.Si
- 2. FADHIL SURUR, S.T., M.Si

NAMA MAHASISWA

MUH NURSAMSIR ALI
60800115061

SUMBER PETA

- 1. CITRA SATELIT 2019
- 2. RTRW KABUPATEN JENEPONTO 2011-2031

Tabel 4. Luas Wilayah dan Presentase Menurut Kecamatan Di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019

| No | Kecamatan | Luas Wilayah (km ²) | Persentase (%) |
|--------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Bangkala | 121,82 | 16,25 |
| 2 | Bangkala Barat | 152,96 | 20,40 |
| 3 | Tamalatea | 57,58 | 7,68 |
| 4 | Bontoramba | 88,30 | 11,78 |
| 5 | Binamu | 69,49 | 9,27 |
| 6 | Turatea | 53,76 | 7,17 |
| 7 | Batang | 33,04 | 4,41 |
| 8 | Arungkeke | 29,91 | 3,99 |
| 9 | Tarowang | 40,68 | 5,43 |
| 10 | Kelara | 43,95 | 5,86 |
| 11 | Rumbia | 58,30 | 7,78 |
| Total | | 749,79 | 100,00 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto Dalam Angka 2019

Berdasarkan tabel diatas secara keseluruhan Kabupaten Jeneponto memiliki luas 749,79 km², dengan Kecamatan terluas adalah di Kecamatan Bangkala Barat dengan luas 152,96 km² sedangkan Kecamatan dengan luasan terkecil adalah di Kecamatan Arungkeke dengan luas 29,91 km². Secara kependudukan Kabupaten Jeneponto merupakan daerah dengan laju pertumbuhan yang cukup pesat yaitu 296.125 Jiwa. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019

| No | Kecamatan | Penduduk (Jiwa) | Persentase (%) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²) |
|--------------|----------------|-----------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Bangkala | 54.425 | 15,04 | 446,77 |
| 2 | Bangkala Barat | 28.753 | 7,95 | 187,98 |
| 3 | Tamalatea | 41.976 | 11,60 | 729,00 |
| 4 | Bontoramba | 36.387 | 10,06 | 412,08 |
| 5 | Binamu | 56.543 | 15,63 | 813,69 |
| 6 | Turatea | 32.274 | 8,92 | 600,33 |
| 7 | Batang | 19.516 | 5,39 | 590,68 |
| 8 | Arungkeke | 18.539 | 5,12 | 619,83 |
| 9 | Tarowang | 22.708 | 6,28 | 558,21 |
| 10 | Kelara | 27.299 | 7,55 | 621,14 |
| 11 | Rumbia | 23.373 | 6,46 | 400,91 |
| Total | | 361.793 | 100 | 482,53 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto Dalam Angka 2019

Secara keseluruhan jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Binamu sebanyak 56.543 jiwa sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Arungkeke sebanyak 18.539 jiwa dan untuk kepadatan penduduk secara keseluruhan Kabupaten Jeneponto adalah 482,53 jiwa/Km² dengan kepadatan terpadat ada di Kecamatan Binamu sebanyak 813,69 jiwa/Km² dan kepadatan terendah ada di Kecamatan Bangkala Barat sebanyak 187,98 jiwa/Km². Jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto akan tumbuh seiring dengan perkembangan kota sebagai pusat perkembangan Garam.

2. Kondisi Pengguna Lahan

Penggunaan Lahan di Kabupaten Jeneponto meliputi jenis penggunaan lahan Permukiman dan tempat kegiatan, Persawahan, Perkebunan, Ladang,

Hutan Basah, Hutan Kering, Semak Belukar, Rawa, Tambak, dan lain-lainnya.


Untuk lebih Jelasnya dilihat pada Tabel 6 berikut :

Tabel 6. Jenis Penggunaan Lahan Kabupaten Jeneponto

| No | Jenis Penggunaan Lahan | Luas (km ²) | Persentase (%) |
|--------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | Permukiman dan Tempat Kegiatan | 26,31 | 3,48 |
| 2 | Persawahan | 249,89 | 33,33 |
| 3 | Perkebunan | 14,02 | 1,87 |
| 4 | Ladang | 366,14 | 48,83 |
| 5 | Hutan Basah | 0,36 | 0,05 |
| 6 | Hutan Kering | 57,13 | 7,62 |
| 7 | Semak Belukar | 59,41 | 7,92 |
| 8 | Rawa | 0,07 | 0,01 |
| 9 | Tambak | 19,41 | 2,59 |
| 10 | Lain-lainnya | 2,05 | 0,27 |
| Total | | 749,79 | 100 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jenis penggunaan lahan terbesar yakni lahan Ladang dengan luas 366,14 Km² dengan persentase 48,83% dari total luas wilayah Kabupaten Jeneponto sedangkan penggunaan lahan terkecil yakni rawa dengan luas 0,07 Km² dengan persentase 0,01%. Penggunaan lahan akan terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan dan peningkatan berbagai aktivitas manusia. Dapat dilihat peta gambar 4 peta penggunaan lahan Kabupaten Jeneponto.



JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2020

TUGAS MATA KULIAH

TUGAS AKHIR

PETA PENGGUNAAN LAHAN KABUPATEN JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

N

0 1.25 2.5 5 7.5 10
1:175.000

Proyeksi :
Sistem Grid :
Datum :
Zona UTM :
SRS :
118°12'0"E 119°23'0"E 120°34'0"E 121°45'0"E
5°59'0"S 4°48'0"S 3°37'0"S
118°12'0"E 119°23'0"E 120°34'0"E 121°45'0"E
5°59'0"S 4°48'0"S 3°37'0"S
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kabupaten Jeneponto

LEGENDA

--- Batas Kabupaten
--- Batas Kecamatan
--- Jalan Kolektor Primer
--- Jalan Lokal Primer
--- Jalan Lokal Sekunder
--- Sungai
--- Garis Pantai

Jenis Batuan

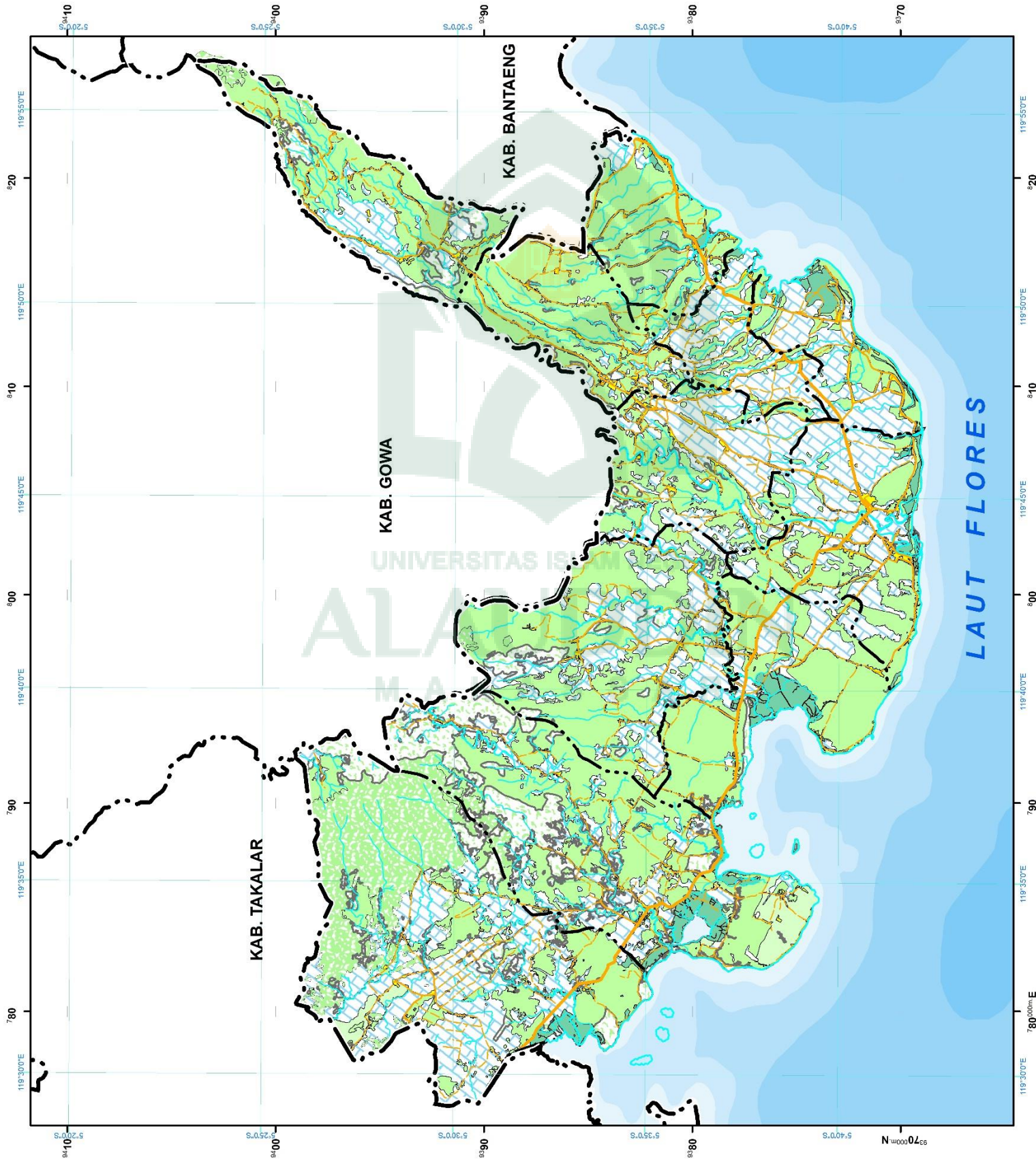
Danau
Hutan Basah
Hutan Kering
Kebun
Ladang
Permukiman dan Tempat Kegiatan

Rawa
Sawah
Semak Belukar
Tambak

NAMA DOSEN PEMBIMBING
1. NURSYAMAKSA, S.T., M.Si
2. FADHIL SURUR, S.T., M.Si

NAMA MAHASISWA
MUH NURSYAMSIR ALI
60800115061

SUMBER PETA
1. CITRA SATELIT 2019
2. RTRW KABUPATEN JENEPONTO 2011-2031



3. Aspek Fisik Dasar

a. Kondisi Topografi

Topografi adalah bentuk permukaan satuan lahan yang dikelompokkan atau ditentukan berdasarkan ketinggian dari permukaan bumi. Kondisi topografi Kabupaten Jeneponto pada bagian utara terdiri dari dataran tinggi dengan ketinggian 500 sampai dengan 1400 meter diatas permukaan air laut (mdpl) yang merupakan lereng pegunungan Gunung Baturape - Gunung Lompobattang. Sedangkan bagian tengah berada di ketinggian 100 sampai dengan 500 mdpl dan pada bagian selatan merupakan pesisir serta dataran rendah dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 100 mdpl. Karena perbatasan dengan Laut Flores maka Kabupaten Jeneponto memiliki pelabuhan cukup besar yang terletak di desa Bungeng. Berdasarkan klasifikasi jenis topografi yang relatif datar membuat kawasan penelitian ini layak untuk semua bentuk penggunaan lahan, baik itu untuk pertanian, perikanan, permukiman, industri, ataupun bentuk-bentuk penggunaan lahan yang lain.

b. Kemiringan Lereng

Kemiringan lereng merupakan kenampakan permukaan alam disebabkan adanya beda tinggi apabila beda tinggi dua tempat tersebut di bandingkan dengan jarak lurus mendatar sehingga akan diperoleh besarnya kelerengan.

Bentuk lereng bergantung pada proses erosi juga gerakan tanah dan pelapukan. Leeng merupakan parameter topografi yang terbagi dalam dua bagian yaitu kemiringan lereng dan beda tinggi relatif, dimana kedua

bagian tersebut besar pengaruhnya terhadap penilaian suatu bahan kritis. Ukuran kemiringan lahan relative terhadap bidang datar yang secara umum dinyatakan dalam persen atau derajat. Kondisi kelerengn yang ada di Kabupaten Jeneponto terbagi dalam 5 (Lima) kategori yaitu :

- Kemiringan lereng 0 – 2%, yang tersebar di kecamatan Arungkeke, Bangkala dan Bangkala Barat;
- Kemiringan lereng 2 – 8%, yang tersebar diseluruh Kecamatan kecuali Kecamatan Rumbia;
- Kemiringan lereng 9 – 15%, yang tersebar diseluruh Kecamatan kecuali Kecamatan Bangkala dan Rumbia;
- Kemiringan lereng 16 – 25%, yang tersebar diseluruh Kecamatan;
- Kemiringan lereng 41 – 60%, yang tersebar diseluruh Kecamatan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3. peta kemiringan lereng.

c. Curah Hujan

Curah hujan merupakan ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Satuan curah hujan selalu dinyatakan dalam satuan milimeter atau inchi namun untuk di indonesia satuan curah hujan yang digunakan adalah dalam satuan milimeter (mm). Curah hujan dalam 1 (satu) milimeter memiliki arti dalam luasan satu meter persegi pada tempat yang datar tertampung air setinggi satu milimeter atau tertampung air sebanyak satu liter.

Keadaan iklim Kabupaten Jeneponto adalah identik dengan keadaan iklim wilayah lain yang ada di Pulau Sulawesi secara keseluruhan, hal ini dapat dilihat pada temperatur udara maksimum 35°C dan suhu udara minimum 26°C dengan jumlah curah hujan terendah 1.116 mm/tahun dan tertinggi 3.973 mm/tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4 peta curah hujan.

d. Kondisi Hidrologi

Hidrologi merupakan kondisi seputar pergerakan air, distribusi air, dan kualitas air yang berada di suatu tempat. Air merupakan unsur pokok penting dalam kehidupan manusia. Pada umumnya kondisi hidrologi di Kabupaten Jeneponto sangat berkaitan dengan tipe iklim dan kondisi geologi yang ada. Kondisi hidrologi permukaan ditentukan oleh sungai-sungai yang ada yang pada umumnya berdebit kecil, oleh karena sempitnya daerah aliran sungai sebagai wilayah tangkapan air (catchment area) dan sistem sungainya.

Air tanah bebas (watertable groundwater) dijumpai pada endapan aluvial dan endapan pantai. Kedalaman air tanah sangat bervariasi yang tergantung pada keadaan dan jenis lapisan batuan.

Pada wilayah Kabupaten Jeneponto, sistem jaringan sumber daya air meliputi DAS Binanga Cikoang (2.085 Ha), DAS Binanga Lumbua (13.058 Ha), DAS Binanga Pangkajene (17.012 Ha), DAS Binanga Topa (5.130 Ha), DAS Binanga Papa (7.087 Ha), DAS Jeneponto (12.259 Ha)

serta DAS Tarowang (18.349 Ha). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7 dan gambar 7 peta hidrologi.


Tabel 7. Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Jeneponto

| No. | Nama DAS | Ha |
|-----|------------------------|--------|
| 1 | DAS Binanga Cikoang | 2.085 |
| 2 | DAS Binanga Lumbua | 13.058 |
| 3 | DAS Binanga Pangkajene | 17.012 |
| 4 | DAS Binanga Topa | 5.130 |
| 5 | DAS Binanga Papa | 7,087 |
| 6 | DAS Jeneponto | 12.259 |
| 7 | DAS Tarowang | 18.349 |

Sumber : Bappeda Kab. Jeneponto, 2013

e. Geologi

Kabupaten Jeneponto memiliki jenis batuan berupa Basal, Batu Sedimen Laut, Batuan Gunung Api, Kerikil, Pasir, Lempung, Lumpur, Breksi, Lava, Tufa, Perselingan Konglomerat dan Gampingan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan pondasi jalan. Hal ini sangat mendukung untuk pembangunan infrastruktur penunjang di lokasi penelitian. Maka pembangunan infrastruktur penunjang sangat mendukung dalam proses pembangunan pemerintahan yang ada di Kabupaten Jeneponto lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 8 peta Geologi.




JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2019

TUGAS MATA KULIAH

TUGAS AKHIR

PETA KEMIRINGAN LERENG KABUPATEN JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN


N



1:175.000

0 1.25 2.5 5 7.5 10 (km)

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Geografis
Zona UTM : 50S



118°12'0"E 119°23'0"E 120°34'0"E 121°45'0"E
5°59'0"S 4°48'0"S 5°06'0"S 5°24'0"S 5°42'0"S 5°59'0"S

PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kabupaten Jeneponto

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Sungai
- Garis Pantai

KEMIRINGAN LERENG

| | |
|--------------|------------------|
| Orange | Lereng < 2 % |
| Light Green | Lereng 2 - 8 % |
| Dark Green | Lereng 8 - 15 % |
| Light Blue | Lereng 15 - 25 % |
| Dark Blue | Lereng 25 - 40 % |
| Purple | Lereng 40 - 60 % |
| Light Purple | Lereng >60% |

NAMA DOSEN PEMBIMBING

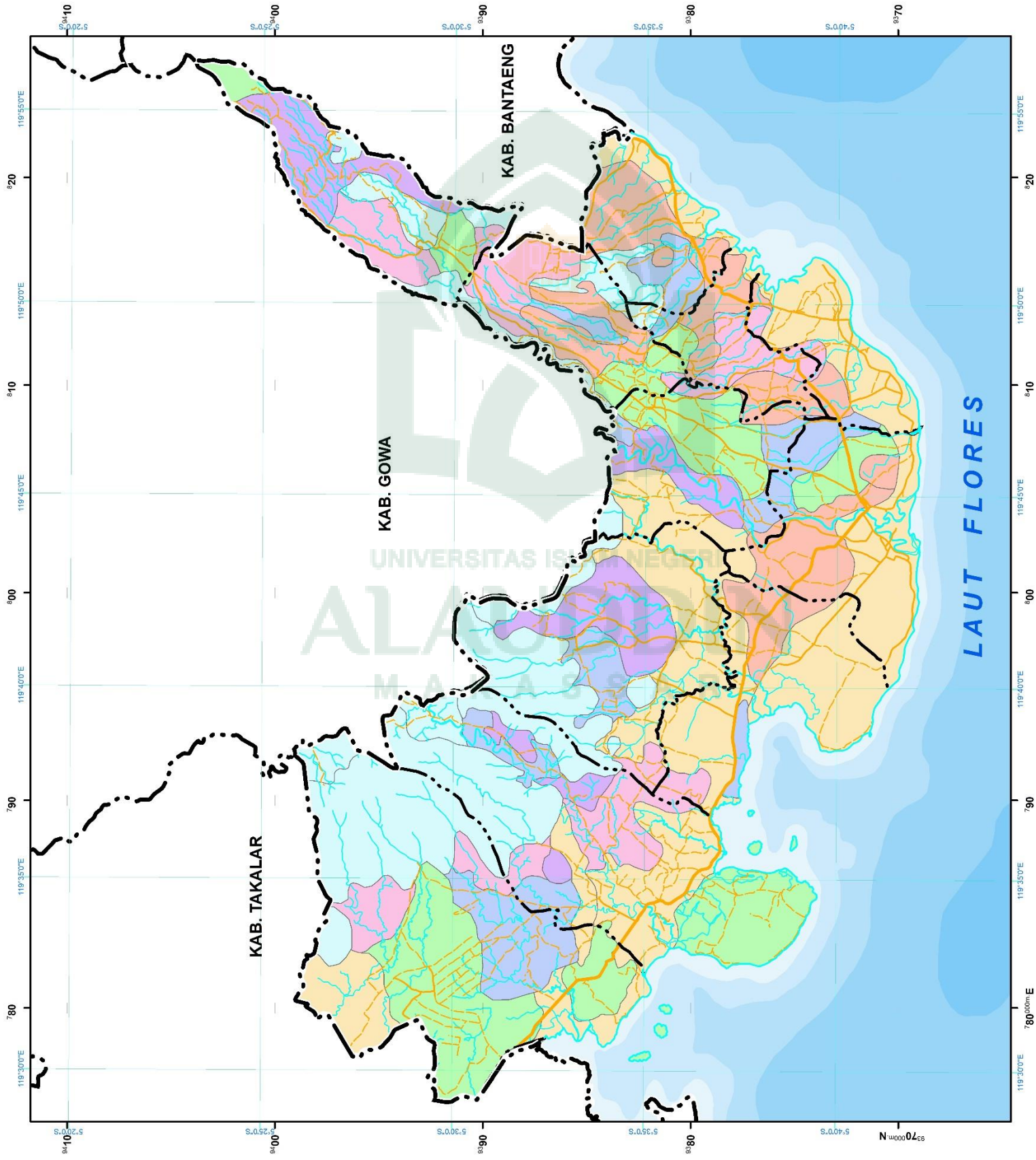
1. NURSYAMAKSA S.T., M.Si
2. FADHIL SURUR, S.T., M.Si


NAMA MAHASISWA

MUH NURSAMSIR ALI
60800115061

SUMBER PETA

1. CITRA SATELIT 2019
2. RTRW KABUPATEN JENEPONTO 2011-2031





JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2019

TUGAS MATA KULIAH

TUGAS AKHIR


PETA IKLIM KABUPATEN JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

0 1.25 2.5 5 7.5 10
KM

1:175.000

N

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Garis : Garis Geografis
Zona UTM : 50S



118°12'0"E 119°23'0"E 120°34'0"E 121°45'0"E
5°59'0"S 4°48'0"S 3°37'0"S

PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kabupaten Jeneponto

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Sungai
- Garis Pantai

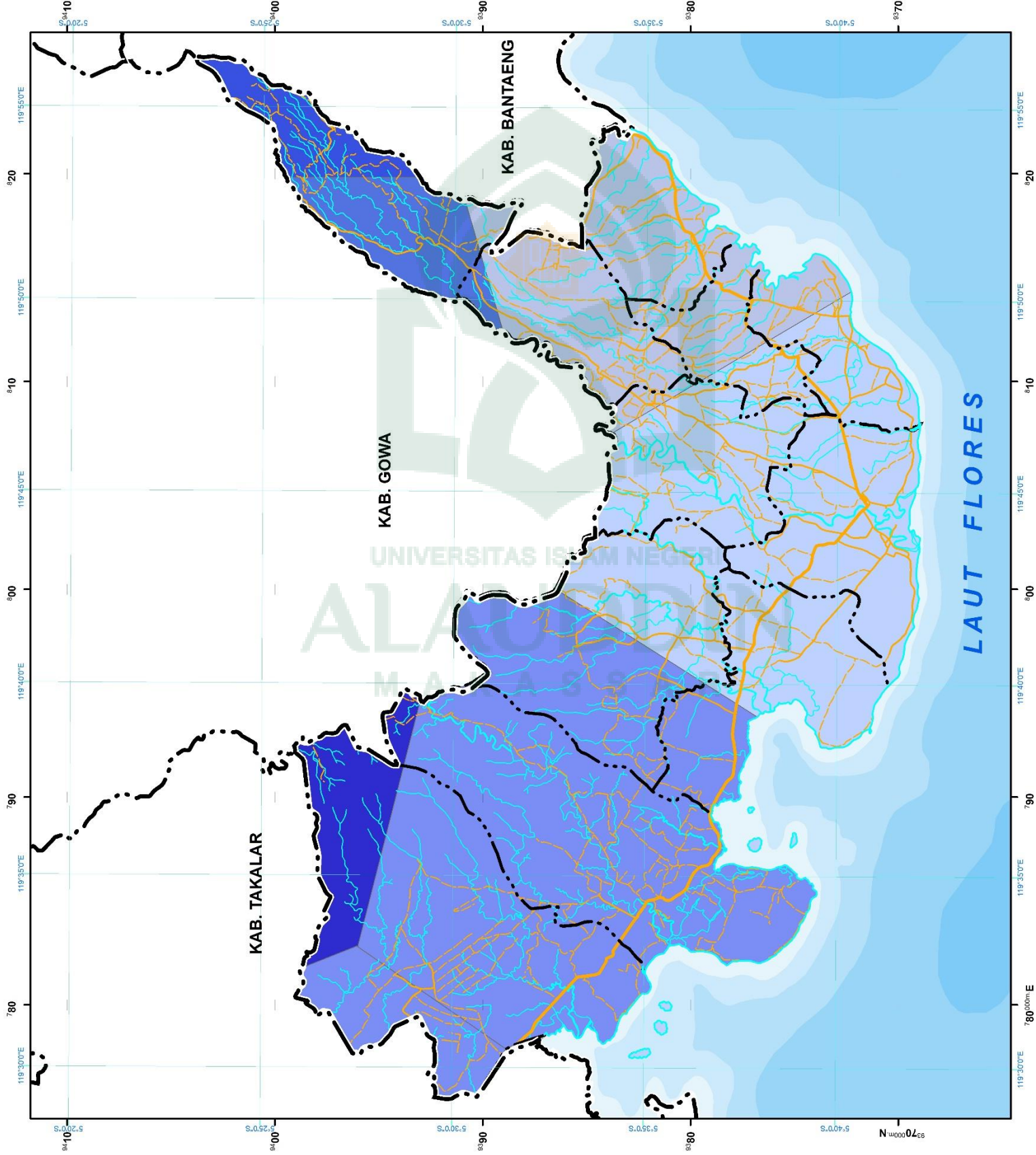
Curah Hujan (mm/Tahun)

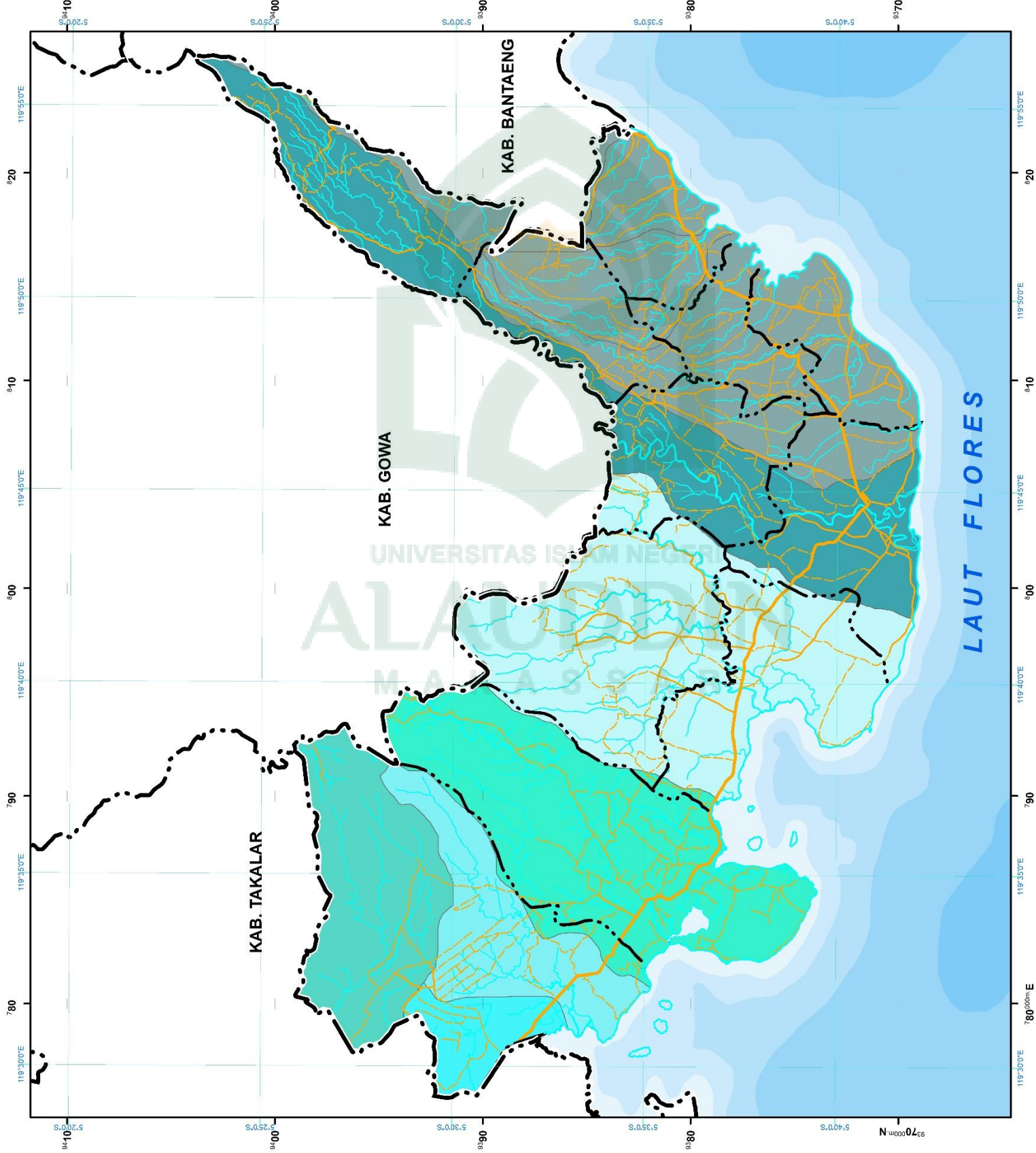
| |
|------|
| 1116 |
| 1890 |
| 2086 |
| 2329 |
| 2615 |
| 3973 |

NAMA DOSEN PEMBIMBING
1. NURSİYAM AKSA, S.T., M.Si
2. FADHIL SURUR, S.T., M.Si

NAMA MAHASISWA
MUH NURSİYAMSIR ALI
60800115061

SUMBER PETA
1. CITRA SATELIT 2019
2. RTRW KABUPATEN JENEPONTO 2011-2031





JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2019

TUGAS MATA KULIAH
TUGAS AKHIR

PETA DAERAH ALIRAN SUNGAI KABUPATEN JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Geografis
Datum : WGS 84



PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kabupaten Jeneponto

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Sungai
- Garis Pantai

Pembagian DAS

- Binanga Cikoang
- Binanga Lumbua
- Binanga Pangkajene
- Binanga Topa
- Binangapapa
- Jene Ponto
- Tarowang

NAMA DOSEN PEMBIMBING

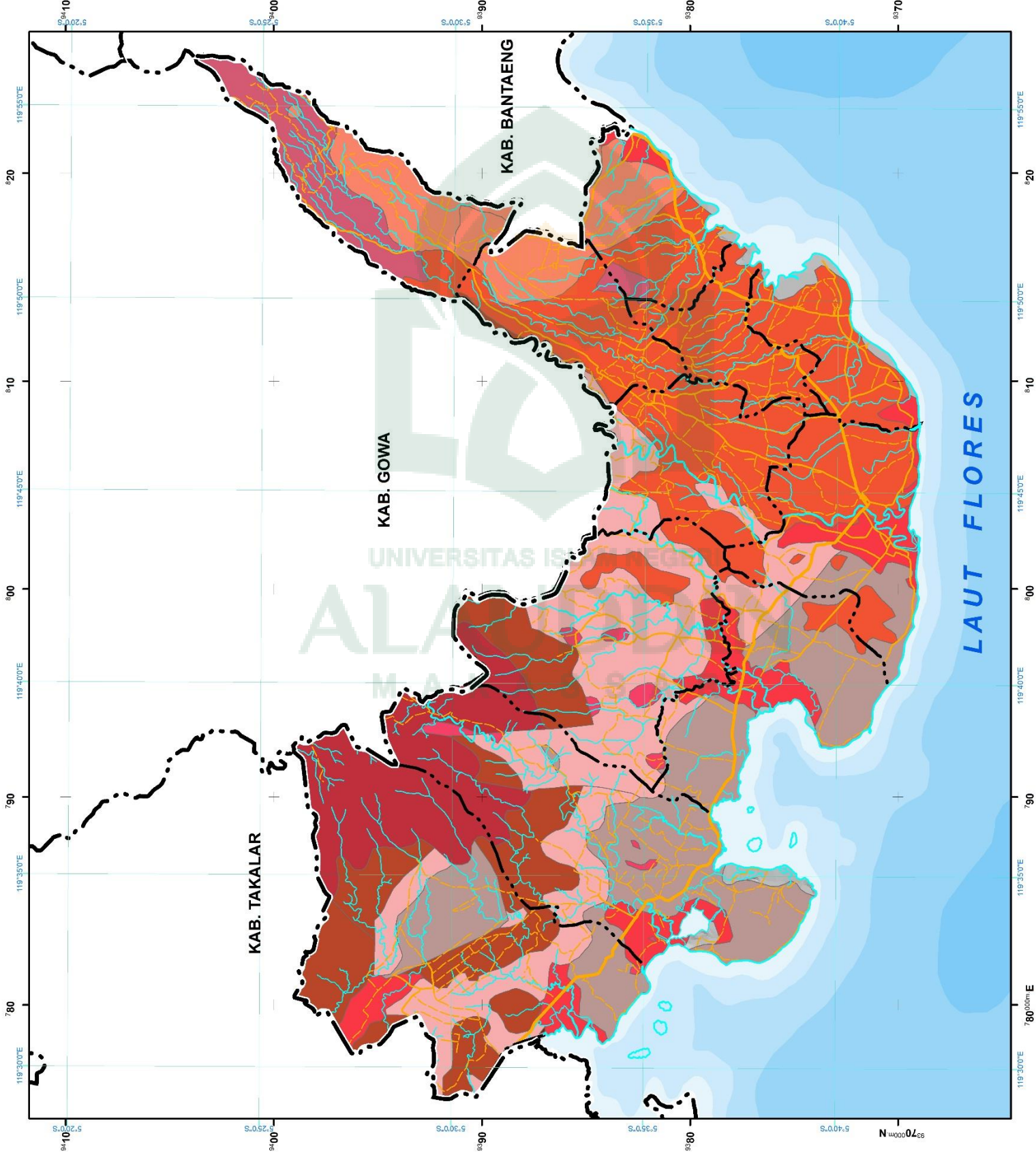
- 1. NURSİYAM AKSA, S.T., M.Si
- 2. FADHIL SURUR, S.T., M.Si

NAMA MAHASISWA

MUH NURSİYAM SIRALI
60800115061

SUMBER PETA

- 1. CITRA SATELIT 2019
- 2. RTRW KABUPATEN JENEPONTO 2011-2031



JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2019

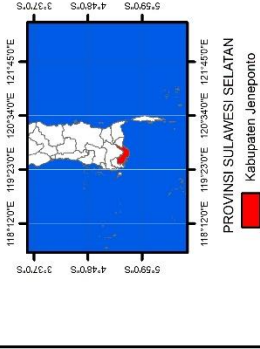
TUGAS MATA KULIAH

TUGAS AKHIR

PETA GEOLOGI KABUPATEN JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi
Zone UTM : 30S



LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Sungai
- Garis Pantai

Jenis Batuan

- basal
- batuan sedimen laut berselingan dengan batuan gunungapi
- batugamping
- hasil erupsi parasit
- kerikil, pasir, lempung, lumpur, batugamping koral
- konglomerat, lava, breksi, endapan lahar, tufa
- lava, breksi, tufa, konglomerat
- terutama breksi, lahar, tufa
- terutama lava

NAMA DOSEN PEMBIMBING

1. NURSYAMAKSA, S.T., M.Si
2. FADHIL SURUR, S.T., M.Si

NAMA MAHASISWA

MUHAMMAD NURSYAMIR ALI 60800115061

SUMBER PETA

1. CITRA SATELIT 2019
2. RTRW KABUPATEN JENEPONTO 2011-2031

B. Gambaran Umum Kawasan Penelitian

1. Letak Geografis dan Administrasi

Letak geografis merupakan posisi keberadaan sebuah wilayah berdasarkan letak dan memiliki batas-batas administrasi. Secara geografis lokasi penelitian berada di wilayah yang memiliki kemiringan lereng rendah yang berada di wilayah Kabupaten Jeneponto, yang secara administrasi mencakup 10 Kecamatan yakni Kecamatan Bangkala Barat, Kecamatan Bangkala, Kecamatan Bontoramba, Kecamatan Tamalatea, Kecamatan Turatea, Kecamatan Binamu, Kecamatan Kelara, Kecamatan Batang, Kecamatan Arungkeke, dan Kecamatan Tarowang. Luas wilayah penelitian ini yakni 570,63 Km².

2. Kondisi Penggunaan Lahan


Penggunaan lahan adalah segala campur tangan manusia, baik secara menetap ataupun berpindah – pindah terhadap suatu kelompok sumber daya alam dan sumber daya buatan, yang secara keseluruhan disebut lahan, dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan baik secara material maupun kedua – duanya (Malingreau, 1978). Jenis penggunaan lahan di wilayah penelitian Deleniasi Kawasan meliputi jenis penggunaan lahan Hutan Kering, Hutan Basah, Perkebunan, Ladang, Persawahan, Semak Belukar, Rawa, Tambak, Permukiman dan Tempat Kegiatan. Untuk lebih jelasnya jenis penggunaan lahan Deleniasi Kawasan dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8. Jenis Penggunaan Lahan Deleniasi Kawasan

| No | Jenis Penggunaan Lahan | Luas (km ²) | Persentase (%) |
|--------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | Permukiman dan Tempat Kegiatan | 22,24 | 3,90 |
| 2 | Persawahan | 208,26 | 36,50 |
| 3 | Perkebunan | 12,53 | 2,20 |
| 4 | Ladang | 266,92 | 46,78 |
| 5 | Hutan Basah | 0,36 | 0,06 |
| 6 | Hutan Kering | 12,74 | 2,23 |
| 7 | Semak Belukar | 23,30 | 4,08 |
| 8 | Rawa | 0,07 | 0,01 |
| 9 | Tambak | 19,04 | 3,34 |
| 10 | Lain-lainnya | 5,17 | 0,90 |
| Total | | 570,63 | 100 |

Sumber : RTRW Kabupaten Jeneponto 2011-2031

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa jenis penggunaan lahan Deleniasi Kawasan dengan total luas lahan 570,63 km², penggunaan lahan terbesar yakni lahan ladang dengan luas 266,92 km² atau 46,78 % dari total luas wilayah Deleniasi Kawasan sedangkan penggunaan lahan berupa rawa dengan luas 0,07 km² atau 0,01 % merupakan jenis penggunaan lahan dengan luas lahan terkecil.




JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2020


TUGAS MATA KULIAH

TUGAS AKHIR

PETA ADMINISTRASI DELENIASI KAWASAN
KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN

1:170.000


Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi
Zone UTM : 30S



118°12'0"E 119°23'0"E 120°34'0"E 121°45'0"E
 5°05'0"S 4°48'0"S 4°31'0"S 3°37'0"S
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kabupaten Jeneponto

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Deleniasi Kawasan
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Sungai
- Garis Pantai
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

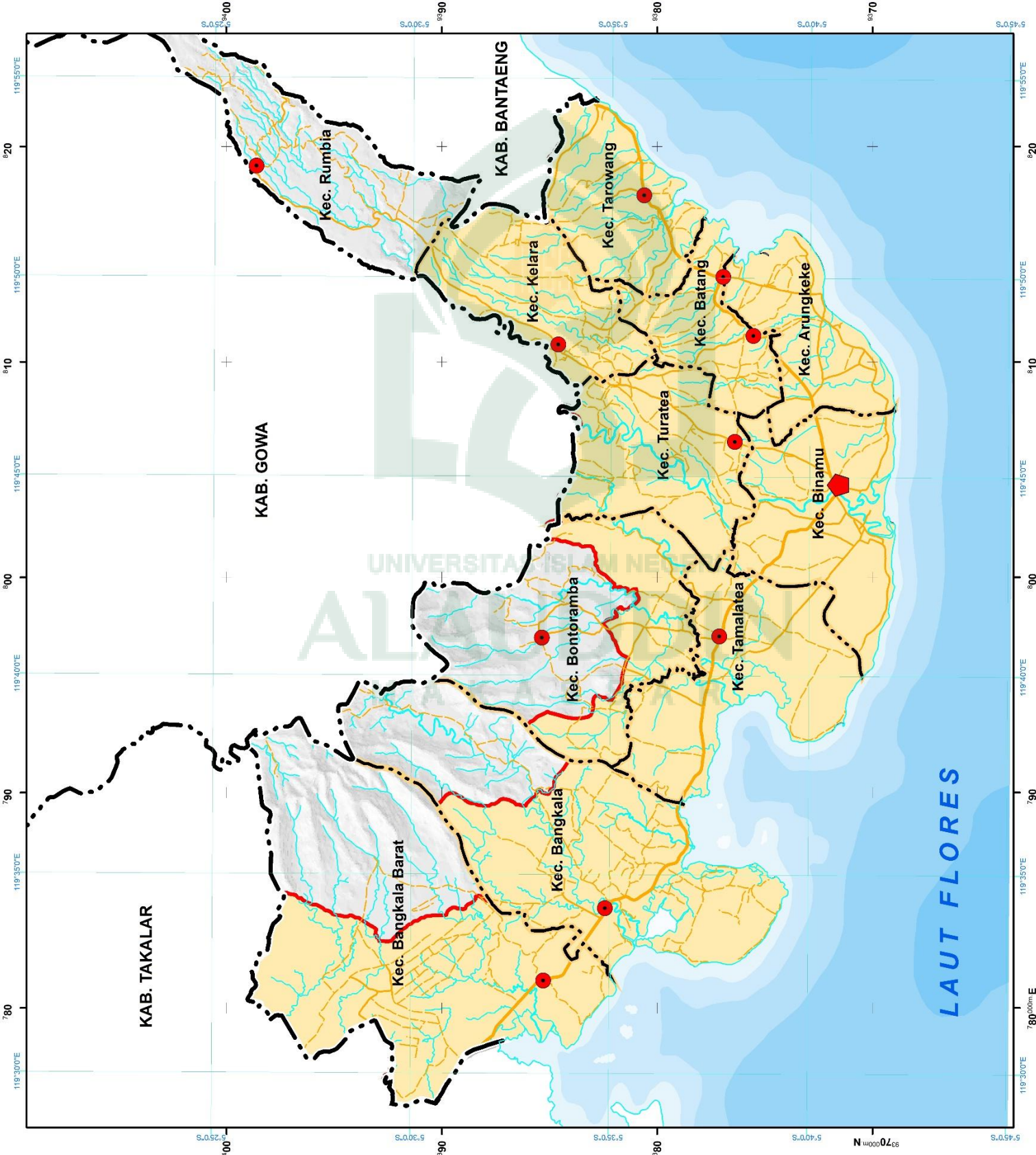
PEMBAGIAN

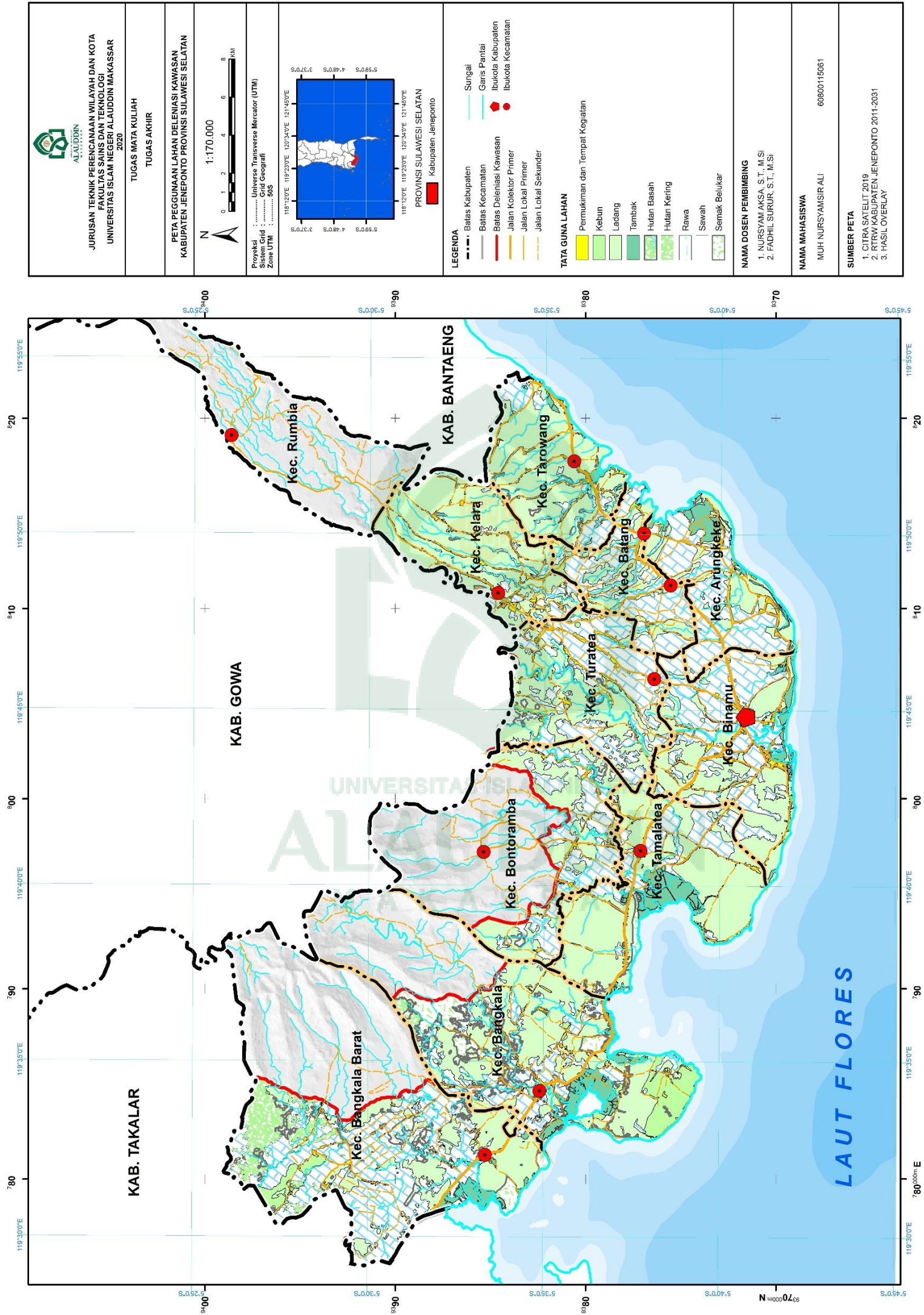
- Kawasan Deleniasi

NAMA DOSEN PEMBIMBING
 1. NURSYAMAKSA, S.T., M.Si
 2. FADHIL SURUR, S.T., M.Si

NAMA MAHASISWA
 MUH NURSYAMSIR ALI
 60800115061

SUMBER PETA
 1. CITRA SATELIT 2019
 2. RTRW KABUPATEN JENEPONTO 2011-2031
 3. HASIL OVERLAY





C. Faktor-Faktor Penentu Ibu Kota

Teknik analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan di Kabupaten Jeneponto yaitu metode skoring. Penentuan variabel didasarkan pada faktor-faktor penentu dalam suatu pemindahan Ibu Kota Nasional yaitu, Kondisi Fisik Wilayah, Politik, Infrastruktur, Lahan, Ekonomi, dan Kedudukan Strategis. Penilaian indikator untuk setiap variabel dilakukan dengan melihat kondisi langsung di lapangan dan dari berbagai data dari instansi.

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, dilakukan pemberian skor setiap indikator pada masing-masing variabel kemudian setiap indikator tersebut dirata-ratakan untuk mengetahui tingkat ketersediaan di Kabupaten Jeneponto. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9. Kriteria Penilaian Indikator

| NO. | Kriteria | Nilai Bobot |
|------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Berpeluang | 5 |
| 2. | Kurang Berpeluang | 3 |
| 3. | Tidak Berpeluang | 1 |

Sumber: Hasil Olah Pustaka 2019

Adapun untuk menentukan kriteria pada tabel diatas di jelaskan analisis berbagai faktor-faktor dalam penentuan suatu Ibu Kota.

1. Faktor Kondisi Fisik Wilayah

Kondisi Fisik Wilayah ialah bagaimana kita melihat kondisi yang di lapangan dan melihat dari aspek-aspek fisik dasarnya.

a. Kemiringan Lereng

Kemiringan lereng merupakan ukuran kemiringan lahan relative terhadap bidang datar yang secara umum dinyatakan dalam persen atau

derajat. Berdasarkan dari hasil overlay pemetaan kemiringan lereng deleniasi kawasan bahwa pada penilaian dari indikator kemiringan lereng yaitu terpenuhi alasannya karena kemiringan lereng menjadi salah satu fokus pembangunan di lokasi penelitian. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 10 berikut ini:

Tabel 10. Kemiringan Lereng Deleniasi Kawasan

| No | Kemiringan Lereng | Luas (km ²) | Persentase (%) |
|--------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | < 15 % | 412,5 | 72,29 |
| 2 | 15 – 40 % | 108,86 | 19,08 |
| 3 | > 40 % | 49,27 | 8,63 |
| Total | | 570,63 | 100 |

Sumber: Hasil Overlay Pemetaan

Berdasarkan tabel diatas dari hasil overlay pemetaan kemiringan lereng deleniasi kawasan maka berpeluang dalam pembangunan karena wilayah yang memiliki kemiringan lereng di bawah 15% memiliki luas 412,5 Km² atau 72,29 % yang mana memiliki diatas 50% dari luas wilayah deleniasi kawasan, yang dimana berdasarkan parameter penilaian indikator bahwa apabila memiliki diatas 50% maka memiliki nilai 5 dengan kriteria berpeluang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 11 peta kemiringan lereng Deleniasi Kawasan Kabupaten Jeneponto.

b. Kebencanaan

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Melihat dari data-data BMKG, Deleniasi Kawasan di Kabupaten Jeneponto tidak pernah terjadi Bencana terutama bencana gempa dan bencana tsunami, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 11 berikut ini:

Tabel 11. Data Gempa dan Tsunami Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

| No | Tahun | Lokasi | Jenis | Kerusakan | Menimbulkan |
|----|------------|-----------------------|-----------------|-----------|--|
| 1 | 29-12-1828 | Bulukumba | Tsunami | - | Kerusakan dan Korban Jiwa |
| 2 | 11-04-1967 | Tinambung | Gempa - Tsunami | 5,3 SR | 58 orang meninggal, 100 luka-luka, dan 13 hilang dan terjadi tanah longsor |
| 3 | 23-02-1969 | Majene | Gempa – Tsunami | 6,9 SR | 64 orang meninggal, 97 luka-luka, 1.287 rumah dan mesjid rusak berat/ringan. |
| 4 | 06-09-1972 | Mamuju | Gempa | 5,8 SR | Kerusakan pada bangunan, getaran dirasakan sampai Majene |
| 5 | 08-01-1984 | Mamuju | Gempa | 6,6 SR | 2 orang meninggal, 5 luka berat, 24 luka ringan dan 70 bangunan rusak berat dan 278 rusak ringan |
| 6 | 08-04-1993 | Ulweng, Mamuju | Gempa | 5,3 SR | Tanah longsor, dan bangunan rusak berat dan ringan |
| 7 | 28-09-1997 | Pinrang dan Pare-pare | Gempa | 6,0 SR | 20 orang meninggal, 22 luka berat, 10 luka ringan dan berbagai bangunan rusak berat. |

Sumber: Diolah dari BMKG Balai Wilayah IV Makassar dan beberapa sumber.

Berdasarkan tabel diatas historis gempa yang merusak di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dalam kurun waktu 100 tahun lebih dari tahun 1900 hingga 2016 menunjukkan bahwa belum pernah terjadi gempa bumi

khususnya tsunami dan gelombang pasang yang merusak Kabupaten Jeneponto, dan wilayah pendukung pusat kota yaitu Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Takalar, dan Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Berdasarkan dari hasil overlay pemetaan kebencanaan alam deleniasi kawasan bahwa pada penilaian dari indikator kebencanaan alam yaitu terpenuhi alasannya karena kebencanaan alam menjadi salah satu fokus pembangunan di lokasi penelitian. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 12 berikut ini:

Tabel 12. Kebencanaan Deleniasi Kawasan

| No | Bencana Alam | Luas (km ²) | Persentase (%) |
|--------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | Tidak Berpotensi | 423,27 | 74,18 |
| 2 | Banjir | 70,55 | 12,36 |
| 3 | Longsor Sedang | 18,31 | 3,21 |
| 4 | Longsir Tinggi | 46,24 | 8,10 |
| 5 | Longsor Sangat Tinggi | 12,26 | 2,15 |
| Total | | 570,63 | 100 |

Sumber: Hasil Overlay Pemetaan

Berdasarkan tabel diatas dari hasil overlay pemetaan kebencanaan alam deleniasi kawasan maka berpeluang dalam pembangunan karena wilayah yang memiliki kawasan tidak berpotensi terkena banjir memiliki luas 423,27 Km² atau 74,18 % yang mana memiliki diatas 50% dari luas wilayah deleniasi kawasan, yang dimana berdasarkan parameter penilaian indikator bahwa apabila memiliki diatas 50% maka memiliki nilai 5 dengan kriteria berpeluang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar peta 10.

c. Pola Ruang

Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Dalam pola ruang terdapat dua kawasan yaitu kawasan budidaya dan kawasan lindung.

1) Kawasan Budidaya

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Berdasarkan dari hasil overlay pemetaan bahwa pada penilaian dari indikator pola ruang yaitu terpenuhi alasannya karena pola ruang menjadi salah satu fokus pembangunan di lokasi penelitian.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 13 berikut ini:

Tabel 13. Pola Ruang (Budidaya) Deleniasi Kawasan

| No | Budidaya | Luas (km ²) | Persentase (%) |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | Agroforestry | 2,20 | 0,40 |
| 2 | Kawasan Budidaya Kehutanan | 0,67 | 0,12 |
| 3 | Kawasan Industri | 2,70 | 0,49 |
| 4 | Kawasan Industri Garam Rakyat | 0,51 | 0,09 |
| 5 | Perkebunan dan Agroforestry | 16,19 | 2,93 |
| 6 | Permukiman | 28,34 | 5,12 |
| 7 | Pertanian Lahan Basah | 210,63 | 38,06 |
| 8 | Pertanian Lahan Kering | 184,71 | 33,38 |
| 9 | Peternakan | 106,94 | 19,32 |
| 10 | Tambak | 0,49 | 0,09 |
| Total | | 553,38 | 100 |

Sumber: RTRW Kabupaten Jeneponto 2011-2031

Berdasarkan tabel diatas dari peta pola ruang kawasan budidaya di deleniasi kawasan memiliki luas wilayah 553,38 km², yang di mana lahan kering yaitu perkebunan, agroforestry, dan pertanian lahan kering yang memiliki luas wilayah 203,1 km² dan lahan basah yaitu kawasan budidaya kehutanan, kawasan industri, kawasam industri garam rakyat, permukiman, pertanian lahan basah, peternakan, dan tambak yang memiliki luas wilayah 350,28 km². Utuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 14 berikut ini:

Tabel 14. Luas Lahan Berdasarkan Pola Ruang (Budidaya)
Deleniasi Kawasan

| No | Luas Lahan Budidaya | Luas (km ²) | Persentase (%) |
|--------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | Lahan Produktif | 243,34 | 43,97 |
| 2 | Lahan Tidak Produktif | 310,04 | 56,03 |
| Total | | 553,38 | 100 |

Sumber: Hasil Overlay Pemetaan

Jadi dari penjelasan pola ruang kawasan budidaya maka berpeluang dalam pembangunan karena kawasan yang lahan produktif memiliki luas 243,34 km² atau 43,97 % dan lahan tidak produktif memiliki luas 310,38 km² atau 56,03 % dengan memiliki nilai 5. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 13 peta pola ruang (budidaya) Deleniasi Kawasan Kabupaten Jeneponto.

2) Kawasan Lindung

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup

sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Berdasarkan dari hasil overlay pemetaan pola ruang kawasan lindung deleniasi kawasan bahwa pada penilaian dari indikator pola ruang yaitu terpenuhi alasannya karena pola ruang menjadi salah satu fokus pembangunan di lokasi penelitian. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 15 berikut ini:

Tabel 15. Pola Ruang (Lindung) Deleniasi Kawasan

| No | Lindung | Luas (km ²) | Persentase (%) |
|--------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | Hutan Lindung | 11,26 | 65,28 |
| 2 | Hutan Bakau | 2,72 | 15,76 |
| 3 | Taman Buru Komara | 3,27 | 18,96 |
| Total | | 17,25 | 100 |

Sumber: Hasil Overlay Pemetaan

Berdasarkan tabel diatas dari hasil overlay pemetaan pola ruang kawasan lindung di deleniasi kawasan memiliki luas wilayah 17,25 km². Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 14 peta pola ruang (lindung) Deleniasi Kawasan Kabupaten Jeneponto.

Jadi dari hasil overley pemetaan pola ruang kawasan budidaya dan kawasan lindung dapat dilihat bahwa pada penilaian dari indikator pola ruang yaitu tidak berpeluang karena lahan yang produktif memiliki luas lahan 367,53 km² atau 64,41 % dari luas deleniasi kawasan yaitu 570,63 km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 16 berikut ini:

Tabel 16. Pola Ruang Deleniasi Kawasan

| No | Pola Ruang | Luas (km ²) | Persentase (%) |
|--------------|--|-------------------------|----------------|
| 1 | Kawasan Budidaya lahan Produktif | 243,34 | 42,64 |
| 2 | Kawasan Budidaya Lahan Tidak Produktif | 310,04 | 54,33 |
| 3 | Kawasan Lindung | 17,25 | 3,03 |
| Total | | 570,63 | 100 |

Sumber: Hasil Overlay Pemetaan

Berdasarkan tabel diatas dari hasil overlay pemetaan pola ruang baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung di deleniasi kawasan maka berpeluang dalam pembangunan karena wilayah tersebut memiliki kawasan budidaya lahan tidak produktif dengan luas 310,04 km² atau 54,33 % yang mana memiliki diatas 50% dari luas wilayah deleniasi kawasan, yang dimana berdasarkan parameter penilaian indikator bahwa apabila memiliki diatas 50% maka memiliki nilai 5 dengan kriteria berpeluang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 15 peta pola ruang Deleniasi Kawasan Kabupaten Jeneponto .

2. *Faktor Politik dan Hukum*

Faktor politik merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan kebijakan pemindahan pusat pelayanan Ibu Kota Nasional di Kabupaten Jeneponto. Jika kita melirik beberapa kasus contoh di Indonesia menyiratkan bahwa kontribusi elit politik atau sang penguasa menjadi faktor dominan yang menentukan arah laju suatu kebijakan kepentingan politik suatu golongan dalam mencapai pemindahan pusat Ibu Kota Nasional. Selanjutnya mengenai Visi dan Misi kepala daerah Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini adalah Bupati menjadi pengambilan keputusan akhir dalam

sebuah kebijakan-kebijakan yang di ambil.

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.

Dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) pada Bab 2 Pasal 5 menjelaskan :

- 1) Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi :
 - a) Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki
 - b) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional.
- 2) Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi :
 - a) Menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya
 - b) Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan
 - c) Mengendalikan perkembangan kota-kota pantai
 - d) Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih

kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya

3) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana meliputi :

- a) Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara
- b) Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi
- c) Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik
- d) Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air
- e) Meningkatkan jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi, serta mewujudkan sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi nasional yang optimal.

Berdasarkan penjelasan dari dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) pada Bab 2 Pasal 5 bahwa ada keterkaitan dalam proses sarana dan prasana yang merata atau menyuluruh berbagai wilayah, jadi sangat mendukung dalam pembangunan melihat dari penjelasan aspek sarana dan prasarana atau memiliki nilai 5.

b. Isu-isu Pemindahan Ibu Kota

Isu merupakan sebuah konsekuensi dari tindakan yang diusulkan

seseorang atau pihak lain yang dapat membawa dampak dalam negosiasi pribadi dan penyesuaian, sipil dan criminal litigasi, atau hal yang dapat menjadi sebuah masalah dari kebijakan public melalui legislativ aturan tindakan. Isu-isu mengenai mengenai pemindahan Ibu Kota Negara sudah lama dibahas sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno, kemudian di bahas kembali lagi Presiden Jokowi pada tahun 2017..

Akhir-akhir ini di wacanakan mengenai pemindahan Ibu Kota Skala Nasional. Pemindahan ini pada dasarnya bukan hal baru di bahas, pemindahan Ibu Kota Negara di Indonesia telah menjadi pengalaman dan wacana sejak jaman kolonial Belanda. Pada awal abad 20, Gubernur Jenderal J.P. Graaf van Limburg Strirum (1916 – 1921) membawa gagasan untuk memindahkan Ibukota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Gagasannya didasarkan kepada hasil studi dari H.F. Tillema, ahli kesehatan Belanda kelahiran Groningen yang bertugas di Semarang, tentang kesehatan kota-kota di pesisir utara Jawa. Disimpulkan bahwa kota-kota di pantai utara Jawa tidak sehat untuk dijadikan sebagai kedudukan Kantor Pemerintahan, niaga, industri, pendidikan dan lain-lain. Gagasan ini gagal karena dunia depresi besar (1932) disusul perang dunia (Tim Nawa Cipta, 2018).

Pada masa Perang Kemerdekaan, tahun 1946, keamanan di Ibukota Jakarta sangat buruk karena masih banyak pasukan Sekutu AFNEI dengan pasukan Belanda (NICA) di belakangnya, dan masih banyaknya pasukan Jepang. Pada tanggal 2 Januari 1946 Sultan

Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII memberikan Yogyakarta sebagai Ibukota Negara. 4 Januari Presiden Soekarno, Wakil Presiden M. Hatta dan seluruh Kabinet sampai di Yogyakarta. Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda menyerbu Yogyakarta, Presiden dan Wakil Presiden ditangkap Belanda, dan kekuasaan diserahkan kepada Syafrudin Prawiranegara yang berada di Sumatera Barat, dan menjadikan “Sumatera Barat” sebagai Ibukota Negara. Tanggal 6 Juli 1949, Ibukota Negara kembali ke Yogyakarta, setelah Presiden dan Wakil Presiden kembali ke Yogyakarta (Tim Nawa Cipta, 2018).

Tanggal 17 Agustus 1950 Ibukota kembali ke Jakarta setelah Republik Indonesia Serikat bubar dan berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1957 Presiden Soekarno melalui pernyataan resmi menyatakan agar Palangkaraya menjadi “modal dan model” Ibukota Negara yang baru. Pada saat itu dibuat kerjasama dengan Uni Soviet. Sejumlah insinyur Rusia didatangkan untuk membangun jalan raya di lahan gambut, yang dilaporkan berjalan dengan baik. Krisis ekonomi pada tahun 1960an membuat pembangunan Palangkaraya terhenti, dan pada tahun 1965 pada saat Presiden Soekarno “dilengserkan”, gagasan itu lenyap.

Pada tahun 2010 Presiden Yudhoyono membuka wacana tentang pemindahan Ibukota Negara, hanya saja gagasan tersebut berhenti pada tingkat wacana. Pada tahun 2017, Presiden Jokowi mengangkat kembali pentingnya pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta

ke tempat lain (Tim Nawa Cipta, 2018).

Namun kurangnya pembahasan mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dikaitkan dengan Kabupaten Jenponto di pembicaraan Nasional, hanya sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan yang mengetahui isu-isu pemindahan Ibu Kota Negara yang dikaitkan dengan Kabupaten Jeneponto, sehingga dapat dikategorikan Kabupaten Jeneponto tidak termasuk dalam berbagai isu-isu pemindahan Ibu Kota maka tidak berpeluang dalam pembangunan dengan memiliki nilai 1.

3. Faktor Infrastruktur

Infrastruktur adalah semua jenis fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat umum untuk mendukung berbagai kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, infrastruktur ialah semua fasilitas, baik fisik maupun non fisik yang dibangun oleh pemerintah maupun perorangan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam lingkup sosial dan ekonomi.

a. Internal

Infrastruktur internal merupakan prasarana yang ada di wilayah tersebut dan di butuhkan masyarakat umum untuk mendukung berbagai kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari baik fisik maupun non fisik.

Menurut dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto pada Bab 2 Pasal 4 Nomor 2 menjelaskan strategi pengembangan infrastruktur wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud

dalam pasal 3 huruf b, terdiri dari :

- 1) Pengembangan sistem prasarana transportasi, yang terdiri dari pembangunan dan pengembangan sistem jaringan jalan dan kereta api, pengembangan pelabuhan, pengembangan sistem angkutan umum massal, dan pengembangan sarana transportasi
- 2) Pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan DAS, meliputi pengelolaan air permukaan dan air bawah tanah
- 3) Pengembangan air bersih yaitu peningkatan kualitas air bersih dan cakupan pelayanan air bersih
- 4) Pengembangan sistem drainase
- 5) Pengembangan prasarana energi
- 6) Pengembangan jaringan telekomunikasi
- 7) Pengembangan sistem persampahan (pengembangan fasilitas pengelolaan sampah)
- 8) Pengembangan sistem sanitasi lingkungan yang terdiri dari kebijakan peningkatan kualitas sistem sanitasi permukiman dan kebijakan pengembangan sistem pengolahan air limbah.

Berdasarkan penjelasan dari dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jeneponto Bab 2 Pasal 4 Nomor 2 bahwa berpeluang dalam pembangunan karena memiliki infrastruktur yang memadai dengan memiliki nilai 5. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 16 peta infrastruktur Deleniasi Kawasan.

b. Eksternal

Infrastruktur eksternal merupakan prasarana yang ada di wilayah pendukung sebagai penunjang untuk wilayah yang di pusatkan pembangunan. Dimana wilayah deleniasi kawasan diapit oleh Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Takalar yang mana di Kabupaten Takalar terdapat Mamminasata yang memiliki perkembangan infrastrukturnya.

Menurut dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantaeng pada Bab 2, Pasal 7 huruf e dan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Takalar pada Bab 2, Pasal 3 nomor 5 menjelaskan pembangunan sarana dan Prasarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan baerbasis konservasi serta mitigasi bencana.

Jadi Berdasarkan penjelasan dari dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantaeng dan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Takalar sebagai pendukung atau penunjang wilayah pembangunan maka berpeluang dalam pembangunan karena memiliki infrastruktur yang memadai dengan memiliki nilai 5.

4. Faktor Lahan

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara

alami maupun akibat pengaruh manusia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 17 berikut ini:

Tabel 17. Luas Lahan Deleniasi Kawasan

| No | Jenis Penggunaan Lahan | Luas (km ²) | Persentase (%) |
|--------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | Permukiman dan Tempat Kegiatan | 22,24 | 3,90 |
| 2 | Sungai | 1,82 | 0,32 |
| 3 | Pesisir | 0,4 | 0,07 |
| 4 | Danau | 0,02 | 0,01 |
| 5 | Kebun | 12,53 | 2,20 |
| 6 | Hutan Basah | 0,36 | 0,06 |
| 7 | Hutan Kering | 12,74 | 2,23 |
| 8 | Semak Belukar | 23,30 | 4,08 |
| 9 | Rawa | 0,06 | 0,01 |
| 10 | Tambak | 19,04 | 3,34 |
| 11 | Ladang Kering | 177,77 | 31,15 |
| 12 | Ladang Basah | 89,15 | 15,62 |
| 13 | Sawah Kering | 137,8 | 24,15 |
| 14 | Sawah Basah | 73,40 | 12,86 |
| Total | | 570,63 | 100 |

Sumber : RTRW Kabupaten Jeneponto 2011-2031

Dari penjelasan tabel diatas dapat dilihat luas lahan yang ada di deliniasi kawasan yang mana memiliki luas lahan yaitu 570,63 km². Lahan sangat berpengaruh dalam proses pembangunan guna melihat kawasan mana saja yang lahannya dapat di kembangkan dalam proses pembangunan. Adapun faktor lahan membahas mengenai cakupan luas lahan dan pemanfaatan lahan.

a. Cakupan Luas Lahan

Cakupan luas lahan merupakan lahan yang dapat dikembangkan atau diperuntukkan dalam masa waktu yang tidak diketahui.

Berdasarkan dari hasil overlay pemetaan cakupan luas lahan deleniasi

kawasan bahwa pada penilaian dari indikator lahan yaitu terpenuhi alasannya karena lahan menjadi salah satu fokus pembangunan di lokasi penelitian. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 18 berikut ini:

Tabel 18. Cakupan Luas Lahan Deleniasi Kawasan

| No | Cakupan Luas Lahan | Luas (km ²) | Persentase (%) |
|--------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | Lahan Produktif | 242,53 | 42,50 |
| 2 | Lahan Tidak Produktif | 328,1 | 57,50 |
| Total | | 570,63 | 100 |

Sumber: Hasil Overlay Pemetaan

Berdasarkan tabel diatas dari hasil overlay pemetaan cakupan luas lahan di deleniasi kawasan maka berpeluang dalam pembangunan karena wilayah lahan tidak produktif tersebut sangat mendukung dalam pembangunan melihat dari segi cakupan luas lahannya dengan luas 328,1 km² atau 57,50 % yang mana memiliki diatas 50% dari luas wilayah deleniasi kawasan, yang dimana berdasarkan parameter penilaian indikator bahwa apabila memiliki diatas 50% maka memiliki nilai 5 dengan kriteria berpeluang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar peta 17 peta cakupan luas lahan Deleniasi Kawasan Kabupaten Jeneponto.

b. Pemanfaatan lahan

Pemanfaatan lahan merupakan modifikasi yang di lakukan terhadap lingkungan hidup menjadi lingkungan terbangun seperti lapangan, perkebunan, ladang, dan pertanian.

Berdasarkan dari hasil overlay pemetaan pemanfaatan lahan deleniasi kawasan bahwa pada penilaian dari indikator lahan yaitu

terpenuhi alasannya karena lahan menjadi salah satu fokus pembangunan di lokasi penelitian. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 19 berikut ini:

Tabel 19. Pemanfaatan Lahan Deleniasi Kawasan

| No | Pemanfaatan Lahan | Luas (km ²) | Persentase (%) |
|--------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | Produktif | 242,53 | 42,50 |
| 2 | Tidak Produktif | 328,1 | 57,50 |
| Total | | 570,63 | 100 |

Sumber: Hasil Overlay Pemetaan

Berdasarkan tabel diatas dari hasil overlay pemetaan pemanfaatan lahan di deleniasi kawasan maka berpeluang dalam pembangunan karena wilayah tersebut sangat mendukung dalam pembangunan melihat dari segi pemanfaatan lahannya dengan luas 328,1 km² atau 57,50 % yang mana memiliki diatas 50% dari luas wilayah deleniasi kawasan, yang dimana berdasarkan parameter penilaian indikator bahwa apabila memiliki diatas 50% maka memiliki nilai 5 dengan kriteria berpeluang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 18 peta pemanfaatan lahan Deleniasi Kawasan Kabupaten Jeneponto.

5. Faktor Ekonomi

Ekonomi ialah yang mempelajari aspek-aspek ekonomi dalam proses pembangunan di berbagai wilayah, yang dimana terdapat Ekonomi Regional dan ekonomi Nasional, adapun Ekonomi Regional bagaimana melihat di wilayah tersebut memiliki arah pergerakannya meningkat sedangkan Ekonomi Nasional bagaimana wilayah pendukung di kawasan tersebut memiliki kecenderungan arah pergerakan aktivitas ekonominya

meningkat seperti yang ada di Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Takalar sebagai wilayah pendukung.

a. Ekonomi Regional

Ekonomi Regional bagaimana melihat di wilayah tersebut memiliki arah pergerakannya meningkat. Selama periode tahun 2011-2015 perekonomian Kabupaten Jeneponto selalu mengalami pertumbuhan secara fluktuatif. Untuk pertumbuhan ekonominya mempunyai rata-rata 7,41%. Di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2011 pertumbuhannya sebesar 7,32 persen sedangkan pada tahun 2012 terjadi penurunan pertumbuhan sebesar 7,27 persen sama halnya di tahun 2013 terjadi juga penurunan pertumbuhan sebesar 6,97persen terus di tahun 2014 terjadi peningkatan sebesar 7,71 persen dan di tahun 2015 sebesar 7,80 persen. Selama lima tahun terakhir (2011-2015), total nilai tambah oleh aktifitas sektor-sektor ekonomi yang berada di wilayah kabupaten jeneponto baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan ,secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,peningkatan yang lebih besar pada PDRB atas dasar harga berlaku di bandingkan PDRB atas dasar harga konstan yang menunjukkan adanya perubahan nilai rupiah atau terjadi inflasi. (Saparuddin, 2016)

Dari penjelasan diatas bahwa Kawasan Deleniasi memiliki arah pergerakan aktivitas ekonominya sangat meningkat jadi dapat dikategorikan berpeluang dalam pembangunan dengan memiliki nilai 5.

b. Ekonomi Nasional

Ekonomi Nasional bagaimana wilayah pendukung di kawasan tersebut memiliki kecenderungan arah pergerakan aktivitas ekonominya meningkat. Yang mana wilayah pendukungnya yaitu Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Takalar.

Berdasarkan potensi yang ada di daerah Kabupaten Bantaeng, sektor pertanian masih mendominasi yaitu dengan kontribusi sebesar 30,39% dari keseluruhan PDRB Kabupaten Bantaeng pada tahun 2018. Secara keseluruhan, perekonomian di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2018 mengalami perkembangan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB yang mencapai level 8,08% pada tahun 2018. (Indikator Ekonomi Kabupaten Bantaeng 2019).

Wilayah Mamminasata merupakan pusat kegiatan perekonomian, bukan hanya di Provinsi Sulawesi Selatan tapi juga di Pulau Sulawesi dan di Kawasan Timur Indonesia. Percepatan kegiatan perekonomian di Mamminasata diharapkan dapat berpengaruh di dalam dan di luar Provinsi Sulawesi Selatan.

Jadi dari penjelasan diatas deleniasi kawasan berada berbatasan dengan Mamminasata yang memiliki ousat kegiatan perekonomian dan berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng yang memiliki perekonomiannya teru meningkat setiap tahunnya, sehingga dapat dikategorikan berpeluang karena wilayah pendukung deleniasi kawasan memiliki kecenderungan arah pergerakan ekonomiannya meningkat dengan memiliki nilai 5.

6. Faktor Kedudukan strategis

Pengaruh letak geografis terhadap pemindahan Pusat Ibu Kota Nasional di Kabupaten Jenepono bahwa letak geografis dapat dilihat dari gambaran jarak lokasi pusat pemerintahan yang baru dengan pusat pemerintahan yang lama, serta jarak dengan kota-kota yang ada disekitar lokasi pemilihan pusat Ibu Kota yang baru. Hal ini nantinya akan sangat menentukan interaksi antara wilayah-wilayah disekitar. Letak geografis Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nasional di Kabupaten Jenepono harus mengacu pada kepada analisis Pembobotan karena dalam menentukan lokasi harus melihat aspek-aspek fisik dasar.

a. Letak Gografis

Letak geografis merupakan posisi keberadaan sebuah wilayah berdasarkan letak dan memiliki batas-batas administrasi. Deleniasi kawasan berada berbatasan dengan wilayah pengembang yaitu dengan Mamminasata dan Kabupaten Bantaeng, bagaimana dalam dokumen Peraturan Preside Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 pada Bab 3 Pasal 12 Nomor 1, menjelaskan Rencana struktur ruang kawasan perkotaan Mamminasata ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana, serta meninmemgkatkan fungsi kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya. Adapun Kabupaten Bantaeng memiliki produksi sektor pertanian dan sektor perkebunan mengalami peningkatan yang cukup berarti, yang dimana sumber daya alamnya sangat memadai.

Jadi dari penjelasan diatas deleniasi kawasan berada berbatasan dengan Mamminasata yang memiliki infrastruktur mencukupi dan berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng yang memiliki sumber daya alamnya mencukupi, sehingga dapat dikategorikan berpeluang karena deleniasi kawasan berada dilokasi yang strategis dan dekat dengan daerah pengembang dengan memiliki nilai 5.

b. Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber daya alam (SDA) adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dilansir dari situs Kemdikbud, sumber daya alam terbagi menjadi dua jenis yakni sumber daya alam hayati dan sumber daya alam nonhayati. Sementara berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terbagi menjadi tiga macam yakni sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.

Sumber daya alam merupakan suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non fisik. Sumber daya ada yang dapat berubah (berubah ke bentuk yang lain, baik menjadi semakin besar maupun hilang maupun ada pula sumber daya yang kekal atau selalu tetap).

Berdasarkan dari hasil overlay pemetaan sumber daya alam deleniasi kawasan bahwa pada penilaian dari indikator lahan yaitu

terpenuhi alasannya karena sumber daya alam menjadi salah satu fokus pembangunan di lokasi penelitian. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 20 berikut ini:

Tabel 20. Sumber Daya Alam (SDA) Deleniasi Kawasan

| No | Sumber Daya Alam | Luas (Km ²) | Persentase (%) |
|--------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | Berpotensi | 475,18 | 83,27 |
| 2 | Tidak Berpotensi | 95,45 | 16,73 |
| Total | | 570,63 | 100 |

Sumber: Hasil Overlay Pemetaan

Berdasarkan tabel diatas dari hasil overlay pemetaan sumber daya alam di deleniasi kawasan maka berpeluang dalam pembangunan karena wilayah tersebut sangat mendukung dalam pembangunan melihat dari segi sumber daya alam dengan luas kawasan 475,18 Km² atau 83,27 % yang mana memiliki diatas 50% dari luas wilayah deleniasi kawasan, yang dimana berdasarkan parameter penilaian indikator bahwa apabila memiliki diatas 50% maka memiliki nilai 5 dengan kriteria berpeluang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar peta 17.

Untuk mengetahui berpeluang, kurangberpeluang, atau tidak berpeluang deleniasi kawasan menjadi Ibu kota Skala Nasional berdasarkan hasil dari deskripsi pembototan yang telah dianalisis menggunakan skoring pada sub variabel, dapat di lihat pada Tabel 21 berikut ini :

Tabel 21 Rekapitulasi Skoring Variabel Hasil Penelitian

| No | Variabel | Indikator | Bobot Indikator | Nilai Indikator | Jumlah Nilai Indikator | Penilaian Indikator (%) | Bobot Variabel | Nilai Bobot Variabel (%) |
|---------------|-----------------------|--|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|
| 1 | Kondisi Fisik Wilayah | 1. Kemiringan Lereng 2. Kebencanaan 3. Pola Ruang | 40% 30% 30% | 5 5 5 | 200 150 150 | 100 | 30 | 30 |
| 2 | Politik | 1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) 2. Isu-isu Pemindahan Ibu Kota | 50% 50% | 5 1 | 250 50 | 60 | 10 | 6 |
| 3 | Infrastruktur | 1. Internal 2. Eksternal | 50% 50% | 5 5 | 250 250 | 100 | 10 | 10 |
| 4 | Lahan | 1. Cakupan Luas Lahan 2. Pemanfaatan Lahan | 50% 50% | 5 5 | 250 250 | 100 | 30 | 30 |
| 5 | Ekonomi | 1. Ekonomi Regional 2. Ekonomi Nasional | 50% 50% | 5 5 | 250 250 | 100 | 10 | 10 |
| 6 | Kedudukan Strategis | 1. Geografis 2. Sumber Daya Alam | 50% 50% | 5 5 | 250 250 | 100 | 10 | 10 |
| Jumlah | | | | | | | 100 | 96 |

Sumber : Standar Pembobotan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tahun 2007 (Hasil Analisis)

Berdasarkan tabel diatas hasil pembobotan faktor-faktor penentu suatu ibu kota skala nasional di Kabupaten Jeneponto dengan sintetis data antar variabel memperoleh nilai sebesar 96 % dukungan terhadap pembangunan pusat kota skala nasional di deleniasi kawasan tersebut. Melihat kategori-kategori penilaian berikut

- Berpeluang = 5 (Jika memiliki tingkat kesusaian 75 % - 100 %)
- Kurang Berpeluang = 3 (Jika memiliki tingkat kesusaian 50 % - 74 %)
- Tidak Berpeluang = 1 (Jika memiliki tingkat kesusaian < 50 %)

Sesuai hasil yang analisis yang dilakukan dalam penentuan suatu wilayah untuk menjadi Ibu Kota Skala Nasional dari variabel-variabel penelitian yang telah di analisis menghasilkan yaitu Deleniasi kawasan di Kabupaten Jeneponto sudah berada pada kategori berpeluang dengan nilai 5 (lima) yaitu deleniasi kawasan di Kabupaten Jeneponto mendukung terhadap sebagai pengembangan Pusat Kota Skala Nasional.

Dari hasil peta analisa deleniasi kawasan dapat dilihat yang mana kawasan industri garam terdapat di Kecamatan Bangkala, adapun untuk lahan produktif terdapat di Kecamatan Bangkala Barat, Kecamatan Bangkala, Kecamatan Bontoramba, Kecamatan Tamalate, dan Kecamatan Kelara, yang mana lahan produktif terluas berada di Kecamatan Bangkala Barat dan lahan produktif terkecil berada di Kecamatan Kelara. Dari lahan tidak produktif terdapat di Kecamatan Bontoramba, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Turatea, Kecamatan Binamu, Kecamatan Arungkeke, Kecamatan Batang, Kecamatan Kelara, dan Kecamatan Tarowang, yang mana lahan tidak produktif terluas berada di Kecamatan Binamu dan lahan tidak produktif terkecil berada di Kecamatan

Bontoramba.

Dari Kecamatan Bangkala Barat yaitu kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Takalar ke Ibu Kota Kabupaten Jeneponto yang di lalui jalur Kereta Api dan Jalur Provinsi terdapat beberapa lahan yang tidak produktif yang berada di Kecamatan Tamalate, Kecamatan Bontoramba, Kecamatan Turatea, dan Kecamatan Binamu. Adapun dari Kecamatan Tarowang yang berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng yang di lalui jalur Kereta Api dan Jalur Provinsi terdapat beberapa lahan yang tidak produktif yaitu berada di Kecamatan Tarowang, Kecamatan Batang, dan Kecamatan Arungkeke.

Jadi dari penjelasan peta analisa kawasan yang berpeluang menjadi pusat perkembangan pusat kota skala Nasional yaitu berada di kecamatan Tamalate, Kecamatan Turatea, Kecamatan Arungkeke, Kecamatan Batang, Kecamatan Tarowang, dan Kecamatan Binamu. Yang mana kecamatan tersebut di lalui Jalur Kereta Api dan Jalur Provinsi serta memiliki lahan tidak produktif dan tidak terdapat bencana di kawasan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada gambar 20 peta analisa Deleniasi Kawasan Kabupaten Jeneponto.

D. Peluang Kabupaten Jeneponto Sebagai Ibu Kota Skala Nasional pada bidang Ekonomi

Melihat dari peluang Kabupaten Jeneponto sebagai Ibu Kota skala Nasional dari batas wilayah administrasi, Kabupaten Jeneponto dan Provinsi Sulawesi Selatan berada di tengah Indonesia sehingga untuk perkembangan setiap wilayah di Indonesia dapat merata sebagaimana salah satu syarat dalam pusat kota skala nasional. Dari segi aspek lahan, Kabupaten Jeneponto memiliki luas lahan tidak produktif yang luas sehingga sangat berpeluang untuk di kembangkan

sebagai pengembanagan pusat kota skala nasional. Dari segi aspek Transportasi, yang di mana Kabupaten Jeneponto di lalui jalur Provinsi dan Kabupaten Jeneponto memiliki rencana jalan alternatif dan memiliki rencana kereta api lintas utama yang mana jalur kereta api ini melewati dengan wilayah-wilayah pendukung Kabupaten jeneponto dalam pengembangan pusat kota skala nasional, serta Kabupaten Jeneponto memiliki pelabuhan yang bisa menghubungkan wilayah di luar Provinsi Sulawesi Selatan.

Ekonomi ialah yang mempelajari aspek-aspek ekonomi dalam proses pembangunan di berbagai wilayah. Yang dimana terdapat Ekonomi Regional dan ekonomi Nasional, adapun Ekonomi Regional bagaimana melihat di wilayah tersebut memiliki arah pergerakannya meningkat sedangkan Ekonomi Nasional bagaimana wilayah pendukung di kawasan tersebut memiliki kecenderungan arah pergerakan aktivitas ekonominya meningkat seperti yang ada di Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Takalar sebagai wilayah pendukung. Melihat dimana Kabupaten Jeneponto diapit dari Kabupaten Bantaeng dan Kawasan Mamminasata, adapun dalam melihat arahan Perda RTRW dari setiap wilayah pendukungnya dapat dilihat pada Tabel 22 berikut ini:

Tabel 22. Arahan RTRW Setiap Sektor Uggulan

| NO | Kabupaten | Arahan Dalam RTRW |
|----|-----------|--|
| 1. | Bantaeng | <p>Dalam RTRW Kabupaten Bantaeng No 2 Tahun 2012, mengenai kawasan industri :</p> <p>(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan peruntukan industry besar; b. Kawasan peruntukan industry sedang; dan c. kawasan peruntukan industry rumah tangga. <p>(2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana</p> |

| | | |
|----|-------------|--|
| | | <p>dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan di Kawasan Industri Bantaeng di Kecamatan Pa'jukukang.</p> <p>(3) Kawasan peruntukan industry sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan kawasan industry pengolahan ditetapkan di Kecamatan Pa'jukukang, Kecamatan Eremerasa, Kecamatan Bantaeng, dan Kecamatan Bissappu.</p> <p>(4) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di PKL, dan PPK.</p> |
| 2. | Mamminasata | <p>Dalam Peraturan Presiden RI No 55 Tahun 2011 pada Bab VI Pasal 6, mengenai Arahan peraturan zonasi untuk kawasan perkotaan inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a terdiri atas:</p> <p>a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemerintahan provinsi, pemerintahan kota dan/atau kecamatan, perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional, pelayanan pendidikan tinggi, pelayanan olah raga skala internasional, nasional, dan regional, pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional, kegiatan industri manufaktur, kegiatan industri perikanan, pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional, pelayanan transportasi laut internasional dan nasional, pelayanan transportasi udara internasional dan nasional, pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pariwisata, dan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan inti;</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, kegiatan industri yang menimbulkan polusi, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan perkotaan inti;</p> <p>d. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas tinggi, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal;</p> <p>e. pengembangan kawasan perkotaan inti diarahkan sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | lingkungan tinggi dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana tinggi; dan |
| | | f. penyediaan RTH kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan inti. |

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah

Melihat dari tabel diatas yang mana wilayah mendukung deleniasi kawasan memiliki arahannya masing-masing berdasarkan Perda RTRW setiap wilayah dimana Kabupaten Banteng dari Perda RTRW No 2 Tahun 2012 menjelaskan mengenai Kawasan Industri dan Mamminasata dari Peraturan Presiden Republik Indonesia No 55 Tahun 2011 menjelaskan mengani Kawasan Perkotaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 21 peta analisa potensi Kabupaten pendukung Deleniasi Kawasan Kabupaten Jeneponto.

Bagaimana wilayah pendukung di kawasan tersebut memiliki kecenderungan arah pergerakan aktivitas ekonominya meningkat. Yang mana wilayah pendukungnya yaitu Kabupaten Bantaeng, Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Berdasarkan potensi yang ada di daerah Kabupaten Bantaeng, jumlah industri di Kabupaten Bantaeng tahun 2018 menurun dari tahun sebelumnya yaitu dari 1.745 indutri di tahun 2017 menjadi 1.359 industri di tahun 2018. Dari jumlah industri tersebut, industri kecil dan rumah tangga mendominasi industri yang ada di daerah ini. Industri Jasa Penggilingan dan Industri batu bata mendominasi industri kecil dan rumah tangga yang ada, industri batu bata banyak diusahakan di Kecamatan Pa'jukukang, dan pemasarannya menjangkau beberapa kabupaten yang ada di sekitar Kabupaten Bantaeng. Indutri makanan dan minuman juga jumlahnya cukup banyak, hal ini didorong oleh semakin giatnya kegiatan industri

pengolahan makanan khas dari Bantaeng seperti industri makanan dengan bahan dasar tepung, jagung, rumput laut dan pisang. Kerupuk olahan dari rumput laut merupakan usaha masyarakat di daerah ini untuk meningkatkan nilai ekonomi produksi rumput laut yang cukup banyak di daerah pesisir Bantaeng. (Statistik Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019).

Wilayah Mamminasata merupakan pusat kegiatan perekonomian, bukan hanya di Provinsi Sulawesi Selatan tapi juga di Pulau Sulawesi dan di Kawasan Timur Indonesia. Percepatan kegiatan perekonomian di Mamminasata diharapkan dapat berpengaruh di dalam dan di luar Provinsi Sulawesi Selatan. (Peraturan Presiden RI No 55 Tahun 2015)

Jadi dari penjelasan diatas deleniasi kawasan memiliki wilayah pendukung yang rata-rata kawasan dari sektoralnya meningkat setiap tahunnya yang Kabupaten Bantaeng memiliki sektor unggulan dikawasan Industri, Kabupaten Takalar memiliki sektor unggulan d kawasan Pertanian, serta Mamminasata yang memiliki kawasan perkotaan. Sehingga melihat peluang Deleniasi Kawasan sebagai Ibu Kota Skala Nasional pada bidang ekonomi sangat berpeluang, karena perekonomian wilayah pendukung Deleniasi Kawasan memiliki peningkatan setiap tahunnya.

E. Keterkaitan Penelitian dengan Kandungan Ayat Al-Quran dan Al-Hadis

Kota adalah tata ruang di atas permukaan (darat) dengan batas-batas wilayah administrasi yang telah ditetapkan di mana terjadi konsentrasi (pemusatan) penduduk di dalamnya beserta berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan politik. Penduduk perkotaan bertambah terus jumlahnya secara alami, yang diperbesar lagi oleh urbanisasi. Semakin besar suatu kota, daya tariknya lebih

besar pula maka tingkat urbanisasinya semakin tinggi, secara nasional, penduduk perkotaan mencapai sekitar 50 persen (di Indonesia) ditotal penduduk suatu negara dan negara-negara maju mencapai lebih dari 60 persen. Dilihat dari aspek hubungan dengan daerah-daerah di luar, peranan kota sangat penting dan strategis, yaitu berfungsi sebagai mata dan telinga dalam pengembangan wilayah (Adisasmita, 2014).

Pertumbuhan kota juga ditandai dari peningkatan jumlah penduduk yang mengakibatkan aktifitas sosial ekonomi meningkat. Peningkatan aktivitas ini mendorong pembangunan infrastruktur penunjang aktivitas. Kebutuhan akan ruangpun semakin bertambah sehingga lahan terbangun menjadi semakin luas. Kota tumbuh dan berkembang biasanya dilihat dari luas lahan yang terbangun.

Dalam Al-Qur'an di jelaskan pada Q.S. Saba'/34:15 yang berbunyi:

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ
رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugrahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun. (Kementerian Agama, 2012).

Menurut M. Quraish Shibab dalam tafsir Al-Misbah menafsirkan dalam Firman-Nya "Baladun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur" negeri yang baik dan Tuhan Maha Pengampun memberi isyarat bahwa satu masyarakat tidak dapat luput dari dosa dan kedurkahaan. Seandainya tidak demikian, tidaklah ada arti

penyebutan kalimat Rabbun Ghafur / Tuhan Maha Pengampun. Pada masa Nabi Muhammad saw, pun ada anggota masyarakat beliau yang berdosa. Sungguh, kita telah meremehkan perjuangan Nabi Muhammad saw, dan para sahabat beliau jika kita menduga bahwa seluruh anggota masyarakat mereka terdiri dari orang-orang yang luput dari dosa dan kedurhakaan. Negeri yang baik yang dimaksud merupakan negeri yang “aman sentosa, melimpah rezekinya” dengan cara memperoleh yang mudah, dan terdapat “hubungan harmonis kesatuan dan persatuan” dalam masyarakat di negeri tersebut.

Menurut Bintara dalam Khairuddin (2000) Fenomena pembangunan telah menjadi perhatian banyak pihak termasuk sebagai subjek penelitian, baik dalam hal dampak-dampak pembangunan maupun instrumen-instrumen kebijakan dalam manajemen lahan, meskipun masih sedikit perhatian diberikan pada cara-cara bagaimana berbagai kelompok pelaku dan lembaga-lembaga terlibat di dalam pembangunan kota, dampak dari upaya pengembangan suatu kota yang dilakukan berdasarkan pada peran dan fungsi kota melalui suatu kebijakan pembangunan kota pada aspek fisik dapat meliputi meningkatnya intensitas penggunaan lahan kota, meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana kota, serta menurunnya kualitas kota.

pembangunan pada dasarnya tidak hanya persoalan fisik itu maka pada modul ini, kiranya penting bagi kita untuk menyelaraskan makna pembangunan itu pada perspektif pertumbuhan kemajuan negara, meski makna pembangunan yang dipahami secara umum tersebut tidaklah salah.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan pada Q.S. Al-A'raf /7:56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ


رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah memperbaikannya dan berdoalah kepada-Nya dalam keadaan takut dan harapan. Sesungguhnya Rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (Kementerian Agama, 2012).

Dalam M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menafsirkan ayat ini melarang pengrusakan di bumi. Pengrusakan adalah salah satu bentuk pelampauan batas. Alam raya telah diciptakan oleh Allah SWT, dalam keadaan yang sangat harmonis, serasi dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah telah menjadikannya baik, bahkan memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk memperbaikinya.

Salah satu bentuk perbaikan yang dilakukan Allah SWT adalah dengan mengutus para Nabi untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan yang kacau dalam masyarakat. Siapa yang tidak menyambut kedatangan Rasul, atau menghambat misi mereka, dia telah melakukan salah satu bentuk pengrusakan di bumi. Merusak setelah diperbaiki jauh lebih buruk dari pada merusaknya sebelum diperbaiki atau pada saat dia buruk. Karena itu ayat ini secara tegas menggaris bawahi larangan tersebut, walaupun tentunya memperparah kerusakan atau merusak yang baik juga amat tercela.

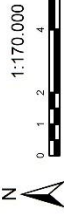


JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2020

TUGAS MATA KULIAH

TUGAS AKHIR

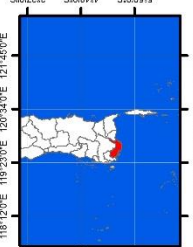
PETA KEMIRINGAN LERENG DELENASI KAWASAN
KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN



 0 1 2 4 6 8 km
 1:170.000

Proyeksi :
 Sistem Grid :
 Zona UTM :

:
 :
 :



118°12'0"E 119°23'0"E 120°34'0"E 121°45'0"E
 5°56'0"S 4°48'0"S 3°37'0"S
 118°12'0"E 119°23'0"E 120°34'0"E 121°45'0"E
 5°56'0"S 4°48'0"S 3°37'0"S
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Kabupaten Jeneponto

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Deleniasi Kawasan
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Sungai
- Garis Pantai
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

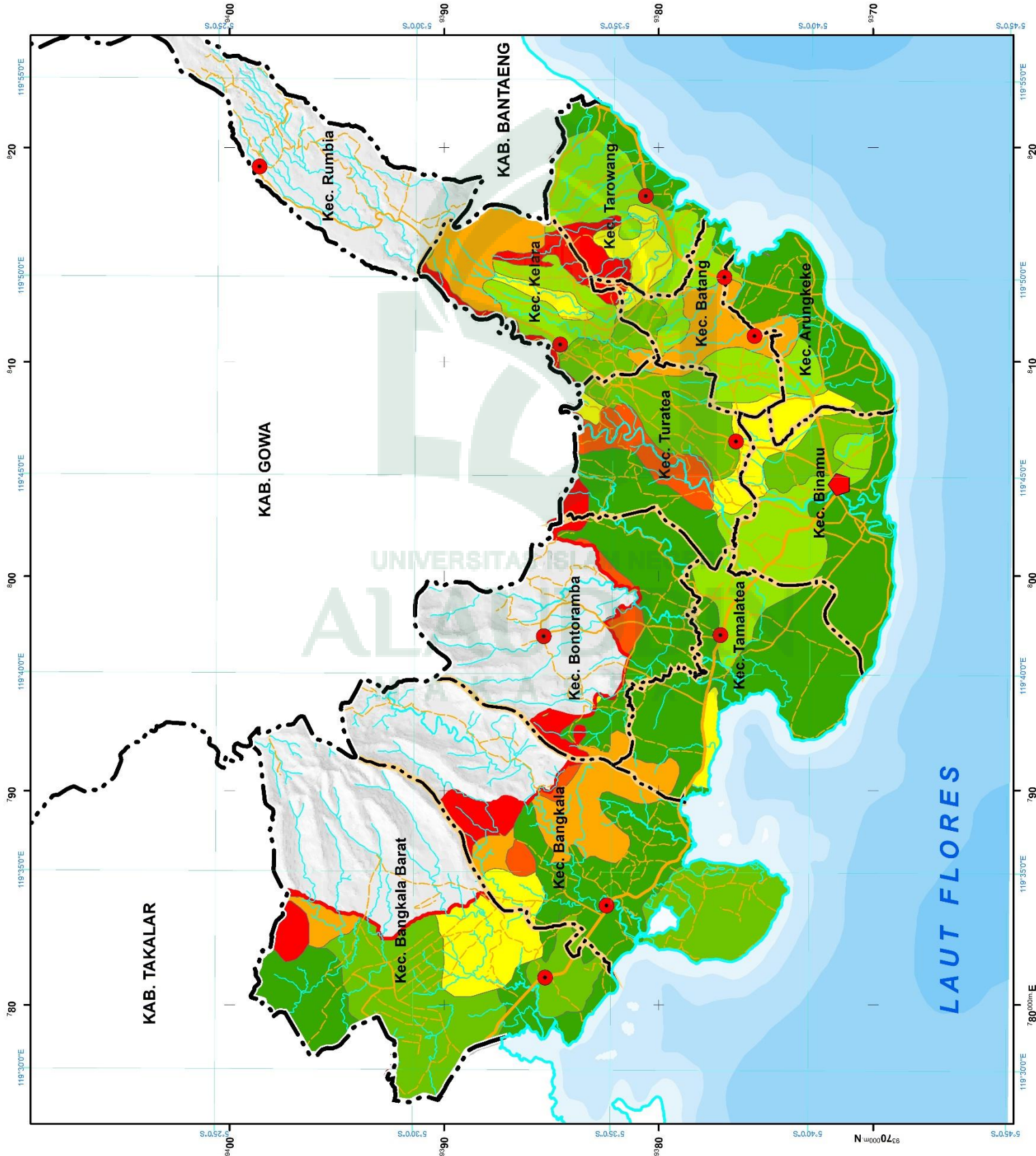
PEMBAGIAN KEMIRINGAN LERENG

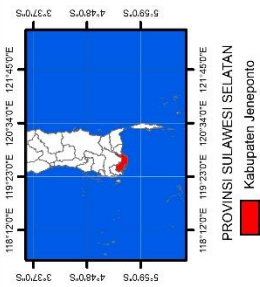
- Lereng < 2 %
- Lereng 2 - 8 %
- Lereng 8 - 15 %
- Lereng 15 - 25 %
- Lereng 25 - 40 %
- Lereng 40 - 60 %
- Lereng > 60 %

NAMA DOSEN PEMBIMBING
 1. NURSİYAM AKSA, S.T., M.Si
 2. FADHIL SURUR, S.T., M.Si











NAMA MAHASISWA
 MUH NURSİYANSIR ALI
 60800115061

SUMBER PETA
 1. CITRA SATELIT 2019
 2. RTRW KABUPATEN JENEPONTO 2011-2031
 3. HASIL OVERLAY





LEGENDA

-  Batas Kabupaten
 Batas Kecamatan
 Batas Deleniasi Kawasan
 Jalan Kolektor Primer
 Jalan Lokal Primer
 Jalan Lokal Sekunder
 Sungai
 Garis Pantai
 Ibukota Kabupaten
 Ibukota Kecamatan

BENCANA ALAM

- Tidak Berpotensi
Banjir
Longsor Sedang
Longsor Tinggi
Longsor Sangat Tinggi

NAMA DOSEN PEMBIMBING

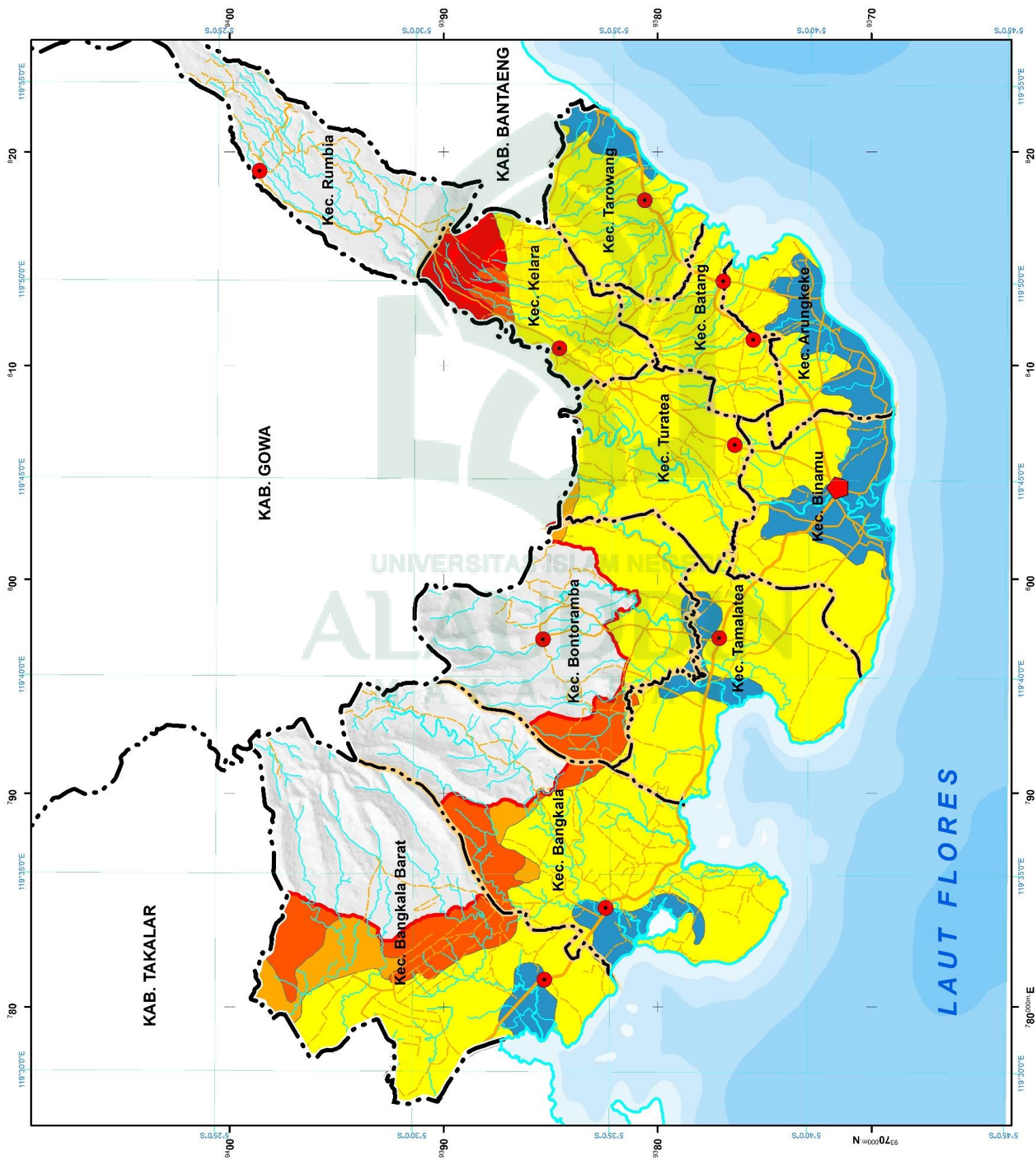
1. NURSYAM AKSA, S.T., M.Si
2. FADHIL SURUR, S.T., M.Si


NAMA MAHASISWA

60800115061

SUMBER PETA

1. CITRA SATELIT 2019
2. RTRW KABUPATEN JENEPONTO 2011-2031
3. HASIL OVERLAY





JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2020

TUGAS MATA KULIAH

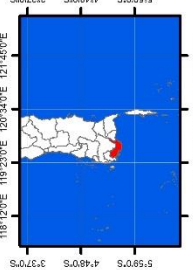
TUGAS AKHIR

PETA POLA RUANG (BUDIDAYA) DELENIASI KAWASAN
KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN

N 1:170.000

0 1 2 4 6 8 km

Proyeksi :
Sistem Grid :
Datum :
Zona UTM :
SRS :



118°12'0"E 119°23'0"E 120°34'0"E 121°45'0"E
5°56'0"S 4°48'0"S 3°37'0"S

PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kabupaten Jeneponto

LEGENDA

--- Batas Kabupaten
--- Batas Kecamatan
--- Batas Deleniasi Kawasan
--- Jalan Kolektor Primer
--- Jalan Lokal Primer
--- Jalan Lokal Sekunder

Sungai
Garis Pantai
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan

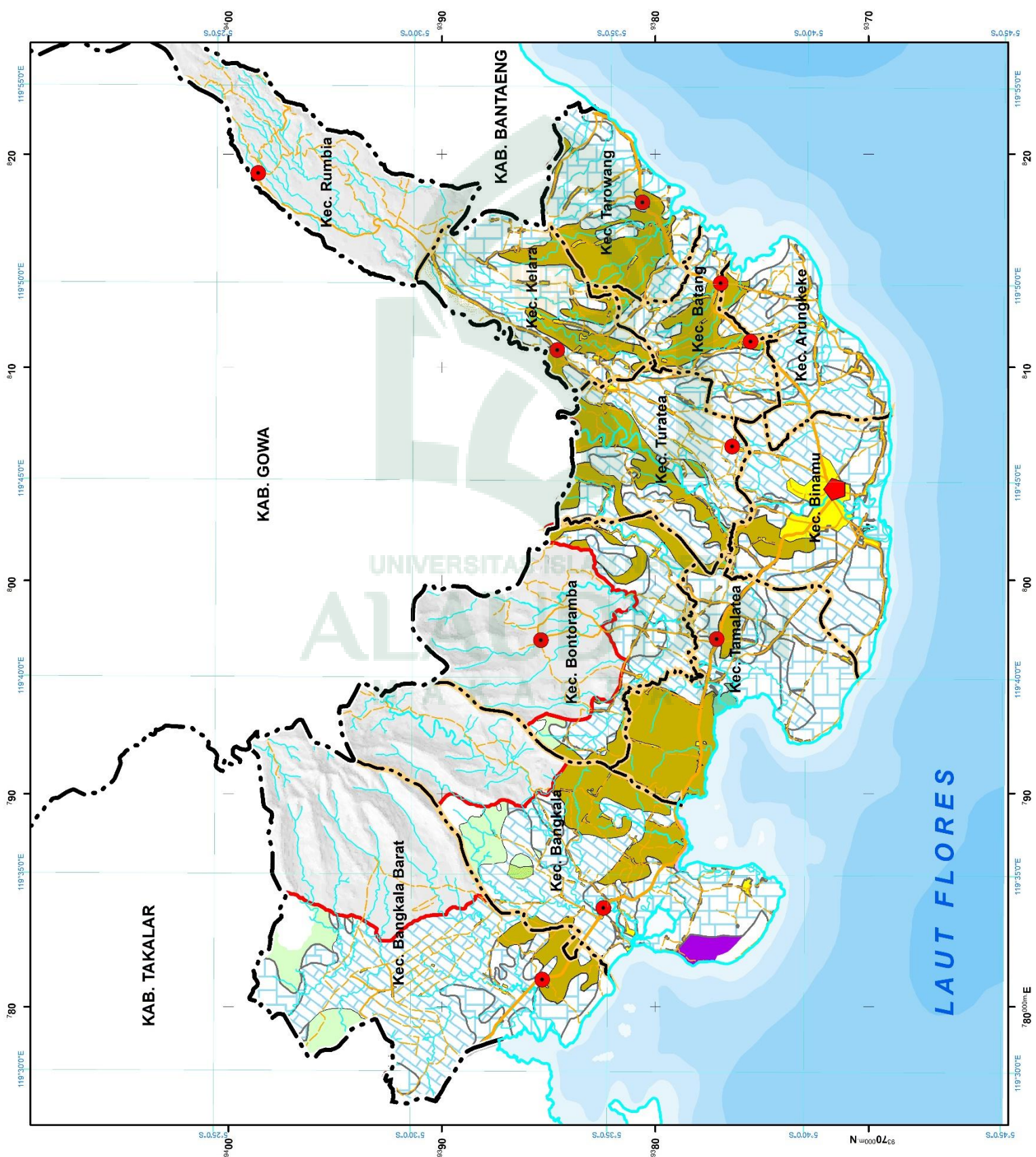
KAWASAN BUDIDAYA


Pemukiman
Kawasan Industri
Kawasan Industri Garam Rakyat
Perkebunan dan Agroforestry
Peternakan
Tambak
Pertanian Lahan Basah
Pertanian Lahan Kering
Agroforestry
Kawasan Budidaya Kehutanan

NAMA DOSEN PEMBIMBING
1. NURSİYAM AKSA, S.T., M.Si
2. FADHIL SURUR, S.T., M.Si

NAMA MAHASISWA
MUH NURSİYAM SIR ALI
60000115061

SUMBER PETA
1. CITRA SATELIT 2019
2. RTRW KABUPATEN JENEPONTO 2011-2031
3. HASIL OVERLAY



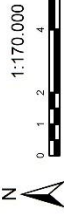


JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2020

TUGAS MATA KULIAH

TUGAS AKHIR

PETA POLA RUANG (LINDUNG) DELENIASI KAWASAN
KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN

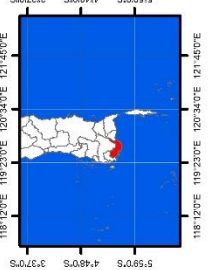


 0 1 2 4 6 8 km
 1:170.000

Proyeksi :
 Sistem Grid :
 Zona UTM :

:
 :
 :

:
 :
 :



118°12'0"E 119°23'0"E 120°34'0"E 121°45'0"E
 5°56'0"S 4°48'0"S 3°37'0"S
 118°12'0"E 119°23'0"E 120°34'0"E 121°45'0"E
 5°56'0"S 4°48'0"S 3°37'0"S
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Kabupaten Jeneponto

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Deleniasi Kawasan
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Sungai
- Garis Pantai
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

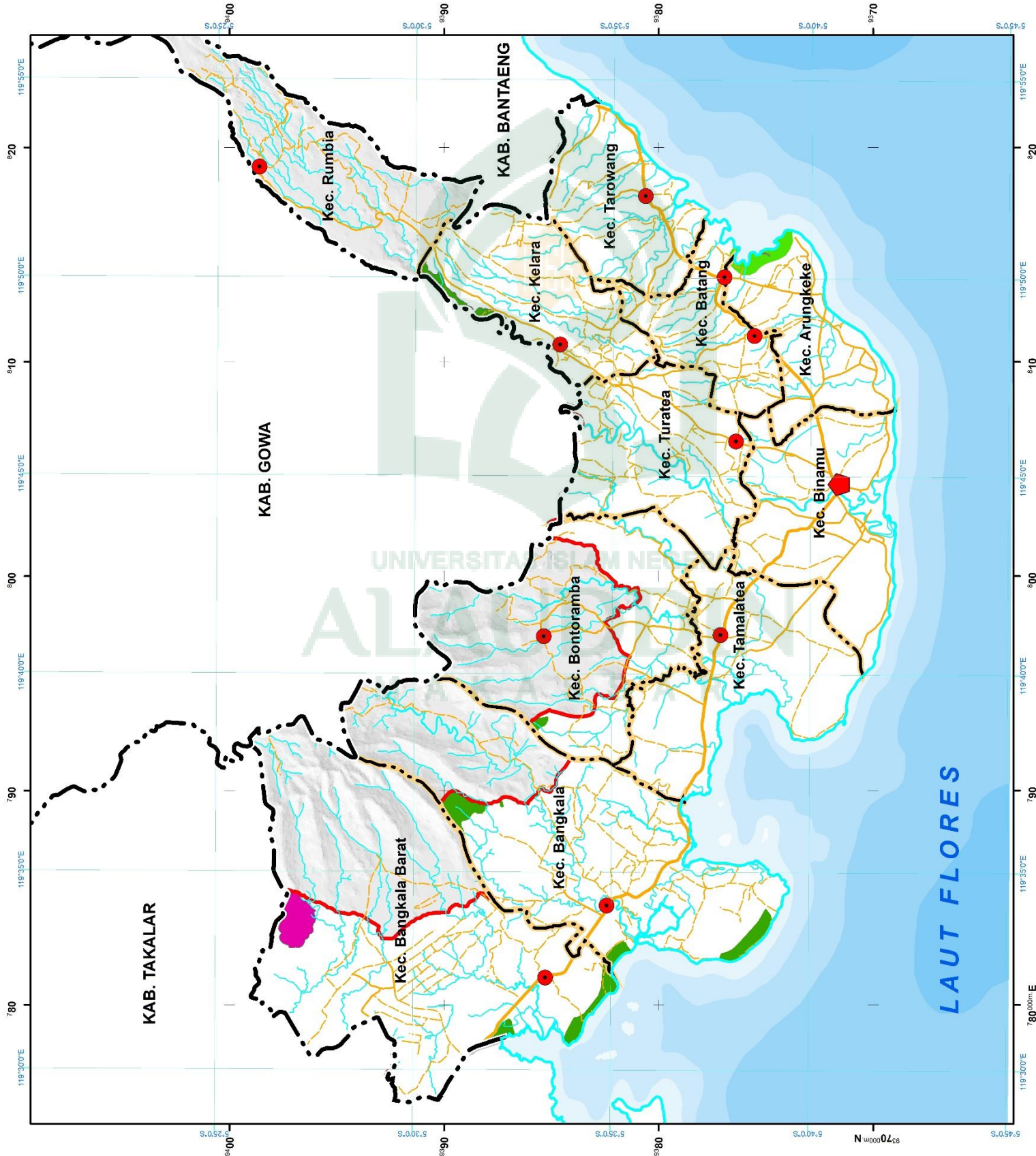
KAWASAN LINDUNG

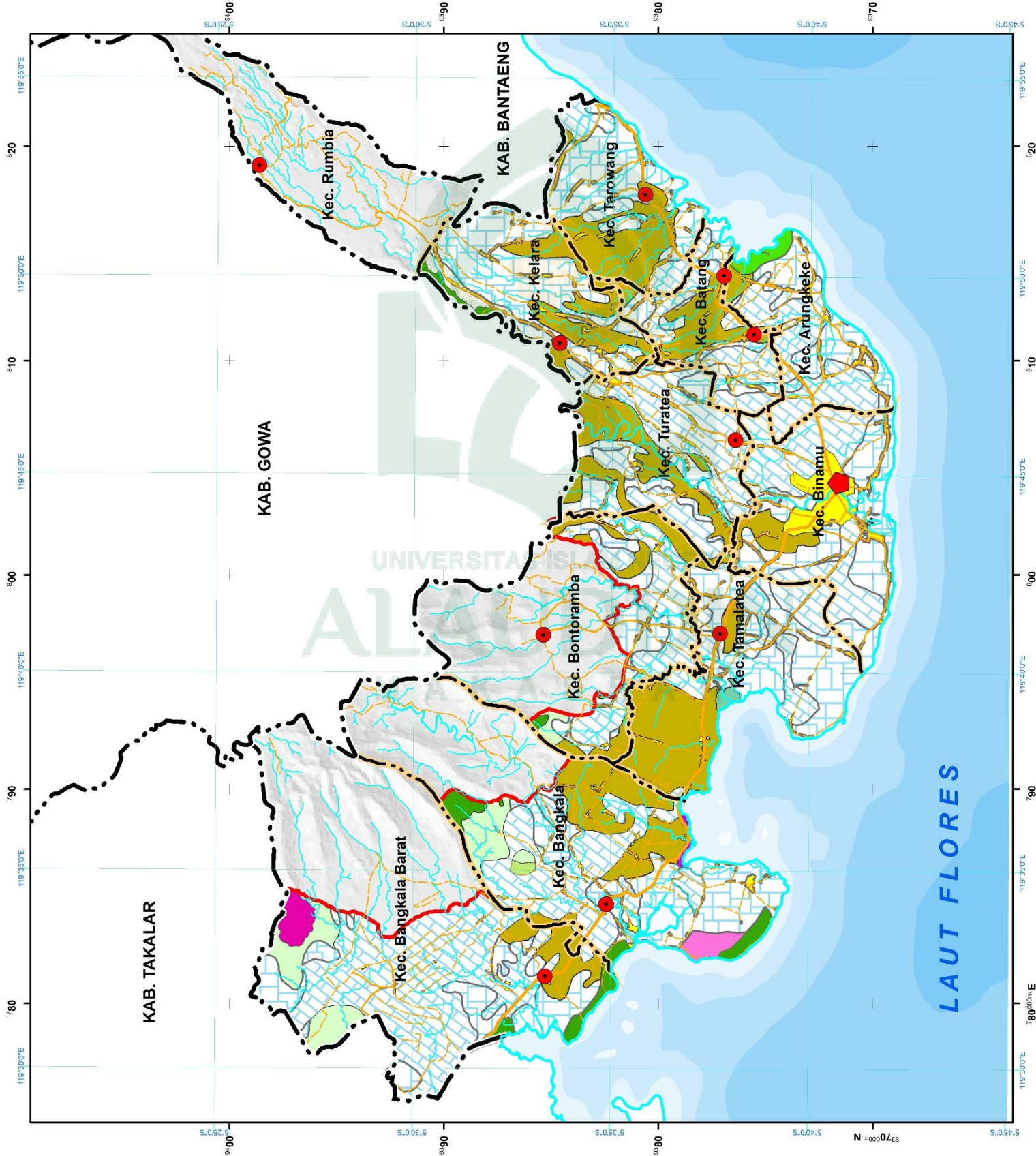
- Hutan Lindung
- Hutan Bakau
- Taman Buru Komara

NAMA DOSEN PEMBIMBING
 1. NURSİYAMAKSA S.T., M.Si
 2. FADHIL SURUR, S.T., M.Si

NAMA MAHASISWA
 MUH NURSİYANSIR ALI
 60800115061

SUMBER PETA
 1. CITRA SATELIT 2019
 2. RTRW KABUPATEN JENEPONTO 2011-2031
 3. HASIL OVERLAY





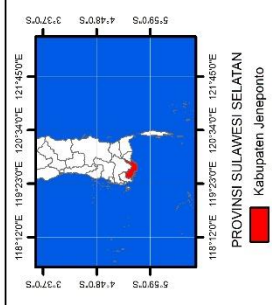
JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2020

TUGAS MATA KULIAH
TUGAS AKHIR

PETA POLA RUANG (LUNDUNG) DELENASI KAWASAN
KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN



Proyeksi :
Sistem Koordinat :
Zona UTM :
Universitas Transverse Mercator (UTM)
Datum Geografi :
Datum :
Datum :
Datum :



LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Delenasi Kawasan
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- KAWASAN LINDUNG**
 - Hutan Lindung
 - Hutan Bakau
 - Taman Buru Komara
- KAWASAN BUDIDAYA**
 - Permukiman
 - Kawasan Industri
 - Pertanian
 - Tambak
 - Agroforestry
- KAWASAN INDUSTRI GARAM RAKYAT**
 - Perkebunan dan Agroforestry
 - Kawasan Budidaya Kehutanan
 - Pertanian Lahan Basah
 - Pertanian Lahan Kering
- Sungai**
- Garis Pantai**
- Ibukota Kabupaten**
- Ibukota Kecamatan**

NAMA DOSEN PEMBIMBING


1. NURSYAM AKSA, S.T., M.Si
2. FADHIL SURUR, S.T., M.Si

NAMA MAHASISWA

MUJ NURSYAMISIRALI
60800115061

SUMBER PETA

1. CITRA SATELIT 2019
2. RTRW KABUPATEN JENEPONTO 2011-2031
3. HASIL OVERLAY



JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2020

TUGAS MATA KULIAH

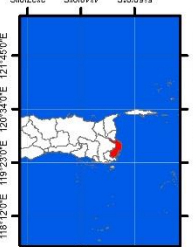
TUGAS AKHIR

PETA INFRASTRUKTUR DELENIASI KAWASAN
KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN

N
 0 1 2 4 6 8 km
 1:170.000

Proyeksi :
 Sistem Grid :
 Zona UTM :

:
 :
 :



118°12'0"E 119°23'0"E 120°34'0"E 121°45'0"E
 5°56'0"S 4°48'0"S 3°37'0"S
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Kabupaten Jeneponto

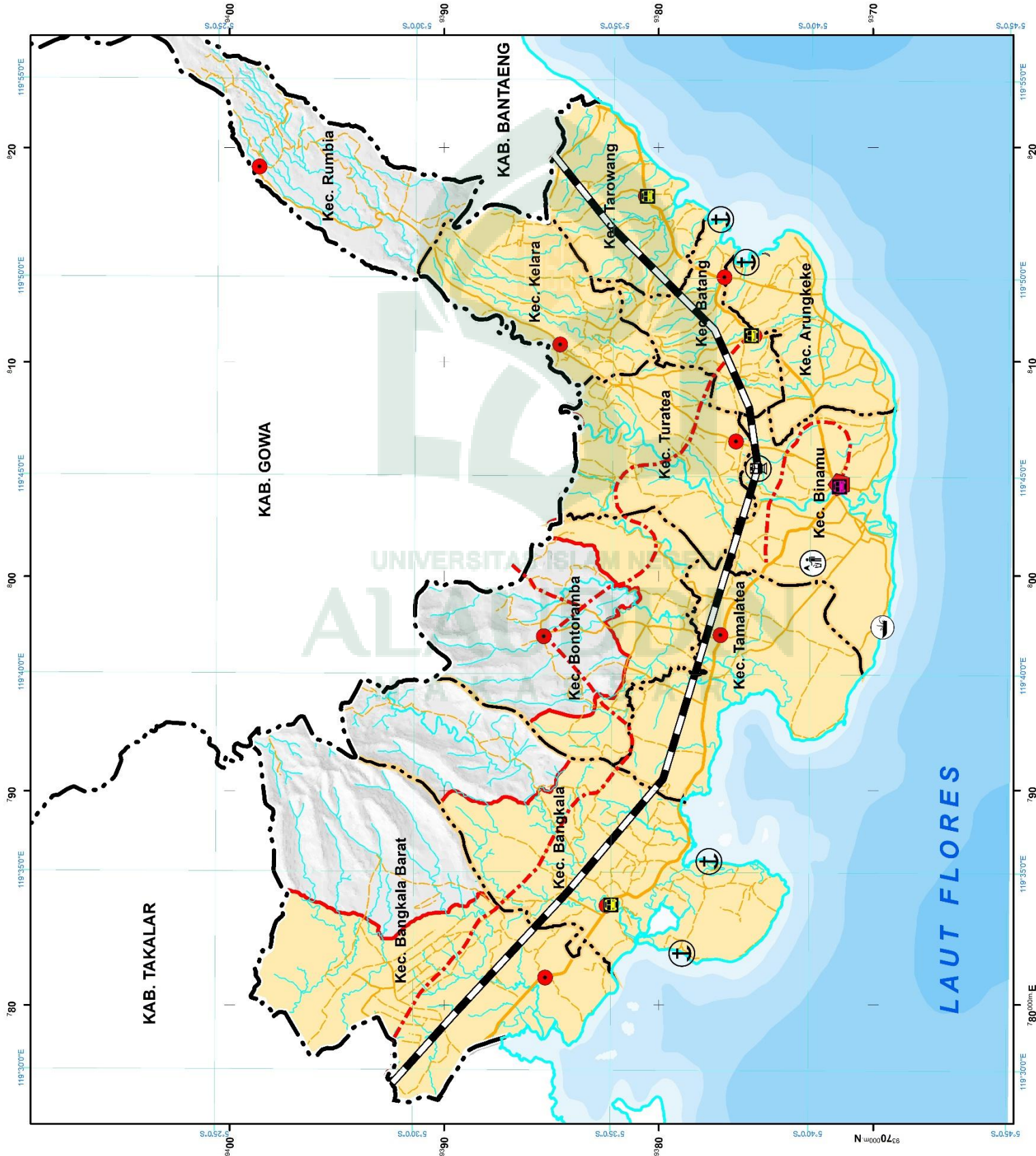
LEGENDA


- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Deleniasi Kawasan
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Rencana Kereta Api Lintas Utama
- Rencana Jalan Alternatif
- Terminal Tipe B
- Terminal Tipe C
- Stasiun Kereta Api
- Pelabuhan
- Tempat Pembuangan Akhir
- TPI Tanusumpe
- Sungai
- Garis Pantai
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

NAMA DOSEN PEMBIMBING
 1. NURSAYAMAKSA, S.T., M.Si
 2. FADHIL SURUR, S.T., M.Si

NAMA MAHASISWA
 MUH NURSAYANSIR ALI
 60800115061

SUMBER PETA
 1. CITRA SATELIT 2019
 2. RTRW KABUPATEN JENEPONTO 2011-2031
 3. HASIL OVERLAY





JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2020

TUGAS MATA KULIAH
TUGAS AKHIR

PETA CAKUPAN LUAS LAHAN DELENIASI KAWASAN
KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN

0 1 2 4 6 8 km
N
1:170.000

Proyeksi :
Sistem Grid :
Zona UTM :
SRS :
118°12'0"E 119°23'0"E 120°34'0"E 121°45'0"E
5°56'0"S 4°48'0"S 3°37'0"S
118°12'0"E 119°23'0"E 120°34'0"E 121°45'0"E
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kabupaten Jeneponto

LEGENDA

Batas Kabupaten

Batas Kecamatan

Batas Deleniasi Kawasan

Jalan Kolektor Primer

Jalan Lokal Primer

Jalan Lokal Sekunder

Sungai

Garis Pantai

●

 Ibukota Kabupaten

●

 Ibukota Kecamatan

CAKUPAN LUAS LAHAN

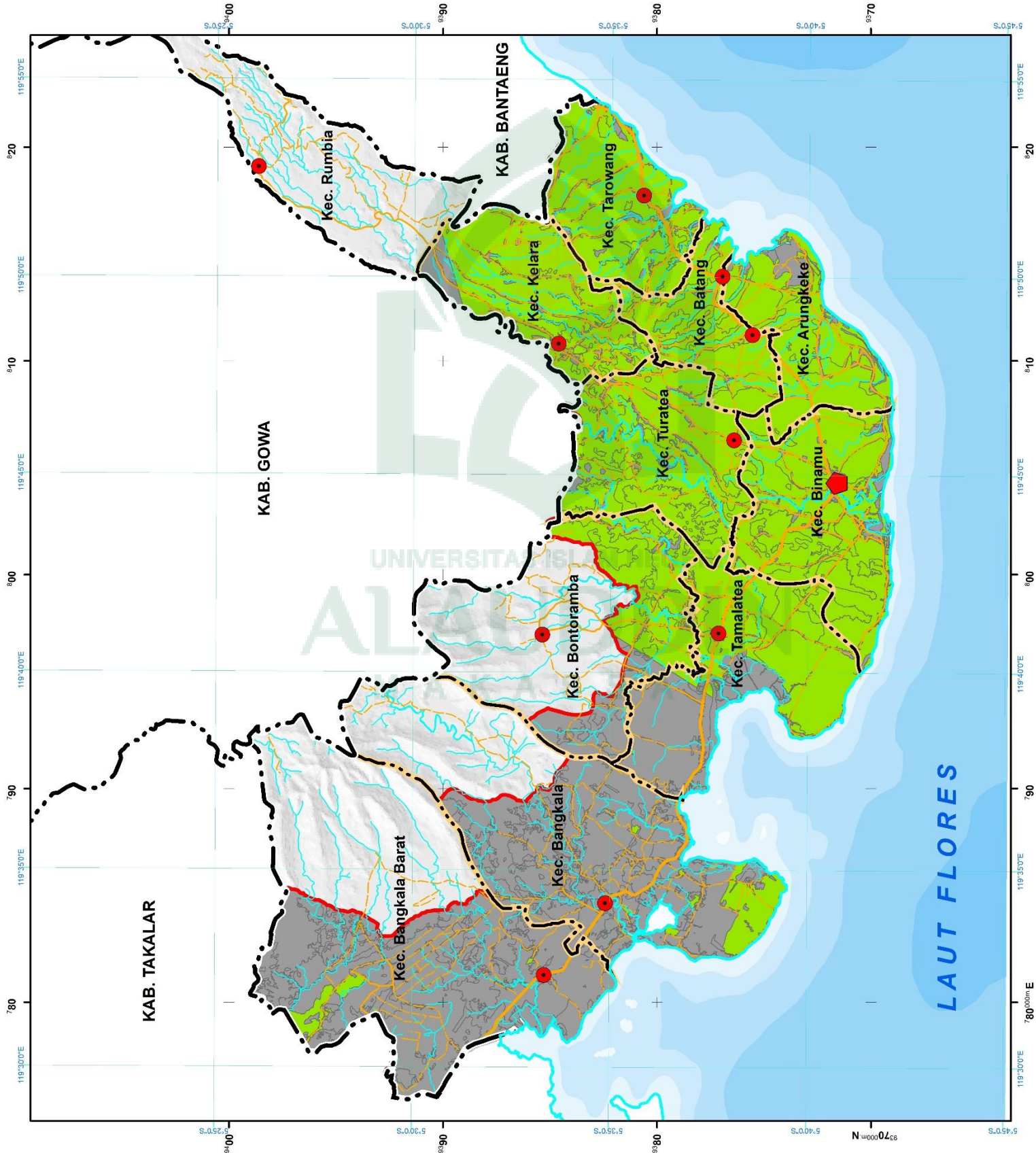
Lahan Produktif


Lahan Tidak Produktif

NAMA DOSEN PEMBIMBING
1. NURSİYAM AKSA, S.T., M.Si
2. FADHIL SURUR, S.T., M.Si

NAMA MAHASISWA
MUH NURSİYANSIR ALI
60800115061

SUMBER PETA
1. CITRA SATELIT 2019
2. RTRW KABUPATEN JENEPONTO 2011-2031
3. HASIL OVERLAY





JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2020

TUGAS MATA KULIAH

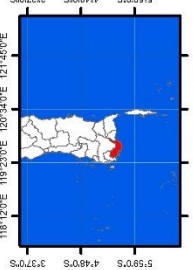
TUGAS AKHIR

PETA PEMANFAATAN LAHAN DELENIASI KAWASAN
KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN

N
 0 1 2 4 6 8 km
 1:170.000

Proyeksi :
 Sistem Grid :
 Zona UTM :

:
 :
 :



118°12'0"E 119°23'0"E 120°34'0"E 121°45'0"E
 5°56'0"S 4°48'0"S 3°37'0"S
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Kabupaten Jeneponto

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Deleniasi Kawasan
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Sungai
- Garis Pantai
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

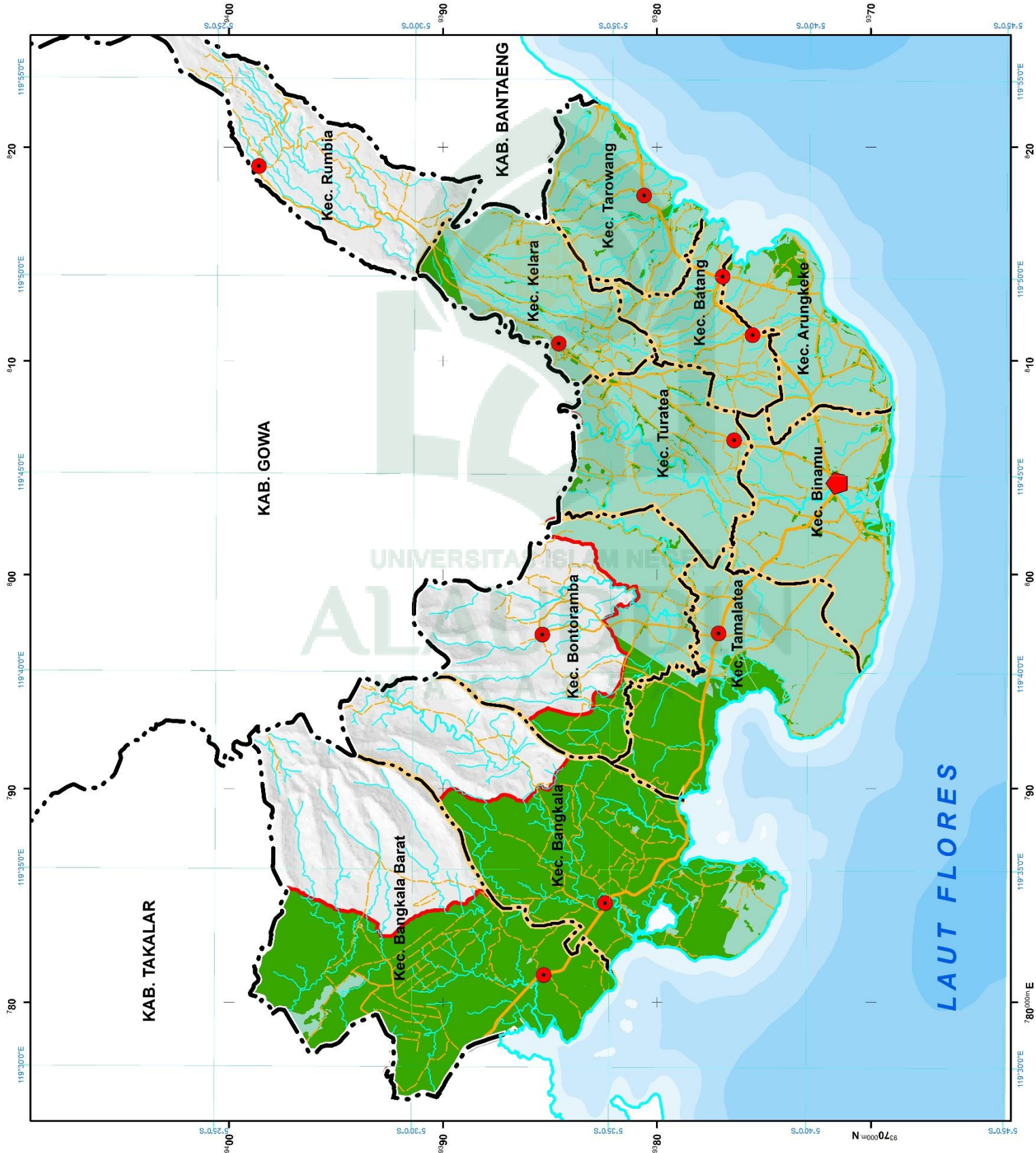
PEMANFAATAN LAHAN


- Berpeluang Untuk Di Kembangkan
- Tidak Berpeluang Untuk Di Kembangkan

NAMA DOSEN PEMBIMBING
 1. NURSİYAMAKSA S.T., M.Si
 2. FADHIL SURUR, S.T., M.Si

NAMA MAHASISWA
 MUH NURSİYANSIR ALI
 60800115061

SUMBER PETA
 1. CITRA SATELIT 2019
 2. RTRW KABUPATEN JENEPONTO 2011-2031
 3. HASIL OVERLAY





JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2020

TUGAS MATA KULIAH

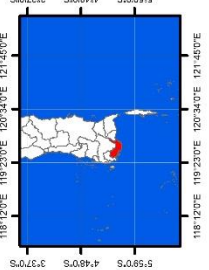
TUGAS AKHIR

PETA SUMBER DAYA ALAM DELENIASI KAWASAN
KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN

N
 0 1 2 4 6 8 km
 1:170.000

Proyeksi :
 Sistem Grid :
 Zona UTM :

:
 :
 :



118°12'0"E 119°23'0"E 120°34'0"E 121°45'0"E
 5°56'0"S 4°48'0"S 3°37'0"S
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Kabupaten Jeneponto

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Deleniasi Kawasan
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Sungai
- Garis Pantai
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

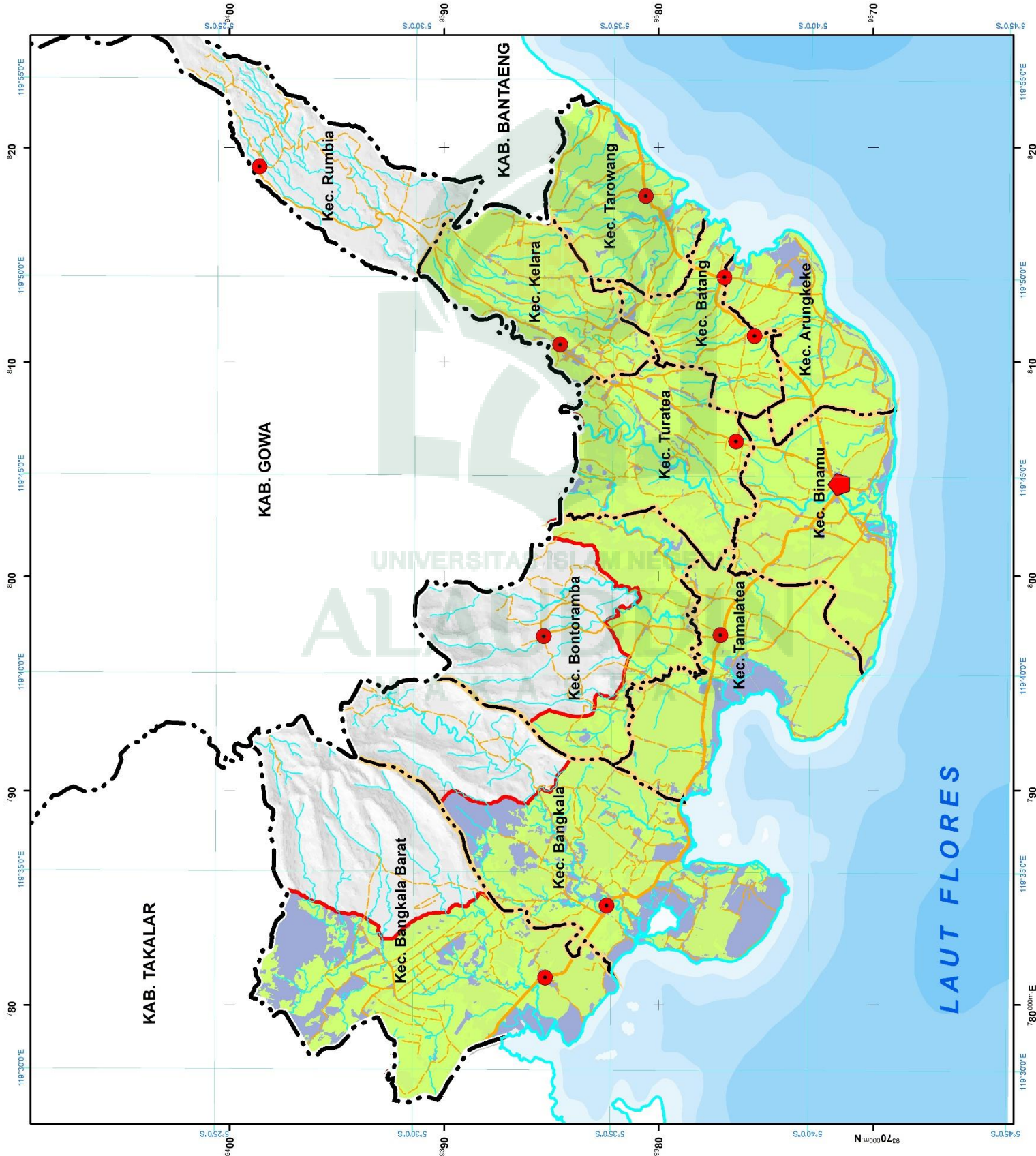
SUMBER DAYA ALAM

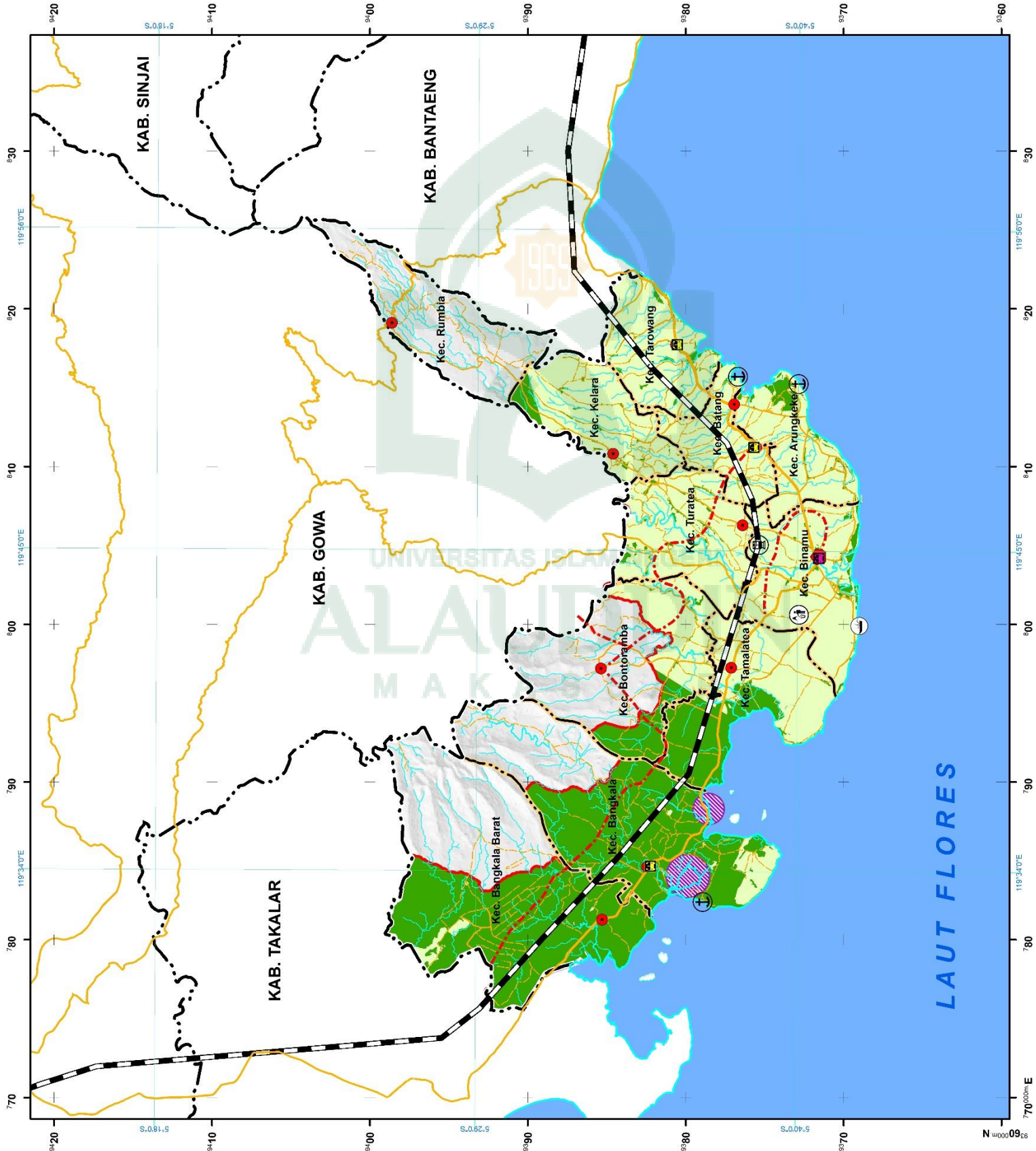
- Berpotensial
- Tidak Berpotensi

NAMA DOSEN PEMBIMBING
 1. NURSYAMAKSA, S.T., M.Si
 2. FADHIL SURUR, S.T., M.Si

NAMA MAHASISWA
 MUH NURSAMSIR ALI
 60800115061

SUMBER PETA
 1. CITRA SATELIT 2019
 2. RTRW KABUPATEN JENEPONTO 2011-2031
 3. HASIL OVERLAY





JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2020

TUGAS MATA KULIAH

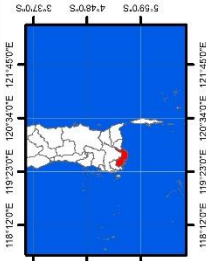
TUGAS AKHIR

PETA ANALISA DELENIASI KAWASAN
KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN

1:230.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Geografi
Datum UTM : SRS



PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kabupaten Jeneponto

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Deleniasi Kawasan
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Rencana Kereta Api Lintas Utama
- Rencana Jalan Alternatif
- Terminal Tipe B
- Terminal Tipe C
- Stasiun Kereta Api
- Pelabuhan
- Tempat Pembuangan Akhir
- TPI Tannusumpe

ANALISA KAWASAN

- Kawasan Lahan Produktif
- Kawasan Lahan Tidak Produktif
- Kawasan Industri Garam

NAMA DOSEN PEMBIMBING


- NURSYAM AKSA, S.T., M.Si
- FADHIL SURUR, S.T., M.Si

NAMA MAHASISWA

MUHAMMAD NURSYAMSIR ALI
60800115061

SUMBER PETA

- CITRA SATELIT 2019
- RTRW KABUPATEN JENEPONTO 2011-2031
- HASIL OVERLAY



JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2020

TUGAS MATA KULIAH
TUGAS AKHIR


PETA ARAHAN RTRW POTENSI KABUPATEN KAWASAN PENDUKUNG
DELENASI KAWASAN KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN

N
0 1.75 3.5 7 10.5 14
km

1:270.000

Proyeksi :
Sistem Grid :
Zone UTM :
50S

Universa Transverse Mercator (UTM)
Grid Geografi



118°12'0"E 119°23'0"E 120°34'0"E 121°45'0"E
5°09'0"S 4°48'0"S 5°09'0"S 4°48'0"S 5°09'0"S 4°48'0"S 5°09'0"S 4°48'0"S

PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kabupaten Jeneponto

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Deleniasi Kawasan
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Rencana Kereta Api Lintas Utama
- Sungai
- Garis Pantai
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

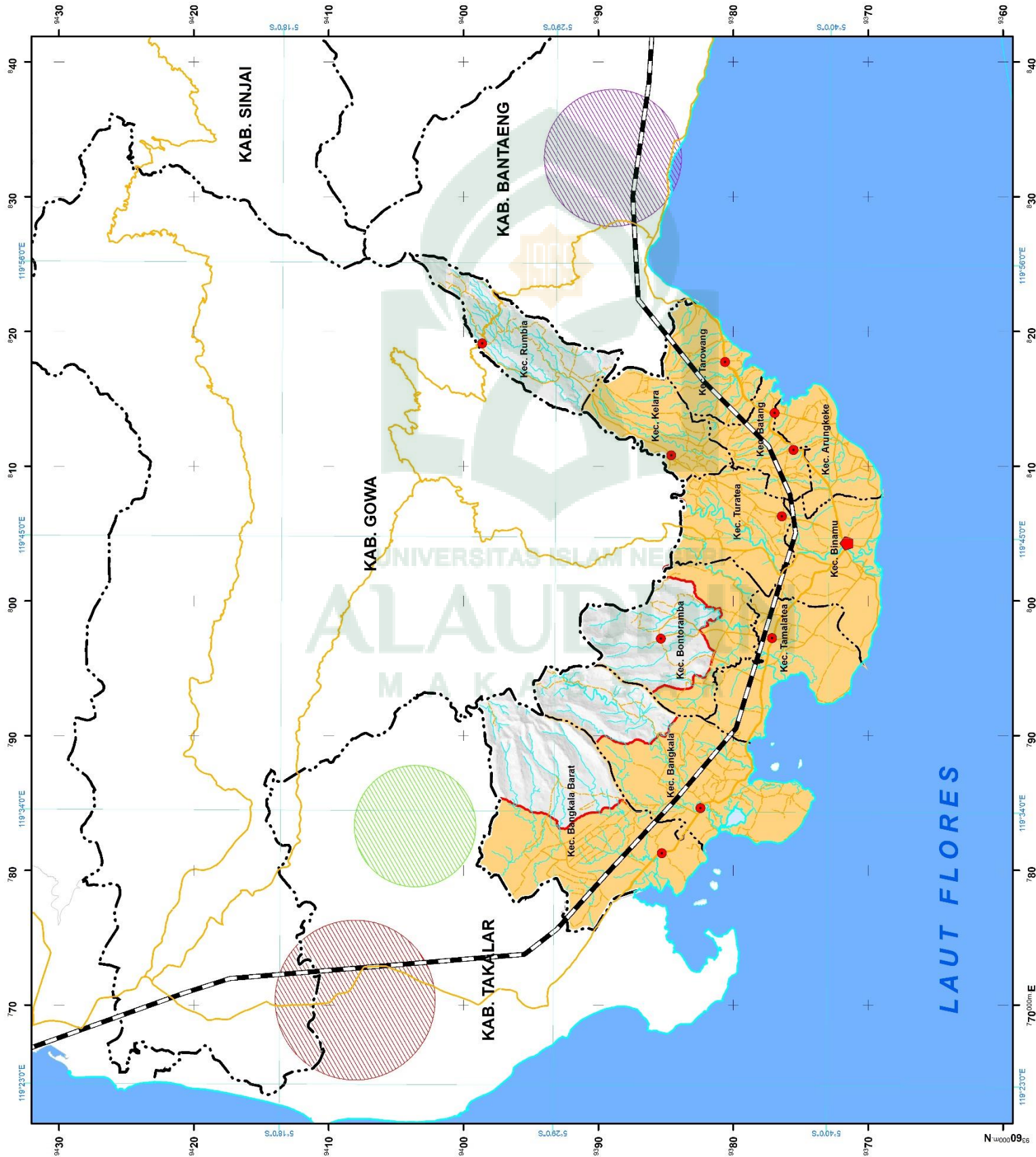
POTENSI ARAHAN RTRW

- Kawasan Deleniasi
- Kabupaten Bantaeng Sebagai Kawasan Industri
- Kabupaten Takalar Sebagai Kawasan Pertanian
- Mamminasata Sebagai Kawasan Perkotaan

NAMA DOSEN PEMBIMBING
1. NURSYAM AKSA, S.T., M.Si
2. PADHIL SURUR, S.T., M.Si

NAMA MAHASISWA
MUH NURSYAMSIRALI
60800115061

SUMBER PETA
1. CITRA SATELIT 2019
2. RTRW KABUPATEN JENEPONTO 2011-2031
3. HASIL OVERLAY



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan di wilayah Deleniasi Kawasan di Kabupaten Jeneponto untuk menjawab tujuan dari penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Faktor-faktor penentu suatu Ibu Kota Skala Nasional di Deleniasi Kawasan Kabupaten Jeneponto yaitu faktor kondisi fisik wilayah, faktor infrastruktur, faktor lahan, faktor ekonomi, dan faktor kedudukan strategis berdasarkan hasil analisis sangat berpeluang dalam pengembangan Ibu Kota Skala Nasional, dan yang menjadi lemah dalam faktor penentu suatu Ibu Kota ialah faktor politik dan hukum karena Kabupaten Jeneponto tidak masuk dalam wacana pemindahan Ibu Kota tetapi apabila kita melihat berdasarkan geopolitiknya Kabupaten Jeneponto berada di kawasan strategis, yaitu lokasinya berada ditengah pulau Indonesia sehingga pembangunan setiap wilayah bisa berkembang secara merata, Kabupaten Jeneponto dalam konstelasi RTRW Provinsi yaitu diapit oleh 1 PKN (Kawasan Mamminasata) dan 1 PKW (Kabupaten Bantaeng) yang dapat membantu perkembangan kawasan Ibu Kota, di sekitar Kabupaten Jeneponto Infrastruktur untuk instalasi pertahanan dan keamanan sudah memiliki pertahanan Hasanuddin yang berada di kawasan Mamminasata yang dimana sebagai pusat pertahanan bagian kawasan timur, serta Kabupaten Jeneponto berada di lalui jalan Nasional dan rencana kereta api lintas utama.

2. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka pengembangan pusat kota skala nasional di Kabupaten Jeneponto melihat pada bidang ekonomi sangat berpeluang, berdasarkan penejelasan ekonomi yaitu mempelajari aspek-aspek ekonomi dalam proses pembangunan di berbagai wilayah, yang dimana Kabupaten Jeneponto berada dengan wilayah pendukung yang memiliki kecenderungan arah pergerakan aktivitas ekonominya meningkat setiap tahunnya, Kabupaten bantaeng yang memiliki potensi kawasan industri, Kabupaten takalar yang berada dalam kawasan Mamminasata yang memiliki kawasan perkotaan dan infrastruktur yang memadai, sehingga kawasan deleniasi sangat mendukung dalam pengembangan pusat kota skala nasional di Kabupaten Jeneponto karena memiliki wilayah pendukung yang rata-rata kawasan dari sektoralnya meningkat setiap tahunnya.

B. Saran

Mengacu pada hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut.

1. Dengan melihat peluang Kabupaten Jeneponto berpeluang untuk dikembangkan menjadi pusat kota skala nasional, maka pemerintah pusat perlu memperhatikan Kabupaten Jeneponto karna melihat dari aspek-aspeknya sangat berpeluang dan berada di tengah pulau Indonesia sehingga perkembangan pembangunan dapat merata. Pemerintah daerah setempat kiranya perlu juga memperhatikan lahan-lahan yang cocok bagi pengembangan agar tetap berpedoman pada arah dan kebijakan tata ruang yang telah ada.

2. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini bukan hanya melihat dari peluang-peluang Kabupaten Jenepono sebagai pengembangan pusat kota skala nasional dan peluang dalam bidang ekonominya tetapi perlu juga kajian yang lebih mendalam, bukan hanya Kabupaten pendukung yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan melainkan perlu juga melihat dari Kabupaten lain yang berada diluar Provinsi Sulawesi Selatan.



DAFTAR PUSTAKA

Ana Fitria Wahidah dan Sri Rum Giyarsih, 2013. **Pengaruh Perkembangan Kota Jakarta Terhadap Tingkat Perkembangan Sosial Ekonomi dan Demografi Kecamatan Serpong Tahun 2008-2010.**

<http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/view/131>

Ariyanto. **Determinan Pembangunan Kawasan Kota Baru Moncongloe-Pattallassang Metropolitan Mamminasata.** Jurnal Plano Madani Vol 6 No. 1, Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bososwa Makassar, 2017.

<http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/planomadani/article/view/255>

Badan Pusat Statistik (BPS), 2018, **Kabupaten Jeneponto Dalam Angka 2017.** BPS; Kabupaten Jeneponto

Badan Pusat Statistik (BPS), 2019, **Kabupaten Jeneponto Dalam Angka 2018.** BPS; Kabupaten Jeneponto

Badan Pusat Statistik (BPS), 2019, **Kabupaten Bantaeng Dalam Angka 2018.** BPS; Kabupaten Bantaeng

Badan Pusat Statistik (BPS), 2019, **Kabupaten Takalar Dalam Angka 2018.** BPS; Kabupaten Takalar

Badan Pusat Statistik (BPS), 2019, **Statistik Daerah Kabupaten Bantaeng 2018.** BPS; Kabupaten Bantaeng

Badan Pusat Statistik (BPS), 2019, **Statistik Daerah Kabupaten Takalar 2018.** BPS; Kabupaten Takalar

Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd. 2016. **Pengembangan Masyarakat (wacana dan praktik)**. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Departemen Agama RI. **Al-Quran dan Terjemahannya Disertai Literasinya**. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang

Djoko Sujarto, 1993. **Perkembangan Kota Baru**.

<http://makassar.tribunnews.com/2019/04/30/ibu-kota-negara-pindah-danny-pomanto-sebut-jeneponto-layak-jadi-pengganti?page=2>

<http://www.tribunnews.com/regional/2019/05/01/wali-kota-makassar-sebut-jeneponto-cocok-jadi-ibu-kota-ri>

<https://www.beritasatu.com/nasional/551414/bappenas-ibu-kota-negara-perlu-representasikan-identitas-bangsa>

Kementerian PPN/Bappenas. 2019. **Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara**.

Luthfi Muta'ali. 2012. **Daya Dukung Lingkungan Untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah**. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFG) Universitas Gajah Mada

Mudrajad Kuncoro. 2012. **PERENCANAAN DAERAH (Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan?)**. Jakarta: Salemba Empat

Muh. Zulfiqri Syahmat. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemindahan Pusat Ibukota Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat**.

Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 7 No. 1, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Mataram, 2019.

<https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan/article/download/1327/702>

Nursyam AS. **Struktur Tata Ruang Wilayah dan Kota**. Makassar: Alauddin Press, 2013

Nicodemus R Toun. 2018. **Analisis Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah dalam Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Kota Palangkaraya**. Jurnal Academua Praja. Vol 1 No 1

<https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnalacademiapraja/article/view/5>

Onrizal. **Pembukaan Lahan Dengan Dan Tanpa Bakar**. Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, 2005.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang **Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional**

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 12 Tahun 2012 Tentang **Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 – 2032**

Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana **Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar Tahun 2012 – 2031**

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2012 Tentang **Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 – 2031**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 Tentang **Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar**

Prof. Dr. Sugiono. (2017) **Metode Analisis Deskriptif Kuantitatif**. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Prof. Dr. Rahardjo Adisasmita, M.Ec. 2014. **Ekonomi Tata Ruang Wilayah.**

Yogyakarta: Graha Ilmu

Prof. Dr. Rahardjo Adisasmita, M.Ec. 2012. **Analisis Tata Ruang**

Pembangunan. Yogyakarta: Graha Ilmu

Prof. Dr. Rahardjo Adisasmita, M.Ec dan Ir. Sakti Adji Adisasmita, M.Si.,

M.Eng.Sc., Ph.D. 2011. **Logika Pemindahan Ibukota Jakarta.**

Yogyakarta: Graha Ilmu

Rahayu Sulistyorini dan Dwi Herianto. **Analisis Multi Kriteria Sebagai**

Metode Pemilihan Suatu Alternatif Ruas Jalan Di Provinsi

Lampung, Jurnal Rekayasa Vol. 14 No. 3, Fakultas Teknik Universitas

Lampung, 2010.

<http://ftsipil.unila.ac.id/ejournals/index.php/jrekayasa/article/download97/pdf>

Saparuddin M. **Tingkat Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten**

Jeneponto. Jurnal Ilmiah Econosains Vol. 14 No. 1, Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Jakarta, 2016.

<http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/econosains/article/view/593>

Sonny Harry B Harmadi (2018/10/1-Tribunnews.com)

Teknik PWK UIN Alauddin Makassar. **Buku Pedoman Penulisan Karya**

Ilmiah Makassar. Makassar: Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan

Kota Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, 2013.

Tim Nawa Cipta. 2018. **Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara /**

Pemerintahan Indonesia. Jakarta – Indonesia

Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang **Pemerintah Daerah.**

Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang **Penataan Ruang**. Departemen
Pekerjaan Umum, Ditjen Penataan Ruang.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muh Nursyamsir Ali Lahir di Jeneponto tanggal 15 Juni tahun 1997, merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Ayahanda **H. Syamsuddin** dan Ibunda **Hj. Roslawati** yang merupakan Suku Makassar yang tinggal dan menetap di Batam. Dengan riwayat pendidikan yakni di TK Darul Ihsan Kota Batam pada tahun 2002-2003.

Setelah itu melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah dasar di SD Negeri 004 Batu Ampar Kota Batam pada tahun 2003-2009, lalu pada akhirnya mengambil pendidikan sekolah menengah pertama di PONPES IMMIM Putra Makassar pada tahun 2009-2011, dan sekolah menengah atas di PONPES IMMIM Putra Makassar pada tahun 2012-2015. Hingga pada akhirnya mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di UIN Alauddin Makassar melalui penerimaan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (UM-PTKIN) dan tercatat sebagai Alumni Mahasiswa Program Studi Sarjana (S1) pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar setelah berhasil menyelesaikan Bangku kuliahnya selama 4 tahun 8 bulan.